

repository.ub.ac.id

**EVALUASI HASIL
KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
PPK PHASE II DI DESA MENDALANWANGI
KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Oleh:
Zuli Astutik
NIM. 0001030121-31



**KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2007**



MOTTO

**Haianangerangyangberiman,jadikaridhsbardansholatsbagapendangmusesungguhnyaAllah
besertanangerangyangsabar.
(Al Baqarah:153)**

**Sesungguhnya setiap apa yang kita hadapi kemarin ataupun esok,
pahit manis, berada di puncak cita ataupun terhempas ke jurang
duka, telah Allah persiapkan sebelumnya lewat fakultas kehidupan
yang telah kita jalani.
(*lesson from life by heart,1982*)**



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah

Tiada kasih seagungkash ALLAH yang telah melimpahkan rahmatNya, sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan. Shababala bagimanya Rasulullah perantara gemestailam dari cahaya kegelapan.

Ungkapantulus dan ilubukhatiterdanku hatu rkan kepada

1. Suamiku tersayang. Mohon maaf atas segala kesalahanku selama ini.. Terima kasih atas segala kesabarannya. Semoga kita menjab sangar sholih sholihah hingga ke akhir hayat. Amien.
2. Emak (Ibu Alfiah) yang kasihnya tak terduga oleh makhluk manapun di muka bumi ini, yang tak pernah lelah menyingkirkan kerdil di jalan yang kutapaki, yang tak pernah lelah membantu bagundari keterpurukan, yang tak pernah lelah tersenyum walau hatinya sedang remuk, yang tak pernah lelah melanturkan untai doa untukku agar tetap di jalanNya. Emak, maaf sampai saat ini zuli belum bisa membarakrapi yang emak harapkan. Walau tak pernah terbaya oleh apapun, terima kasih..
3. Bapak Imam Mahdi/Mudasir. Bapak Kubukanh searang Abu Bakar, apalagi Rasulullah Muhammad SAW, akan tetapi aku bangga padanya. Atas segala tauladanya, atas kesabarannya mendidikku Bapak yang selalu menantiknengarku dengan keras agar tak terjatuh di jurang peruhuri, tak tergelincir di jalan peruhuri, tak terjepit dalam lumpur kehidupan Bapak yang selalu sigap menjagk kami, aku, mas-hari dan Emak. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
4. Ibu Riyani. Terima kasih atas segala kesabarannya. Terima kasih atas nasehat-nasehatnya, terima kasih atas segala kasih sayangnya. Mohon maaf zuli selum merepotkan Ibu. Momang zam dan buanyad lagi.. Tak pernah mengeluh dalam lelah. Selalu bekerja dan bersungguh-sungguh. Semoga Ibu selalu sehat dan panjang umur. Amin. Dan mohon maaf jika zuli belum bisa menjadi seperti yang Ibu harapkan.
5. Bapak Sangaji. Terima kasih Bapak atas kesabarannya. Terima kasih atas kebijaksanaan Bapak. Terima kasih atas tauladanya. Terima kasih atas motivasi yang ingin gazuli bisa menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf atas kebardelezuliyabapak..
6. Bapak Prof. DR. Soesbo Zuhar, MS. Sedkupert bintang I, yang telah sabar membimbing saya dengan segala kebardelezuliyabapak..
7. Bapak Drs. Abdullh Said, MSi. Sedkupert bintang II, yang juga telah dengan sabar dan juga geregetan membimbing saya. Terima kasih Pak atas motivasinya.
8. Azam kuhayark. Terima kasih atas kesabaramunk. Terima kasih atas keluardan kerd dalammu. Moga menjab putranya yang shaleh dan berbakat kepada Allah, dan menyayangi budan bapak Amin.
9. littled. Makachyaa. dah mau bantu in mormas Azam gendang mas Azam, bantu in mask. Sabar ya sayang. moga keld sehat dan menjadi adiknya yang berbakat kepada Allah dan RasulNya, juga sayang pada ibu, bapak Amin.
10. My beloved brother Mas-Hari. Matumuwun ngaputer Printernya sampai gendang kpkde. Hehehe. maaf zuli buade kabodibilangin. Mbak Tika, makachyaa... sudah menterbakti tumpangan gratis (hehehe..). Mbak Cia, jangan makachyaa sayang seragam enjab bnd yang shaleh dalam suayang samayah bunda..
11. De Ernd dan tungganganyayang sabar mengantarku wira-wiri ke seantero Malang. Makachyaa sayang...
12. De, Irad dan De Firm yang selukurepati De Faz yang sudah menjaditermain mas Azam Makachyaa.
13. De, nurul dan De, Rahmat dan De, Bevan, makachyaa. atas supportnya.
14. Keluarga besar FoST yang telah dengan sabar menjadisaudbrku. Semuambak dan mas, adek adek, maafkan atas segala khilafku Mbak Tika, mbak Aziz, Mbak Ulfa, Teh Tien, Mbak Tutik, Mbak Bain, Mbak Irma, Mbak Ita, Mbak Sittih DEKYAS (katakan mintadi capslock hehe..), de Yuen (barkallah), de Rien (kapanni nyusul), de Tuin (barkallah), dan semuanya yang segala kebaikannya tak pernah menterbakti. Jazakumulahsaru jazai.

15. Teman teman publicang kata 2000, Ilham terimakasih ter hingga Makash .banyak Semaga Allah mentabasegala amal baikmu (rehehe.) Dya jangan lupak kirim undangannya om! Alfon, semaga sukses ya...! plus teman teman administrasi yang lain, terimakasih dan mintamaaf atas khilafnya..
16. semudkawan/saudrayang tidak dapat disbulkasatu persatu Terimakasih..



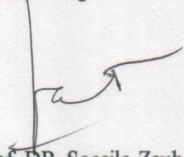
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Hasil Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif PPK Phase II
di Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

Disusun oleh : Zuli Astutik
NIM : 0001030121-31
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : Administrasi Pembangunan

Malang, Agustus 2007

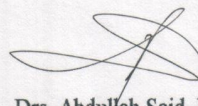
Pembimbing I



Prof. DR. Soesilo Zauhar, M.S.

NIP. 131704 333

Pembimbing II



Drs. Abdullah Said, M.Si

NIP. 131 475 901

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji sripsi, fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Jumat
 Tanggal : 3 Agustus 2007
 Jam : 09.00 WIB
 Skripsi atas nama : Zuli Astutik
 Judul : Evaluasi Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif PPK Phase II di Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

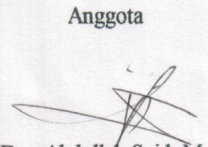
Dan dinyatakan Lulus.

MAJELIS PENGUJI

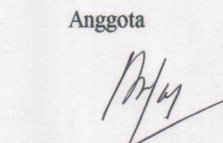
Ketua


Prof. DR. Soesilo Zauhar, MS.
 130 704 333

Anggota


Drs. Abdullah Said, M.Si
 131 475 901

Anggota


Drs. Bambang Santoso, MS.
 131 573 953

Anggota


Dra. Lely Indah Mindarti, MSi.
 132 300 918



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta dirposes sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Juli 2007



Zuli Astutik
0001030121-31



RINGKASAN

Zuli Astutik, 2007, **Evaluasi Hasil Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif PPK Phase II Di Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang**, Prof. DR. Soesilo Zauhar, MS., DRs. Abdullah Said, M.Si., 135 Hal +v.

Penelitian ini dilakukan atas dasar fakta di lapangan yang menunjukkan banyaknya program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, yang membuahkan hasil yang kurang memuaskan atau dengan kata lain mengalami kegagalan. Bantuan yang pada kenyataannya tidak sampai pada sasaran program, sosialisasi program yang kurang dapat dimengerti oleh masyarakat, kurangnya totalitas masyarakat dalam pelaksanaan program karena adanya monopoli pemerintah dalam pengelolaannya, hasil program yang tidak dapat dinikmati secara langggeng oleh masyarakat karena kurangnya penekanan pada fase pelestarian, bahkan penyalahgunaan dana bantuan untuk kepentingan pribadi. Beberapa hal tersebut tentunya menyebabkan kekecewaan tersendiri bagi masyarakat pra sejahtera khususnya, yang kemudian berpengaruh pada sikap masyarakat terhadap program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah selanjutnya. Untuk itu dibutuhkan adanya evaluasi terhadap program-program pengentasan kemiskinan yang akan maupun telah dilaksanakan.

Keberadaan kegiatan usaha usaha ekonomi rproduktif dalam PPK Phase II yang mengusung konsep pelestarian melalui metode klasik yaitu bantuan bergulir menjadi obyek penelitian dalam skripsi. Bagaimanakah hasil pelaksanaan kegiatan tersebut berikut kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil kegiatan tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Secara personal, pemanfaatan jasa bantuan bergulir oleh masyarakat pra sejahtera memberikan kontribusi yang cukup baik dalam peningkatan kesejahteraan hidup mereka. Akan tetapi belum banyak masyarakat desa terutama masyarakat pra sejahtera yang memanfaatkan dana bantuan tersebut. Disamping minimnya partisipasi masyarakat yang ada, yakni masih terbatas pada sebagian masyarakat pra sejahtera saja, kegiatan tersebut hanya mampu menciptakan sekelumit lapangan pekerjaan serta belum mampu mendorong pengembangan usaha yang lebih beragam.

Hasil yang kurang memuaskan tersebut sangat dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan lembaga dan aparatur pemerintahan desa yang meskipun mengalami peningkatan, akan tetapi belum memenuhi kebutuhan pengelolaan sistem yang digunakan. Oleh karenanya diperlukan pengembangan kualitas sumber daya manusia dari pihak aparatur pemerintahan dan lembaga masyarakat desa serta upaya-upaya kreatif untuk mendorong masyarakat agar hasil kegiatan bisa secara maksimal dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "EVALUASI DAMPAK KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENERIMA PPK PHASE II DI DESA MENDALANWANGI KECAMATAN WAGIR, KABUPATEN MALANG".

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Asministrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof.DR. Suhadak, MEC. selaku Dekan Fakultas Ilmu Asministrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu DR. Endang Siti Astuti, Msi. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak DR. Zainul Arifin, MS. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak DR. Khoirul Muluk, Msi. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak Prof. DR. Solichin AW, MA.PhD. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Bapak DR. Imam Hanafi, MS.Msi. selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
7. Bapak Prof.DR. Soesilo Zauhar, MS. selaku Pembimbing I.
8. Bapak Drs. Abdullah Said, Msi. selaku Pembimbing II.
9. serta pihak lain yang turut membantu terselesikannya skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 30 Agustus 2007

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
TANDA PENGESAHAN	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Paradigma Pembangunan	
A.1 Paradigma Pembangunan.....	13
A.2 Perencanaan Pembangunan.....	14
A.3 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan.....	19
B. Kesejahteraan.....	33
C. Program dan Proyek Pembangunan.....	34
C.1 Program Pembangunan.....	35
C.2 Proyek Pembangunan.....	36
D. Program Pengembangan Kecamatan	
D.1 Latar Belakang PPK.....	39
D.2 Azas dan Prinsip.....	40
D.3 Tujuan.....	41
D.4 Sasaran Kelompok dan Lokasi.....	41
D.5 Kriteria Desa.....	42
D.6 Pendekatan Bantuan.....	42
D.7 Prinsip Pengelolaan.....	43
D.8 Jenis Kegiatan.....	43
D.9 Pelaksana.....	44
D.10 Tahapan Pelaksanaan.....	45
D.11 Pendanaan.....	45
E. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif.....	45
F. Evaluasi.....	52
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	66
B. Fokus Penelitian.....	66
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	68

D. Jenis dan Sumber Data.....	68
E. Teknik Pengumpulan data.....	68
F. Instrumen Penelitian.....	70
G. Analisa Data.....	71

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data	
A.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	73
A.1.1Kondisi Gografis.....	73
A.1.2Kondisi Demografis.....	74
A.1.3Kondisi Pemerintahan.....	75
A.2 Hasil Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif PPK Phase II	
A.2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan dan Pelestarian Kegiatan.....	76
A.2.2 Lapangan Kerja Baru.....	83
A.2.3Pengembangan Usaha Masyarakat.....	85
A.3 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pasca Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif	
A.3.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa.....	88
A.3.1.1.Meningkatnya kemampuan lembaga dan aparat Desa untuk mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat desa.....	90
A.3.1.1.Penurunan Jumlah Penduduk Miskin.....	92
B. Analisa dan Interpretasi Data	
B.1 Hasil Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif PPK Phase II	
B.2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan dan Pelestarian Kegiatan.....	94
B.2.2 Lapangan Kerja Baru.....	100
B.2.3Pengembangan Usaha Masyarakat.....	103
B.2 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pasca Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif	
B.2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa.....	106
B.2.2.Meningkatnya kemampuan lembaga dan aparat Desa untuk mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat desa.....	110
B.2.3.Penurunan Jumlah Penduduk Miskin.....	113

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1	Kerangka Logis Evaluasi Dampak	61
2	Perbedaan Dasar Monitoring dan Evaluasi	64
3	Daftar Prioritas Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Desa Mendalanwangi	78
4	Wakil Desa Ke UDKP II	79



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL	HALAMAN
1	Peta Desa	119
2	Jumlah Penduduk dan Jumlah Keluarga Desa Mendalanwangi tahun 2001	121
3	Jumlah Penduduk dan Jumlah Keluarga Dersa Mendalanwangi tahun 2005	122
4	Jumlah Keluarga Prasejahtera Desa Mendalanwangi tahun 2001	123
5	Jumlah Keluarga Prasejahtera Desa Mendalanwangi tahun 2005	124
6	Banyaknya Penduduk Desa Mndalanwangi yang Menganggur tahun 2001	125
7	Banyaknya Penduduk Desa Mndalanwangi yang Menganggur tahun 2005	126
8	Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Mendalanwangi tahun 2005	127
	Struktur LPMD Mendalanwangi tahun 2005	128
	Struktur BPD Mendalanwangi tahun 2005	129
9	Surat Keputusan Bersama KSP Sari Bumi	130
10	Alokasi SHU KSP Sari Bumi Mei 2005	131
12	Curriculum Vitae	132

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Satu diantara beberapa tantangan pembangunan sebuah negara adalah masalah kemiskinan. Persoalan kemiskinan bukanlah suatu hal yang baru, ia merupakan masalah klasik yang hingga detik ini masih tetap eksis dalam daftar tantangan pembangunan seluruh negara di muka bumi ini, baik negara berkembang maupun negara-negara maju. Bagi negara berkembang, kemiskinan merupakan ancaman yang sangat serius dalam proses pencapaian tujuan pembangunan. Secara umum, masyarakat miskin relatif lebih sulit untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan atau "lingkaran setan", yaitu beberapa faktor penyebab kemiskinan yang saling terhubung dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelesaiannya. Lingkaran setan tersebut terdiri dari kelemahan jasmani, isolasi, kerentanan dan ketidak berdayaan. Hal ini tidak lepas dari tingkat pendidikan, sikap mental dan budaya dari masyarakat yang bersangkutan. Dimana faktor tersebut pada negara maju lebih kondusif untuk penyelenggaraan upaya pengentasan kemiskinan dibanding dengan negara berkembang.

Salah satu negara berkembang tersebut adalah Indonesia. Data statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia sangat berfluktuasi. Pada akhir tahun 1990 jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 27,2 juta jiwa, atau 15,1 % dari jumlah penduduk keseluruhan. Meski jauh lebih kecil dibandingkan dengan keadaan pada dua dasa warsa sebelumnya, dimana terdapat sekitar 70 juta jiwa, atau sekitar 60 % dari jumlah penduduk secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin ini masih dianggap cukup besar. Ditambah lagi krisis ekonomi yang terjadi mulai tahun 1997 mengakibatkan peningkatan jumlah orang miskin secara drastis menjadi 79,4 juta jiwa (Gunawan: 1999).

Kondisi kemiskinan yang demikian memberikan ekses negatif yang cukup signifikan terhadap pembangunan dan integrasi sosial bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemiskinan ditandai oleh lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya produktifitas,

terbatasnya modal yang dimiliki, lemah dalam kemampuan berusaha dan sangat terbatasnya akses kepada kegiatan ekonomi (Sumodiningrat, 1997). Keterbatasan tersebut mengindikasikan belum terpenuhinya kriteria masyarakat yang makmur dan sejahtera baik secara ekonomi maupun sosial yang menjadi tujuan akhir dari pembangunan.

Kemiskinan juga identik dengan kesenjangan sosial. Salah satu penyebab dari kemiskinan adalah kurangnya pemerataan pembagian hasil pembangunan. Kue pembangunan yang sedianya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, hanya bisa dinikmati oleh sebagian kalangan saja. Sebagian masyarakat lain yang tidak mampu menikmatinya menjadi kelompok yang terdiskreditkan menjadi kelompok marginal yaitu masyarakat miskin. Kondisi ini berimplikasi pada renggangnya hubungan antar golongan masyarakat tersebut.

Kecemburuan atas perlakuan yang tidak adil ini jika dibiarkan berlarut tanpa *treatment* yang efektif, akan melahirkan tindak kekerasan atau kriminalitas yang sangat berpeluang menyebabkan disintegrasi sosial. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi parameter yang penting untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan. Apabila, kemakmuran masyarakat telah berhasil tumbuh secara merata, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan telah berhasil. Dan sebaliknya, jika kemiskinan masih terus-menerus dirasakan oleh sebagian penduduk maka, akan sangat sulit untuk mengatakan pembangunan telah benar-benar berhasil. Dengan demikian diakui atau tidak pembangunan yang sedang bangsa Indonesia lakukan sampai dengan saat ini masih belum berhasil.

Sementara itu wacana mengenai kemiskinan semakin berkembang. Terutama semenjak tahun 2000 hingga saat ini, wacana mengenai kemiskinan juga mencakup bidang yang semakin luas dan dalam baik dari segi fokus perhatian, konsep maupun kerangka kerja. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dengan cara membandingkan dua laporan tahunan Bank Dunia, World Development Report, tahun 1990 dan tahun 2000, yaitu dua laporan yang sama-sama memfokuskan pada kemiskinan pada bahasannya. Dalam laporan tahun 1990 yang ditekankan adalah strategi-strategi pertumbuhan berbasis padat karya, investasi sektor sosial dan bantuan langsung (*transfer nets*) bagi kelompok masyarakat yang tersingkirkan (*the excluded*). Sedangkan pada laporan tahun

2000 masih mengakui pentingnya strategi-strategi tersebut, akan tetapi memperluasnya dengan menggunakan istilah-istilah generik seperti kesempatan (*opportunity*), pemberdayaan (*empowrment*) dan keamanan (*security*). Sekalipun tampak sederhana, perubahan tersebut sebenarnya bersifat penting, karena memiliki implikasi terhadap pengembangan strategi penanggulangan kemiskinan secara lebih efektif dan efisien. Shaffer (2001) melihat perubahan tersebut berkaitan dengan perluasan konsep, perluasan kerangka kerja, penyebab dan pendalaman kerja penyebab. Adapun maksud dari masing-masing item tersebut adalah sebagai berikut:

1. perluasan konsep (*broadening the concept*).

Secara konvensional, kemiskinan hanya dilihat sebagai deprivasi (ketercabutan) fisiologis dengan dua pendekatannya. Dua pendekatan yang populer tersebut adalah pendekatan pendapatan konsumsi dan pendekatan kebutuhan dasar. Adapun cakupan dari perluasan konsep yang dimaksud adalah dua deprivasi lainnya yaitu deprivasi sosial dan hak asasi manusia. Deprivasi sosial antara lain dielaborasi melalui pendekatan kemiskinan manusia (*human poverty approach*) sebagaimana dikembangkan The United Nations Development Programme (1997).

2. Perluasan model kerangka kerja (*Broadening The Causal Framework*).

Dalam wacana baru, model kerangka kerja penyebab kemiskinan juga diperluas. Selama ini kerangka kerja penyebab kemiskinan difokuskan pada sumber daya ekonomi yang secara luas terkait dengan berbagai faktor produksi, aset ekonomi, dan kredit. Kini kerangka kerja itu diperluas dengan mencakup sumber daya non ekonomi yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik dan modal budaya.

3. Pendalaman kerangka kerja penyebab (*Deepening The Causal Framework*).

Kemiskinan selama ini cenderung dilihat hanya sebagai stok kemiskinan (*stock of poverty*). Namun kini fokus analitis beralih ke stok flow atau perpindahan keluar-masuknya kemiskinan. Karena dengan memfokuskan diri hanya pada sisi stok, maka hampir semua analisis kemiskinan jarang sekali membedakan secara eksplisit antara kemiskinan kronik (*chronik proverty*)

dengan kemiskinan sementara (*transient poverty*). Padahal dari segi kebijakan adalah penting untuk memahami secara jelas masalah kemiskinan yang dihadapi: apakah penduduk miskin itu berasal dari keluarga miskin sepanjang waktu (kronik), atau berasal dari perpindahan besar dari keluarga yang sebelumnya tidak miskin (*transient*). Kebijakan untuk mengatasi dua jenis kemiskinan itu dapat sangat berbeda dalam strategi penanggulangannya (Shaffer, 2001).

Uraian tersebut menegaskan kembali sifat dari kompleksitas dan matra ganda kemiskinan, dimana sifat tersebut menghendaki agar upaya untuk mengatasinya dilakukan secara terpadu dan multi sektor serta dirumuskan sebagai arus utama (*mainstream*) dari kebijakan pembangunan secara keseluruhan. Strategi kebijakan melalui bantuan langsung kepada obyek sasaran (*transfer nets*), sekalipun dianggap sebagai salah satu strategi sebagaimana yang diungkapkan dalam laporan Bank Dunia tahun 2000, jelas tidak memadai. Strategi tersebut hanya sesuai untuk jangka waktu yang pendek (*short term*) atau sementara saja. tidak bersifat edukatif dan rawan terhadap salah sasaran atau kebocoran (*leakage*). Strategi-strategi lain yang bersifat tidak langsung seperti pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat karya dan investasi sektor sosial secara logis lebih bisa diharapkan akan memiliki daya jangkauan yang lebih baik, yaitu lebih alamiah dan lebih permanen (BPS Jakarta, 2005).

Namun demikian strategi kebijakan yang pertama yaitu yang menggunakan bantuan langsung sebagai sarannya masih mewarnai upaya-upaya pemerintah dalam mengentaskan masyarakat miskin dari perangkap kemiskinan yang melingkarinya melalui berbagai program pengentasan kemiskinan baik berupa bantuan fisik maupun non fisik. Program-program tersebut adalah: Program Inpres Desa Tertinggal (IDT); Program Pengembangan Kecamatan (PPK); Program Kredit Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dalam rangka Pengentasan Kemiskinan (KP-TTG- Taskin); Program Usaha Ekonomi Desa. Simpan Pinjam (UED-SP); Program Kredit Usaha Tani (KUT); Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS); Program Operasi Pasar Khusus Beras (OPK-Beras); Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE); Proyek Peningkatan Prasarana Desa. Tertinggal (P3DT);

Program Beasiswa dan Dana Biaya Operasional Pendidikan Dasar dan Menengah (JPS-Bidang Pendidikan); Program JPS-Bidang Kesehatan; Program Padat Karya Perkotaan (PKP); Program Prakarsa, Khusus Penganggur Perempuan (PKPP); Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Prasarana Subsidi Bahan Bakar Minyak (PPM-Prasarana Subsidi BBM); Program Dana Bergulir Subsidi Bahan Bakar Minyak untuk Usaha Kecil dan Menengah; dan Program Dana Tunai Subsidi Bahan Bakar Minyak.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan beberapa program diantaranya masih mengandung kekurangan yang memerlukan perbaikan. misalnya saja dalam implementasi program IDT sebagai salah satu bantuan non fisik dalam bentuk dana bergulir. Baik secara teoritis atau konseptual maupun teknis di lapangan memiliki banyak sekali kelemahan. Dari evaluasi yang telah dilaksanakan ditemukan beberapa kelemahan, diantaranya pembentukan KSM (Kelompok swadaya masyarakat) lebih dimonopoli oleh aparat pemerintah melalui sistem penunjukan. Akibatnya selain banyak anggota yang tidak tahu kalau ia adalah anggota KSM, pengambilan keputusan lebih banyak diambil secara sepihak oleh aparat. Di sisi lain pembentukan KSM yang sesuai prosedur yaitu diambil dari organisasi tradisional yang telah ada ternyata terbentur pada masalah kurangnya dukungan kelembagaan yang cukup memadai di sebagian besar desa tertinggal. Hal ini mengindikasikan lemahnya pengalaman masyarakat dalam berorganisasi sehingga menghambat pengembangan usaha bersama melalui kelompok.

Selain itu di lapangan ditemukan juga bahwa pemilihan usaha produktif dalam kegiatan pengelolaan dana bergulir yang dilakukan oleh KSM tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan. KSM tidak membentuk satu unit usaha produktif yang dikelola bersama bagi kemajuan bersama. Sebaliknya hampir setiap orang memiliki usahanya sendiri-sendiri sehingga dalam suatu KSM terdapat beberapa jenis usaha produktif. Kenyataan ini akan menyulitkan di dalam usaha melihat efektivitas penggunaan dana karena hasil usaha menjadi milik setiap rumah tangga, bukan milik kolektif yang hasilnya dinikmati bersama. Hal ini juga berarti bahwa tujuan akhir yaitu pencapaian kesejahteraan secara ekonomi dan sosial penduduk sulit dicapai (Simatupang, 1990).

Contoh pelaksanaan program lain yang memiliki kelemahan adalah P3DT. Dalam pelaksanaannya banyak dana yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Begitu pula dengan pembangunan fisik yang juga tidak berumur panjang. Di desa Bakapas MCK yang dibangun melalui proyek P3DT 1999/2000 sebagian besar tidak bisa difungsikan masyarakat. Belum lama dipergunakan oleh masyarakat, SPT yang baru saja dibangun tersebut sudah banyak yang rusak dan airnya tidak bisa keluar. Sedangkan MCK buntu dan kolam penampungan air banyak yang bocor. Diduga, rusaknya sejumlah SPT yang hasil pembangunan dari proyek P3DT tersebut, karena mempergunakan barang bekas dan kualitas nomor dua, kemudian dicat agar kelihatan baru. Sedangkan air yang tidak bisa keluar, disebabkan pipa yang ditanam tidak sampai ke sumber air. Selain proyek SPT dan MCK yang terkesan asal-asalan, pelaksanaan proyek P3DT di Bakapas, justru mengakibatkan jalan sepanjang satu kilometer yang dibangun atas swadaya warga dengan ABRI masuk desa (AMD) menjadi rusak (www.google.com).

Berangkat dari kondisi tersebut pemerintah memandang perlu untuk mengadakan program pengentasan kemiskinan yang merupakan perbaikan terhadap hasil yang telah ditinggalkan oleh program-program di atas. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya PPK (Program Pengembangan Kecamatan). Program ini meningkatkan keterpaduan pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana fisik pedesaan dengan cakupan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan (Tim Koordinasi PPK Tingkat Pusat, 1998).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pengembangan Kecamatan secara garis besar adalah kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik yang dimaksud adalah berupa pembangunan prasarana fisik desa, sedangkan kegiatan non fisik adalah kegiatan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas masyarakat, kegiatan ekonomi atau perluasan kesempatan dan peluang usaha. Kegiatan perluasan kesempatan dan peluang usaha terdiri dari 2 kegiatan, yaitu Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dan Kegiatan Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan. Keduanya bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian di pedesaan untuk mengembangkan usaha-usaha yang sifatnya produktif atau usaha yang diperkirakan dapat membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga

masyarakat miskin itu sendiri. Kelompok masyarakat ini berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi dan sosial yang produktif bagi anggotanya, melalui pemupukan modal dan tabungan yang diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi semua anggota kelompok masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam kegiatan ekonomi dana dikucurkan pada kelompok yang memenangkan kompetisi proposal pengajuan usaha berdasarkan kriteria dalam ketentuan dasar yang telah ditetapkan untuk memudahkan pengelolaan dana pinjaman bergulir. Proposal tersebut diperiksa oleh tim verifikasi yang juga berasal dari masyarakat sendiri. Bantuan dana yang diberikan sebagaimana namanya yaitu "dana bergulir", merupakan dana pinjaman yang harus dikembalikan dengan cara mengangsur. Pengembalian dana tersebut harus disertai jasa pinjaman yang telah ditentukan dalam aturan main PPK (PTO/Petunjuk Teknis Operasional). Dana bergulir dari kegiatan ekonomi ini selain digunakan untuk pengembangan usaha ekonomi itu sendiri juga dapat digunakan untuk biaya operasional atau kegiatan PPK yang lain. Penggunaan dana bergulir tersebut, diputuskan secara mufakat melalui MAD (Musyawarah Antar Desa). Melalui MAD inilah masyarakat melakukan koordinasi dengan pelaku/pelaksana PPK yang lain dari sejak tahap perencanaan pengelolaan hingga pertanggung jawaban. Dengan demikian pengelolaan dana dari pencairan dana hingga perputarannya, lebih banyak atau lebih menitik beratkan peran masyarakat, sedangkan pemerintah hanya mengambil peran sebagai pendamping atau konsultan dan pengontrol saja.

Sampai dengan saat ini Program Pengembangan Kecamatan telah diselenggarakan dalam 2 phase. Berbeda dengan kegiatan pengembangan usaha ekonomi pada PPK Phase I yang sempat dijuluki sebagai program pusing kepala salah satunya karena besarnya jumlah nominal tunggakan angsuran modal, pada PPK Phase II nampak tidak ada masalah. Di satu sisi hasil tersebut cukup menggembirakan. Namun yang lebih penting dari itu adalah seberapa besar program dengan model sistem seperti ini efektif dan efisien untuk menyelesaikan atau paling tidak mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di desa-desa di tingkat kecamatan. Bagaimana dampak dari implementasi Program Pengembangan Kecamatan ini, adakah dampak negatif yang ditimbulkannya.

Apapun dampak dari program ini, positif apalagi negatif perlu dideteksi sejak dini sebagai tindakan antisipatif terhadap segala kemungkinan yang ada.

Perlu pula diingat bahwa PPK merupakan program yang *everlasting*, tahap pelaksanaan dan pembiayaan program, boleh saja telah berakhir tetapi tahap pelestarian merupakan tahapan terpanjang dan tak berujung dalam program ini yang menuntut perbaikan setiap saat untuk mencapai hasil yang optimal. Formula yang tepat akan bisa diramu dengan mengetahui nilai positif maupun negatif sebagai kekurangan yang ada dalam program itu sendiri. Kedua, hal ini akan dapat diketahui dengan melakukan evaluasi secara obyektif dan transparan secara intensif guna menghasilkan data yang valid sehingga dapat memberikan masukan yang sangat berguna dalam mengambil tindakan untuk merumuskan perlakuan bagi setiap masalah-masalah yang akan muncul. Melalui evaluasi dapat pula dapat diputuskan apakah program lebih baik diteruskan dengan atau tanpa perbaikan atau bahkan dihentikan, sehingga sangat bermanfaat dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam upaya penyelesaian masalah yang timbul.

Oleh karena itu keberadaan evaluasi hasil pada tahap pelestarian bagi PPK sebagai program yang berkesinambungan (*sustainability program*) utamanya dalam pengembangan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif agar secara nyata memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin mutlak diperlukan. Evaluasi hasil tersebut sangatlah penting untuk disegerakan, mengingat PPK Phase II ini yang dimulai pada tahun 2001 dan baru berakhir tahun 2004 kemarin sesuai dengan masa berlaku setiap satu phase yaitu 3 tahun. Pendeteksian dampak melalui evaluasi hasil sejak dini sangat berguna untuk meminimalisir kehilangan data baik dalam bentuk dokumen terlebih yang bersifat opini dari masyarakat sebagai pelaku PPK itu sendiri sehingga data yang didapat lebih lengkap dan akurat.

PPK Phase II ini telah diselenggarakan di wilayah kecamatan-kecamatan yang sudah terseleksi di seluruh Indonesia secara serentak, termasuk di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Salah satu desa yang mendapat dana bantuan dari PPK baik pada phase I maupun phase II ialah Desa Mendalanwangi. Desa ini yang kenuhian mengantar Kecamatan Wagir mendapat *reward* dari pusat sebagai pelaksana PPK terbaik. Pasca tahap pelaksanaan, tentunya program

ini menimbulkan konsekuensi (hasil, efek/akibat), Dan membagi konsekuensi tersebut menjadi dua yaitu output dan dampak. Output adalah barang, jasa/fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang tidak disentuh oleh program. Sedangkan dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun social sebagai akibat dari output program.

Sekalipun program dirancang sedemikian rupa, untuk mencapai tujuannya namun seringkali di dalam proses implementasi banyak faktor yang mempengaruhi yang menyebabkan terganggunya proses implementasi sehingga hasil program yang diharapkan tidak muncul atau belum tercapai sesuai rencana. Mengingat urgensi masalah hasil tersebut, maka perlu adanya proses lebih lanjut untuk mengevaluasi hasil dari program yang telah dilaksanakan, sehingga bisa diketahui sampai seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan tersebut telah tercapai dan seberapa tepat, sasaran program tersebut dapat merasakan manfaatnya. Selain itu dengan adanya evaluasi hasil akan dapat difungsikan sebagai umpan balik dan masukan dalam pelaksanaan pelestarian program maupun penyelenggaraan program serupa di masa yang akan datang. Sehingga, ke depan program dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Sebab rencana yang baik bermula dari hasil evaluasi yang baik pula yakni tepat dan akurat.

Berkaitan dengan penyelenggaraan PPK yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, yang kemudian dilengkapi dengan *reward* bagi pelaksana terbaik yang diraih masyarakat Mendalanwangi, yang berarti secara logis pengkondisian di desa tersebut telah sesuai prosedur yang juga berarti kondisi yang dihasilkan lebih dekat dengan tujuan yang telah direncanakan. Namun demikian, sangat penting untuk diketahui apakah hasil dari pelaksanaan yang ada di lapangan telah sejalan dengan prediksi di atas kertas, atau menimbulkan hasil yang tidak diharapkan melihat banyaknya faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tersebut sehingga membuka peluang adanya hal-hal yang *unpredictable*.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas penulis merasa perlu untuk meneliti serta mengkaji masalah tersebut dengan judul "**Evaluasi Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif PPK PPK Phase II di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang**".

B. RUMUSAN MASALAH

Masalah kemiskinan yang bersifat kompleks atau multidimensional menuntut totalitas perhatian untuk menyelesaikan masalah ini hingga ke akarnya. Persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara instan. Penyelesaian dengan cara tersebut hanya mampu menjawab cabang-cabang persoalan dari masalah utama. Sehingga kemiskinan tetap menjadi masalah yang tidak kunjung usai karena solusi yang diambil tidak mampu mencabut akar permasalahan itu sendiri.

Kenyataan ini berimplikasi pada peningkatan efektifitas dan efisiensi setiap kebijakan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal tersebut merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar, karena meninggalkan pilihan ini berarti tidak ada percepatan laju pengentasan kemiskinan. Padahal teknologi semakin maju, standar kesejahteraan manusia makin meningkat. Hal ini sama dengan membiarkan masyarakat miskin tetap berada dalam lingkaran "setan" kemiskinan. Untuk itu perbaikan atas program pengentasan kemiskinan yang ada sangatlah diperlukan terutama untuk menentukan langkah berikutnya dalam penyelesaian masalah yang sangat pelik ini.

PPK sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan di tingkat kecamatan telah melampaui Phase II. Salah satu bentuk bantuan non fisiknya adalah kegiatan ekonomi yang merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan dana bergulir. Pada masa pasca tahap pelaksanaan ini, penulis mencoba untuk meneliti bagaimanakah hasil kegiatan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Secara detail pertanyaan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hasil pelaksanaan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif PPK Phase II di Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang?
2. Bagaimanakah tingkat kesejahteraan masyarakat penerima PPK Phase II di Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang pasca penyelenggaraan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan hasil pelaksanaan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif PPK Phase II di Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.
2. Untuk menjelaskan tingkat kesejahteraan masyarakat penerima PPK Phase II di Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang pasca penyelenggaraan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif?

D. MANFAAT PENELITIAN

Sedangkan manfaat penelitian yang ingin diperoleh adalah:

1. *Manfaat Teoritis:*
 - 1 a. Memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Ilmu Administrasi Negara.
 - 2 b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang terhadap penyempurnaan kegiatan ekonomi pada PPK yang akan datang.
2. *Manfaat Empiris*
 - a. Menjadi pendorong guna meningkatkan kepekaan dalam menyikapi program-program pemerintah sekaligus sebagai wahana, dalam menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh.
 - b. Sebagai bahan dokumentasi bagi penelitian selanjutnya.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima (5) bab yang isinya dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. yang dipakai.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan atau temuan-temuan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang

dilakukan. Teori-teori tersebut menjadi landasan penulisan skripsi ini lebih lanjut.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang dipakai oleh penulis untuk melakukan analisa permasalahan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini secara garis besar memuat tentang penyajian data, analisis data dan interpretasi data dengan mengacu pada landasan teori pada bab sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang ada.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi ini berisikan kesimpulan dan saran yang diambil sehubungan dengan analisis terhadap masalah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PEMBANGUNAN

Pembangunan merupakan sebuah tahapan yang dialami oleh seluruh negara untuk mencapai sebuah kondisi ideal yang diidamkan, yaitu terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Seiring dengan tingkat perkembangan manusianya, pembangunan pun mengalami perubahan dalam penyelenggaraannya. Tingkat peradaban yang banyak ditentukan oleh kreativitas batin dan akal dalam mengembangkan teknologi serta merespon kebutuhan psikologis yang nampak pada kebutuhan sosial, berimplikasi pada tingkat kebutuhan manusia yang berujung pada peningkatan standar kesejahteraan sebuah komunitas (masyarakat) itu sendiri.

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi bangsa guna meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih mendalam para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai arti dari pembangunan. Seperti yang diungkapkan Suryono(2001:38) dalam buku "Teori dan Isu Pembangunan", bahwa

"pembangunan adalah suatu upaya yang terus-menerus dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi dan peranannya secara wajar yaitu sebagai obyek dan subyek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya, sehingga ke luar dapat berhubungan secara serasi, selaras dan dinamis. Sedangkan ke dalam mampu menciptakan keseimbangan".

Kemudian Tjokroaminoto (1987:44) menyimpulkan beberapa makna pembangunan dalam beberapa *point* sebagai berikut:

1. pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ke tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
2. pembangunan merupakan upaya manusia yang dilakukan secara sadar, terencana dan melembaga.
3. pembangunan merupakan proses sosial yang bebas nilai (*value free*).

4. pembangunan memperoleh sifat konsep transedental sebagai *imetadisciplinaty phenomenon*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi (*The Ideology of Developmentalism*)
5. pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat.
6. pembangunan menjadi *culture specific, situation specific* dan *time specific*.

Pada umumnya konsep pembangunan dianalogkan dengan konsep pertumbuhan ekonomi, modernisasi, rekonstruksi, westernisasi, perubahan sosial, pembebasan, dan hal-hal serupa lainnya. Sedangkan konsep yang paling menonjol dari konsep-konsep yang ada tersebut adalah konsep pertumbuhan ekonomi. Dalam buku *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke Tiga* oleh Agus Suryono, Todano mengemukakan beberapa faktor dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. akumulasi modal termasuk semua investasi bariu dalam bentuk tanah, peralatan, fisik dan Sumber Daya Manusia.
2. perkembangan penduduk dalam arti peningkatan tenaga kerja, baik kualitas maupun kuantitasnya.
3. kemajuan teknologi yaitu hasil yang berupa cara baru yang dihasilkan dari perbaikan pada pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Namun demikian, pertumbuhan semata tidak banyak menyelesaikan persoalan dan bahkan kadang-kadang mempunyai akibat yang tidak menguntungkan. Selain itu pembangunan juga tidak selalu dapat disamaratakan dengan modernisasi, sebab ada banyak segi pada tradisi yang meningkatkan potensi manusia dan merapat serta mempertautkan kultur (Kuntjara Jakti, 1987:3).

Dengan melihat uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan keadaan dari semula ke arah tatanan kehidupan manusia yang lebih baik, secara sadar, terencana dan melembaga dalam seluruh aspek hidup dan kehidupannya.

A.1 PARADIGMA PEMBANGUNAN

Dalam perjalanannya, pembangunan mengalami beberapa pergeseran pola atau model atau paradigma pembangunan sebagaimana berikut:

1. *Growth paradigm (Paradigma Pertumbuhan)*

Pelaksanaan pembangunan di negara berkembang dititikberatkan pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan nasional. Penerapan paradigma pertumbuhan dalam pelaksanaan pembangunan berorientasi pada, pertumbuhan ekonomi. PBB mencanangkan dasawarsa pembangunan pertama berlangsung pada tahun 1960 - 1970 dengan strategi pertumbuhan ekonomi negara berkembang sebesar 5% per tahun. Pada periode ini ternyata masalah distribusi pendapatan diabaikan, sehingga timbul masalah kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pembagian pendapatan, urbanisasi dan kerusakan lingkungan. Di satu sisi, paradigma pertumbuhan memberi motivasi yang sangat baik dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat yang secara otomatis meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional melesat tajam. Namun di sisi lain peningkatan kesejahteraan serta pemeliharaan sumber daya yang ada justru merosot tajam. Karena paradigma pertumbuhan tersebut tidak sama sekali memperdulikan pemerataan distribusi pendapatan sehingga peningkatan pendapatan hanya bisa dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. oleh karenanya, paradigma tersebut alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan justru menambah angka kemiskinan dan pengangguran. Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dengan orientasi pengolahan alam hanya pada peningkatan hasil atau produk membuat alam semakin merana. Sumber daya alam yang ada secara terus-menerus diambil hasilnya, sementara upaya peremajaan kembali sumber daya yang ada, seperti reboisasi misalnya maupun penggunaan sumber daya secara bijak dengan menggunakan sumber daya substistusi, tidak diupayakan. Melihat kenyataan ini terjadilah pergeseran dari pertumbuhan ekonomi menjadi strategi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang selanjutnya melahirkan pemikiran paradigma baru dalam pembangunan yaitu paradigma kesejahteraan (*Welfare Paradigm*).

2. *Welfare Paradigm (Paradigma Kesejahteraan)*

Berlatarbelakangkan hasil penerapan paradigma pertumbuhan yang ternyata tidak mampu mensejahterakan masyarakat secara merata, maka pada periode dasawarsa pembangunan kedua (1971-1980) pelaksanaan pembangunan berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan (*Growth and Equity of Strategy Development*). Disini paradigma yang dipakai diarahkan pada industrialisasi dengan strategi pertumbuhan yang ditetapkan sebesar 6 % per tahun. Adapun tujuan dari pemerataan pembangunan yang dimaksud dilakukan di seluruh bidang, diantaranya di bidang pendapatan, kesehatan, keadilan, pendidikan, kewirausahaan, keamanan, kesejahteraan sosial termasuk pelestarian dan penyelamatan lingkungan dari kerusakan. Namun demikian penerapan paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam dasawarsa tersebut belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Di satu sisi pembangunan yang dilakukan telah diupayakan semaksimal mungkin untuk membuat pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan berjalan seiring-sejalan, akan tetapi masih ada sisi negatif yang timbul dalam penerapan paradigma pembangunan ini. Di lapangan ditemukan data yang mengungkapkan bahwa ternyata paradigma pertumbuhan dan pemerataan ini juga belum mampu merubah ketergantungan negara berkembang kepada negara maju. Hal tersebut diindikasikan dengan adanya ketergantungan investasi, bantuan dan pinjaman luar negeri. Pelaksanaan pembangunan dalam paradigma tersebut cenderung bersifat sentralistik atau *top down*, sehingga menimbulkan hubungan ketergantungan antara rakyat dan program-program pembangunan. Karena hampir setiap tahap dalam program tersebut didominasi oleh pemerintah. Ketergantungan masyarakat pada pemerintah pada setiap tahapan program mengakibatkan dampak negatif terhadap keberlanjutan program pembangunan itu sendiri. Sehingga meskipun program-program yang dicanangkan termasuk kategori program berkelanjutan tidak berumur panjang. Hal ini disebabkan tidak adanya

dukungan terhadap pembangunan yang berbasis kemandirian masyarakat berikut peningkatan potensi agar mampu menjalankan program-program yang diselenggarakan secara swadaya. Pembangunan yang dilakukan akhirnya bersifat *disempowering* atau tidak mampu memberdayakan masyarakat atau dengan kata lain masyarakat hanya mampu memberikan perannya sebatas sebagai obyek pembangunan dan tidak mampu berperan sebagai subyek pembangunan. Kondisi tersebut mendorong terjadinya pergeseran strategi pembangunan menjadi pembangunan yang menggunakan strategi yang mendukung serta menjamin keberlanjutan pembangunan yaitu pembangunan berkelanjutan.

3. *Sustainable Development Paradigm* (Paradigma Pembangunan Berkelanjutan).

Strategi pembangunan berkelanjutan ini diilhami oleh konsep tata ekonomi dunia baru sebagai upaya perbaikan kondisi sosial-ekonomi negara berkembang. Pada paradigma ini strategi pertumbuhan ekonomi yang digunakan dinaikkan menjadi sebesar 7% per tahun. Pada dasawarsa ini pusat perhatian proses pembangunan lebih diarahkan pada masalah yang berkaitan dengan peningkatan penduduk yang semakin pesat, urbanisasi, kemiskinan, kebodohan, minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, masalah-masalah organisasi sosial-politik, kerusakan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul pada masyarakat pedesaan. Dalam periode ini pembangunan juga masih dihadapkan pada masalah pelaksanaan pembangunan yang tidak berdimensi pada manusia. Dalam artian, pembangunan yang dilakukan belum bisa mengakomodir kebutuhan manusia secara seutuhnya, sehingga menimbulkan masalah ketidakadilan dan ketidakpaduan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan belum mampu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dari dimensi sosial kehidupan masyarakat. Meskipun pada sisi lain, pembangunan yang dilakukan telah dikondisikan agar mampu mendukung pembangunan aspek kemandirian masyarakat dalam menjalankan program-program yang ada.

4. *People Centerd Development Paradigm* (Paradigma Pembangunan yang Berpusat pada Manusia).

Belajar dari pengalaman pada periode-periode yang diterapkan pada dasawarsa sebelumnya, terutama dari hasil pembangunan di negara-negara berkembang, dimana pembangunan diupayakan sebagai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan didukung dengan pembangunan manusia (*human development*). Maka paradigma pembangunan yang digunakan pada dasawarsa ini merupakan perpaduan kedua konsep tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada pelayanan sosial melalui pemenuhan kebutuhan pokok berupa pelayanan sosial di sektor kesehatan, perbaikan gizi, sanitasi, pendidikan, pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Disamping pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan paradigma ini, juga diarahkan pada upaya untuk mewujudkan keadilan pemerataan dan peningkatan budaya, perdamaian serta pembangunan yang berpusat pada manusia (*people center development*) dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (*public empowerment*). Pembangunan yang dilakukan diharapkan untuk dapat meningkatkan perkembangan kemandirian masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas. Pembangunan yang dilakukan melalui paradigma ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas manusia (*human growth*), kesejahteraan masyarakat (*well being*), keadilan (*equality*), dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*). Dominasi pemikiran paradigma ini menurut Korten adalah keseimbangan ekologi manusia (*balance human ecology*), sumber penggunaannya adalah informasi dan prakarsa yang kreatif dengan tujuan utama adalah aktualisasi optimal dari potensi manusia yang telah dianugerahkan oleh Tuhan (Tjokrowinoto, 1995:218).

Adapun pembangunan yang diselenggarakan di Indonesia saat ini diupayakan sedekat mungkin dengan nilai yang terkandung dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. Wujud peningkatan kualitas masyarakat yang paling menonjol adalah melalui konsep pembedayaan yang

kemudian diikuti oleh maraknya isu untuk mengembangkan program peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Contoh konkret yang bisa kita lihat sekarang ini adalah desentralisasi atau yang lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah. Penentuan kebijakan yang dulunya lebih didominasi oleh pemerintah pusat (*top down*) kini bisa diputuskan secara lebih representatif bagi masyarakat di daerah (*bottom up*). Hal tersebut berarti memperluas peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Penerapan desentralisasi ini berimplikasi pada pembinaan untuk sumber daya manusia di daerah, agar perjalanan pemerintahan antara daerah dan pusat bisa, adil dan selaras.

Pembangunan yang berpusat pada manusia ini merupakan pilihan yang diambil pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan pembangunan yang semakin kompleks. Kekecewaan rakyat atas minimnya kesejahteraan yang sangat didambakan menuntut perubahan dan'. peran pasif menjadi aktif Teknologi yang semakin menghilangkan perbedaan jarak dan waktu juga berperan dalam membuka mata rakyat tentang bagaimana seharusnya porsi peran rakyat dan pemerintah. Disamping itu persaingan dunia internasional menuntut kehadiran manusia-manusia yang berkualitas yang akan sangat sulit untuk direalisasikan dengan paradigma pembangunan yang lama.

Hal lain yang juga menjadi tantangan pembangunan adalah aspek politis, namun demikian ketiga hal di atas merupakan perubahan alami yang cukup kuat pengaruhnya dalam penerapan paradigma ini di Indonesia.

A.2 Perencanaan Pembangunan

Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan relnya sehingga mampu mencapai tujuan sebagaimana yang telah dicita-citakan dan disepakati bersama secara efektif dan efisien, maka diperlukan *starting point* yang tepat untuk mengawalinya. Yang akan menentukan bagaimana tujuan pembangunan diderivasikan dalam item yang lebih kecil dan mbumi sehingga bisa secara jelas difahami dan teraktualisasi. Oleh karena itu pada tahap awal ini diputuskan bagaimana pembangunan akan dijalankan. Tahap awal yang dimaksud adalah perencanaan pembangunan.

1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan sering kita dengar sebagai salah satu prinsip manajemen, yaitu "*Planning*", artinya penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan (Manullang, 1992:47). Dalam buku yang sama, Manullang menjelaskan bahwa unsur-unsur perencanaan adalah :

- a. Penjelasan dan perincian kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan, faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut agar apa yang menjadi tujuan dapat dihasilkan.
- b. Penjelasan mengapa kegiatan-kegiatan itu harus dikerjakan dan mengapa tujuan yang tertentu itu harus dicapai.
- c. Penjelasan tentang lokasi fisik dimana setiap kegiatan harus dikerjakan sehingga dengan demikian tersedia segala fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan itu.
- d. Penjelasan mengenai waktu-waktu dimulainya pekerjaan dan diselesaikannya pekerjaan baik untuk tiap-tiap bagian pekerjaan maupun untuk seluruh pekerjaan. Disini pula harus ditetapkan standar waktu untuk mengerjakan baik bagian-bagian pekerjaan maupun untuk seluruh pekerjaan.
- e. Penjelasan tentang para petugas yang akan mengerjakan pekerjaannya baik mengenai kuantitas maupun kualitas, yaitu kualifikasi-kualifikasi pegawai seperti keahlian, pengalaman, dan sebagainya.
- f. Penjelasan tentang teknik mengerjakan pekerjaan.

(Manullang, 1992 : 42).

Seorang ahli yang lain, Tjokroamidjaja (1984 : 189-191) secara lebih jelas menegaskan bahwa dalam proses perencanaan yang continue itu perlu terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Sifat rencana itu sendiri sebagai dasar pelaksanaannya sudah mengandung ciri-ciri yang berorientasi kepada pelaksanaan, dalam arti memungkinkan untuk pelaksanaannya.
- b. Proses perencanaan tetap mengandung unsur kontinuitas dan fleksibilitas. Sehingga perlu terus menerus dilakukan reformulasi rencana dan reimplementasi dalam pelaksanaannya.

- c. Mengusahakan perencanaan dapat seoperasionil mungkin, yaitu dengan diusahakan penggunaan perencanaan operasional bantuan.
- d. Adanya sistem pengendalian pelaksanaan pembangunan yang mengusahakan keserasian antara pelaksanaan dan perencanaan.
- e. Bagi proses penyesuaian kembali rencana dan pelaksanaannya serta bagi pengendalian pelaksanaan, diperlukan adanya sistem pelaporan dan evaluasi dalam proses perencanaan.

Jadi dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu kegiatan awal dari suatu kegiatan inti agar tujuan kegiatan inti dapat tercapai.

2. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Kita telah mengetahui pengertian dari pada perencanaan itu sendiri dan juga pengertian pembangunan. Dengan mengacu dari pengertian masing-masing diatas kita dapat menyimpulkan perencanaan pembangunan merupakan sesuatu hal yang akan dilakukan dimasa mendatang untuk melakukan sesuatu perubahan agar dapat lebih baik di masa mendatang dari pada masa sekarang.

Dalam perencanaan pembangunan terdapat aktivitas atau kegiatan memilih model dan pembangunan, setelah itu menghimpun data yang relevan, meramalkan apa yang mungkin terjadi, memutuskan apa kiranya alternatif yang lebih baik, dan variabel-variabel mana yang perlu dibenahi (Kuntjara-jakti, 1987 : 306).

Albert Waterston menyebutkan perencanaan pembangunan dalam bukunya Tjokroamidjojo (1984 : 12) yang berjudul "Perencanaan Pembangunan" adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan. Selanjutnya Tjokroamidjojo sendiri (1984 : 13) juga menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu pengerahan penggunaan sumber-sumber pembangunan termasuk sumber ekonomi yang terbatas adanya, untuk

mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Selama ini kita telah melihat bahwa perencanaan pembangunan, terutama di negara kita saat ini belum berjalan seperti yang dicita-citakan oleh semua komponen bangsa. Hal ini menurut Tony Killick dalam bukunya Kuntjoro Jakti (1987: 309) adalah disebabkan karena seringkali para *planner* naif dalam hal politik, yaitu para perencana cenderung beranggapan bahwa mereka mengarah pada kebaikan umum berjangka panjang, dan bahwa para pemimpin politik sebenarnya juga mengarah kesana meskipun tidak jelas dan tegas.

Selain itu seringkali pemerintah yang bertindak sebagai *planner* mempercayai dan berpegang pada tindakan nyata didunia dimana pengetahuan tidaklah sempurna dan banyak ketidakpastian, terutama dalam perekonomian terbuka yang mudah sekali digoncangkan oleh gerak-gerik perniagaan dan arus modal yang tidak dapat dikendalikannya. Oleh karena itu perspektif holistic para perencana harus dilunakkan dengan pragmatisme para politisi.

Kuntjoro-Jakti juga mengemukakan tugas-tugas dalam perencanaan pembangunan adalah :

- a. Menyimpulkan dan menaksir indikator-indikator agregat bagi kondisi-kondisi sosial ekonomi suatu negara.
- b. Mengumpulkan dan menaksir data tentang sektor-sektor penting dalam perekonomian negara.
- c. Mengidentifikasi hubungan-hubungan antara sektor-sektor dalam rangka menunjukkan secara jelas bidang-bidang kegiatan yang esensial untuk persoalan-persoalan kunci.
- d. Menunjukkan secara jelas pendekatan-pendekatan alternatif kearah pembenahan masalah-masalah yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan, dan masalah-masalah yang mempengaruhi sektor-sektor tertentu.
- e. Mengidentifikasi implikasi pendekatan-pendekatan alternatif itu terhadap alokasi.

- f. Memberikan identifikasi alternatif beserta penjelasannya yang tegas dan rinci kepada pembuat keputusan tingkat tertinggi. Memaparkan implikasi alternatif-alternatif itu berdasarkan kaitan-kaitan sektoral.
- g. Menyusun tindak lanjut bagi keputusan-keputusan yang diambil pada pembicaraan-pembicaraan perencanaan yang berlangsung sebelumnya.
- h. Terus menerus memantau indikator-indikator kesejahteraan ekonomi dan sosial nasional dan memantau indikator hubungan-hubungan sektoral.
- i. Melaksanakan evaluasi dan memastikan bahwa hasil-hasil yang telah dicapai tercakup dalam perencanaan-perencanaan dan pembahasan-pembahasan kebijaksanaan berikutnya. (Kuntjoro-Jakti, 1987 : 315 – 316).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu kegiatan dalam merencanakan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan.

Dalam upayanya mencapai efektivitas pencapaian tujuan pembangunan, perencanaan pembangunan mempunyai kekhususan yang menjadi ciri khas dari sebuah perencanaan pembangunan. Menurut Tjokroamidjojo (1995:49), perencanaan pembangunan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Usaha yang dicerminkan dalam perencanaan pembangunan adalah untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steady social economic growth*), yang terlihat pada usaha peningkatan produksi nasional.
- b. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan perkapita, dimana ciri ini adalah lanjutan dari ciri yang pertama.
- c. Adanya usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi, karena pada umumnya negara-negara berkembang mempunyai struktur ekonomi yang tidak seimbang, misalnya terlalu berat pada sektor agraris.
- d. Adanya usaha perluasan kesempatan kerja dalam perencanaan.

- e. Adanya usaha-usaha pemerataan pembangunan dalam perencanaan.
- f. Adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
- g. Adanya usaha untuk lebih mendasarkan diri pada kemampuan nasional dalam pembangunan.
- h. Adanya usaha untuk terus menerus menjaga kestabilan ekonomi.
- i. Dicantumkannya tujuan jangka panjang atau yang bersifat fundamental atau ideal.

Dilihat dari ciri-ciri yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pembangunan tidak hanya untuk merencanakan pembangunan secara fisik, tetapi juga masyarakatnya, baik secara ekonomi maupun lapangan kerja, bahkan di segala bidang menuju suatu tujuan yang ideal.

Kemudian dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan tidak diaplikasikan secara frontal dalam sebuah aksi total begitu saja, namun harus dilakukan melalui proses tertentu. Agar perencanaan yang dibuat efektif dan efisien maka harus melampaui proses tertentu yang diwujudkan melalui tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan menurut Hanarsyah (1986:119), terdiri dari beberapa langkah yang harus ditempuh yaitu :

1. Pengumpulan dan pencarian informasi serta data-data mengenai daerah dan masyarakat yang tinggal di wilayah yang bersangkutan.
2. Dari data dan informasi tersebut, dilakukan suatu analisa terhadap kondisi kebutuhan dan potensi pembangunan yang ada di dalam daerah tersebut untuk masa kini maupun masa yang akan datang.
3. Mencantumkan tujuan dari sasaran pembangunan secara menyeluruh bagi daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan tujuan pembangunan nasional.
4. Perumusan program rencana yang harus disesuaikan dengan tujuan dan sasaran umum pembangunan.
5. Pelaksanaan rencana
6. Melakukan *monitoring* sepanjang pelaksanaan rencana

7. Melakukan evaluasi setelah pelaksanaan.
8. Memperoleh dan menyediakan umpan balik.

Proses perencanaan pembangunan daerah pada umumnya disusun dalam bentuk umum dan untuk jangka waktu panjang bagi suatu daerah. Dari bentuk umum itu, disusunlah perencanaan pembangunan untuk jangka menengah dan dilanjutkan dengan perencanaan pembangunan jangka pendek (tahunan). Ketiga hal tersebut saling berkaitan, artinya rencana jangka menengah harus sejalan dengan rencana jangka panjang dan rencana tahunan harus sejalan dengan rencana jangka menengah.

Sjafrudin (1993:49) mengemukakan langkah-langkah utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Memperoleh data dan informasi mengenai daerah dan penduduk.
2. Analisa terhadap kondisi, kebutuhan dan potensi pembangunan yang ada di daerah.
3. Menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.
4. Merumuskan pola dasar pembangunan daerah untuk memenuhi tujuan jangka panjang.
5. Merumuskan beberapa pilihan strategis rencana pembangunan daerah untuk jangka menengah.
6. Mengikuti pilihan-pilihan strategis dan memilih atau menetapkan strategi yang optimum.
7. Merumuskan rencana dan anggaran tahunan.
8. Memperoleh persetujuan dan pengesahan atas rencana dan anggaran tahunan.
9. Melaksanakan rencana dan program tahunan.
10. Melakukan pemantuan (*monitoring*).
11. Melakukan evaluasi
12. Memperoleh dan menyediakan umpan balik.

Dari penjelasan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan perencanaan pembangunan harus mengenal terlebih dahulu mengenai kondisi masyarakat secara akurat agar pelaksanaan pembangunan tepat sasaran dan

sesuai dengan program pembangunan yang ada serta melakukan upaya umpan balik terhadap pembangunan yang telah dilakukan.

A.3 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Sebagaimana disinggung sebelumnya dalam poin paradigma pembangunan, bahwa stigma pembangunan yang selaras dengan pemenuhan kebutuhan manusia adalah pembangunan yang berpusat pada manusia. Dimana manusia menjadi obyek sekaligus subyek dari pembangunan itu sendiri. Termasuk dalam perencanaan pembangunan, masyarakat dituntut aktif dalam melakukan perannya baik sebagai obyek maupun subyek. Karena pemenuhan kebutuhan yang seakan tak berujung yang diupayakan dalam pembangunan haruslah diimbangi pula oleh perencanaan pembangunan yang kelak harus mampu menghasilkan program pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu sangat penting dilakukan pemberdayaan masyarakat semenjak perencanaan pembangunan.

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Dasar pandangan dari pemberdayaan masyarakat adalah proses penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada beberapa elemen masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat. Hal-hal yang tertinggal atau di bawah standar harus ditingkatkan kemampuannya dengan pengembangan dan sesuai dengan potensi yang ada. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu sinergi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, Sejalan dengan pemahaman dasar pengertian pemberdayaan tersebut, terdapat beberapa pengertian pemberdayaan masyarakat.

Menurut Chambers dalam Ginanjar (1996 : 142) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat pembangunan yang berpusat pada manusia, pembangunan partisipatoris, pemberdayaan dan berkelanjutan *people centered, development participatory, empowering and sustainable*". Sedangkan menurut ahli lain

yaitu Kartasmita (1996:144) mengemukakan bahwa memberdayakan masyarakat mengandung pengertian memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang ada dalam kondisi tidak mampu hanya dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Jadi memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat”.

Selanjutnya, Pranata dan Vidhayandika (1996:56), mengemukakan bahwa dua kecenderungan yang terjadi dalam proses pemberdayaan yaitu:

1. Proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan dan kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Disebut juga sebagai suatu kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.
2. Menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi, individu agar mempunyai atau keberadaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Disebut juga kecenderungan sekunder.

Kartasmita (1996:18), mengatakan bahwa, memberdayakan masyarakat harus dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini, titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi untuk berkembang. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran atau potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat yang dimaksud berarti bahwa:

1. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan langkah-langkah lebih positif untuk menciptakan iklim dan suasana yang menunjang pemberdayaan.
2. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah oleh karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh

karena itu perlindungan dan pemihakan yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka ini, adanya peraturan perundangan yang secara jelas dan tegas melindungi kaum lemah sangat diperlukan. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal ini justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat miskin menjadi tergantung pada berbagai program pemberian. Karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atau usaha sendiri (yang hasilnya dapat diperuntukkan dengan pihak lain).

Hal senada juga dikemukakan oleh Sumodiningrat (1997:6) bahwa, dalam upaya pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Setiap anggota masyarakat secara alamiah memiliki potensi yang dapat dikembangkan, itu berarti bahwa setiap anggota masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki menuju ke kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan serta akses-akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan pekerjaan dan pasar. Sedangkan pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat berarti melindungi untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan untuk kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

Agar pemberdayaan masyarakat dapat tumbuh dengan baik, maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak yang dapat menunjang dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya tertentu, dimana upaya tersebut diarahkan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia, seperti adanya usaha-usaha untuk meningkatkan

kemampuan aparaturn pemerintahan daerah serta memberikan ketrampilan bagi warga serta meningkatkan kualitas lembaga masyarakat yang ada di daerah.

Pada konteks lain Soetrisno dalam Abimanyu (1995:136) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat berdiri pada satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki dan menggunakan untuk pembangunan masyarakatnya.

Kemudian pada pendapat lain dinyatakan oleh Mubyarto(1993:204) bahwa praktek Pemberdayaan rakyat adalah lebih ditekankan kepada tindakan-tindakan yang konkrit dapat meningkatkan kemampuan atau kualitas sumber daya manusia. Selain itu, praktek pemberdayaan masyarakat adalah upaya membuka pengertian atau kesadaran yang lebih luas hak dan kewajiban politik, ekonomi, sosial dan kultur.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat meningkatkan kemampuan masyarakat dan memandirikan masyarakat. Jadi masyarakat harus berusaha mengembangkan potensi yang dimilikinya secara maksimal dan ikut dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, diperlukan adanya suatu pendekatan-pendekatan pemberdayaan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Elliot dalam Soeprapto (2000:80) yang menyatakan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Kesejahteraan (*The Welfare Approach*)

Pendekatan ini megarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memberdayakan masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat, tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh kekuatan potensi local masyarakat.

2. Pendekatan Pembangunan (*The Development Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

3. Pendekatan Pemberdayaan (*The Empowerment Approach*)

Pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat.

Dengan adanya pendekatan tersebut, diharapkan dapat mempermudah pemberdayaan pada masyarakat, sehingga sesuai dengan harapan masyarakat lebih kreatif dan mandiri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Menurut Pranarka dan Prijono (1996:2) proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara bertahap dalam tiga fase yaitu: fase inisial, fase partisipatoris, fase emansipatoris. Pada fase inisial, semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, oleh pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat. Hal ini bersifat pasif dan melaksanakan apa yang telah direncanakan oleh pemerintah dan tetap bergantung kepada pemerintah. Fase partisipatoris adalah proses pemberdayaan masyarakat yang berasal dari pemerintah bersama rakyat dan sudah dilibatkan secara aktif untuk menuju kemandirian. Sedangkan fase emansipatoris adalah proses pemberdayaan dari rakyat, oleh rakyat serta didukung oleh pemerintah bersama masyarakat.

Pelaku dalam pemberdayaan masyarakat ini dapat meliputi tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat sendiri. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan pemerintah daerah adalah menciptakan iklim yang kondusif dengan mengembangkan seperangkat kebijakan yang bisa menguntungkan bagi kepentingan semua pihak. Pihak swasta dapat berperan dalam mengembangkan kemitrausahaan dengan masyarakat agar tujuan program pembangunan dapat tercapai. Sementara pihak masyarakat dapat berperan dengan ikut serta dalam lembaga-lembaga atau wadah dalam masyarakat itu sendiri selanjutnya berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaannya serta evaluasi nantinya.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Masyarakat yang dimaksud dalam pembangunan merupakan masyarakat yang tinggal dalam jangka waktu dan wilayah tertentu yaitu di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, serta merupakan pihak yang ikut merasakan pembangunan. Pada dasarnya partisipasi masyarakat merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembangunan maupun setelah adanya pembangunan karena pembangunan memerlukan pemeliharaan. Di dalam perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat sangat berpengaruh pada tahap Musrenbang Desa/kelurahan karena pada tingkat ini masyarakat benar-benar dilibatkan.

Menurut Soeprpto (1986:205), untuk menumbuhkan kegiatan partisipasi diperlukan suatu keahlian untuk mencapai berbagai tingkatannya. Dengan memperhatikan perbedaan tingkatan yang ada, maka pada dasarnya ada tiga tingkatan dalam partisipasi, yaitu :

a. Tingkat Saling Mengerti

Pada tingkat ini dikembangkan sikap untuk saling mengenal secara lebih dalam antara satu anggota dengan anggota yang lain. Tujuan yang dimaksud adalah untuk membantu para anggota kelompok agar memahami masing-masing fungsi dan sikap, sehingga dapat mengembangkan kerjasama yang lebih baik. Dengan demikian, secara pribadi mereka akan menjadi lebih banyak yang terlibat, bersikap kreatif dan juga menjadi lebih bertanggung jawab.

b. Tingkat Sugesti

Dalam partisipasi untuk sugesti, seseorang dapat membantu untuk mengambil keputusan dan memberikan saran-saran yang bersikap kreatif, namun dia sendiri tidak dapat menentukan suatu keputusan. Cara demikian dapat meningkatkan inisiatif, kreatifitas, disiplin dan semangat, selain mengurangi suatu sifat kaku dan kaku maupun mengurangi pengarahan.

c. Tingkat Otoritas

Pada dasarnya memberikan kepada kelompok suatu wewenang untuk memantapkan keputusannya. Kewenangan tersebut dapat bersifat resmi jika kelompok memberikan kepada pimpinan, konsep keputusan yang kemudian dapat diresmikan menjadi keputusan oleh pemimpin yang bersangkutan.

Dalam kaitan partisipasi dengan perencanaan, terdapat suatu metode perencanaan yang bersifat partisipatif dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung).

Menurut Abe (2005:88) yang dimaksud dengan melibatkan kepentingan rakyat disini, mencoba untuk mengungkapkan dari dua segi. Pertama, adanya suatu kenyataan atau historis dimana masyarakat desa telah sekian lama hidup dibawah hegemoni negara. Akibatnya rakyat berada dalam refresi ideologi, dan dengan demikian kesadaran politik rakyat bisa diduga merupakan kesadaran hasil bentukan negara dan aspirasi rakyat dengan sendirinya bukan merupakan aspirasi yang sesungguhnya. Kedua, rakyat telah kehilangan institusi lokal dan kecerdasan lokal, sebagai kaibat dari tekanan politik elite. Hal ini mengakibatkan rakyat tidak memiliki kembali saluran yang bisa dipercayai, dan bisa memberikan rasa aman atas apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pembangunan partisipatif pada intinya melibatkan kepentingan masyarakat secara aktif baik sebagai obyek maupun subyek pembangunan secara bertahap sesuai potensi masyarakat itu sendiri dengan tetap menitikberatkan pada pencapaian tujuan pembangunan demi kepentingan bersama.

Adapun bentuk perencanaan partisipatif memiliki beberapa bentuk, seperti yang dikemukakan oleh Abe (2005:91), yang menawarkan dua bentuk perencanaan partisipatif. Pertama, perencanaan yang langsung disusun bersama rakyat. Perencanaan bisa merupakan perencanaan lokasi (menyangkut didaerah dimana masyarakat berada) dan perencanaan wilayah yang disusun dengan melibatkan masyarakat secara perwakilan. Kedua,

perencanaan yang disusun melalui mekanisme perwakilan, sesuai dengan institusi yang sah (legal-formal), seperti parlemen. Untuk kasus kedua ini, masyarakat seyogyanya masih bersifat terbuka dalam memberi masukan, kritik dan kontrol, sehingga apa yang dirumuskan dan diaktualisasikan oleh parlemen benar-benar apa yang dikehendaki masyarakat.

Untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pembangunan, maka dipakailah perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*) yang merupakan sistem terbaik dan terbukti efektif dibandingkan sistem perencanaan dari atas ke bawah (*top down*), karena dalam sistem ini, masyarakatlah yang berperan penting dalam mengemukakan usulan, pendapat maupun kendala atau masalah yang sedang dihadapi. Sistem ini sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang otonomi daerah serta di dalamnya juga mengatur pemberdayaan masyarakat.

B. KESEJAHTERAAN

Paradigma pembangunan yang terus berkembang dalam perjalanan sejarah setiap komunitas manusia yang disebut negara adalah sebuah cerminan dari upaya setiap manusia untuk memenuhi segala kebutuhan dalam segala aspek kehidupannya, baik fisik maupun psikologis. Terpenuhinya seluruh aspek kebutuhan inilah yang kemudian kita sebut sebagai kondisi sejahtera. Urgensi dari kondisi ideal tersebut kemudian mendorong manusia untuk berlomba-lomba mengembangkan konsep kesejahteraan sesuai dengan perkembangan peradaban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:794), kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur, tidak kurang suatu apapun (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya).

Adapun dimensi kesejahteraan adalah sangat luas dan kompleks, sehingga suatu taraf kesejahteraan hanya dapat terlihat (*visible*) jika dilihat dari aspek tertentu. Catatan Biro Pusat Statistik menyebutkan bahwa pada dasarnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasarnya. Semakin terpenuhinya kebutuhan mengindikasikan semakin tingginya tingkat kesejahteraan yang dirasakan (BPS, 1992).

Sedangkan kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Pemenuhan kebutuhan ini salah satunya berkaitan dengan pemenuhan pendapatan standar, dimana pendapatan sebuah keluarga dalam bentuk apapun yang bernilai ekonomis mampu memenuhi kebutuhan standar sandang, pangan dan papan sebuah keluarga. Dalam konteks sebuah masyarakat, pemenuhan pendapatan tersebut berkaitan dengan kemudahan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Bisa dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun kemudahan lainnya yang memperlancar transaksi ekonomi.

Hal inilah yang dibidik oleh Program Pengembangan Kecamatan dengan wujud pembangunan sarana dan prasaran fisik berupa perbaikan jalan atau pembukaan jalan baru, perbaikan maupun pembangunan pasar, maupun sarana dan prasarana lain yang memudahkan transaksi ekonomi. Selain itu PPK juga memberi peluang bagi mereka yang membutuhkan modal untuk memperbesar maupun membuka usaha melalui pendirian koperasi dalam kegiatan usaha ekonomi produktif. Kedua hal tersebut diharapkan akan mampu untuk memberikan kontribusi berupa adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi.

Dalam PPK sendiri evaluasi hasil bisa dilihat dari tujuan fungsional yang telah ditetapkan sebagai derivasi dari tujuan umum PPK itu sendiri. Oleh karena itu untuk memperjelas parameter pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan fungsional PPK melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif PPK, penulis menggunakan tujuan fungsional PPK yang dapat dihasilkan melalui Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif, yang berhubungan secara signifikan dengan kegiatan yang dimaksud sebagai landasan atau parameter.

C. Program dan Proyek Pembangunan

Sebelum mempelajari PPK lebih jauh akan jauh lebih baik untuk mengetahui apa dan bagaimanakah program dan proyek itu. Karena PPK adalah proyek yang diderivasikan dari program pemerintah dalam kebijakannya menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.

C.1 Program Pembangunan

Adapun pengertian program secara umum seperti yang tertera pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

”suatu rancangan mengenai asas-asas serta usaha (dalam ketatanegaraan perekonomian dan lain sebagainya) yang akan dijalankan”(1990:784).

Sedangkan United Nations yang dikutip oleh Zauhar(1993:2), mendefinisikan program sebagai berikut:

”programme is taken to mean a form of organized social activity with a specific objective, limited in space and time. It often consist of an interrelated group of projects and usually limited to one or more an going organizations and activities.

Jadi program merupakan suatu bentuk rancangan pencapaian tujuan yang objektif, terdiri dari serangkaian proyek yang dilakukan pada waktu ruang dan waktu tertentu oleh sebuah komunitas terorganisir.

Dari pengertian di atas bisa kita ketahui bahwa selain bersifat alokatif dan distributif, program juga bersifat inovatif dan multi fungsi. Melalui program berbagai masalah pembangunan dan kemasyarakatan dicoba untuk diselesaikan. Adapun tujuan program adalah sebagai pemecah masalah atau *problem solving* untuk membangkitkan inovasi dan motivasi masyarakat. Berawal dari ketertarikan masyarakat terhadap program selanjutnya akan menarik masyarakat lebih jauh lagi untuk berperanserta dalam program tersebut untuk kemudian secara aktif menjaga kelangsungan program termasuk di dalamnya melahirkan inovasi dan motivasi masyarakat dalam program pembangunan.

Dalam mencapai tujuan tersebut, disadari adanya keterbatasan sumber daya yang tidak dapat dihindari. Oleh karenanya para peengelola pembangunan harus mampu menyusun skala prioritas sehingga alokasi dan distribusi sumber daya yang ada bisa secara efektif dan efisien dilakukan. Seperti yang dikutip oleh Zauhar (1993:2), United Nations menyatakan bahwa agar fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka suatu program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. tujuan yang dirumuskan secara jelas.
- b. Penentuan dari peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan.

- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program selektif mungkin.
- d. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan dari program tersebut.
- e. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan tidak berdiri sendiri.
- f. Berbagai upaya di bidang manajemen termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

Selanjutnya agar program dapat dijalankan sebagaimana mestinya maka program kemudian diderivasikan atau dijabarkan dalam bentuk yang lebih riil yaitu proyek. Proyek inilah yang merupakan penjelasan operasional aatau bentuk konkret aplikasi di masyarakat dari apa-apa yang termaktub di dalam program guna mencapai tujuan pembangunan.

C.2. PROYEK PEMBANGUNAN

Menurut Siagian (1984:164), secara singkat proyek dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan dengan cara kerja tertentu, kriteria keberhasilan, lokasi yang jelas, jumlah biaya yang pasti, sumber pembiayaan yang telah ditetapkan serta dikelola oleh sekelompok orang yang secara khusus ditunjuk untuk itu. Adapun ciri-ciri umum sebuah proyek sebagaimana dikemukakan oleh United Nations yang dikutip oleh Zauhar(1993:3) adalah sebagai berikut:

- a. proyek lebih menekankan kepada tujuan-tujuan yang lebih dekat. Bagaimana mencapai suatu hasil tujuan dalam periode yang relatif lebih singkat dengan mengusahakan sumber-sumber pembiayaannya dan merencanakan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu proyek berorientasi kepada kegiatan.
- b. seharusnya kegiatan usaha untuk mencapai tujuan proyek tidak berlaku terus-menerus. Pencapaian tujuan proyek tidak dapat dilakukan melalui kegiatan rutin dari suatu badan pemerintahan.

Setiap proyek tertentu mempunyai ciri-ciri yang khas sesuai bidang garapannya masing-masing, namun demikian setiap proyek mempunyai kesamaan terutama dalam siklus pengelolaannya. Hal tersebut merupakan

aspek administrasi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sebuah proyek. Tahap-tahap yang dimaksud adalah pencetus ide-ide atau gagasan, formulasi rencana atau program kinerja proyek, laporan dan arus balik, kemudian evaluasi dari pelaksanaan hasil proyek. Agar rumusan proyek dapat lebih diandalkan maka biasanya didahului dengan survey dan *feasibility study* yang matang. Adapun secara lebih rinci langkah atau tahapan siklus proyek dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dengan konseptualisasi dan identifikasi. Hal ini dilakukan agar diperoleh informasi yang dapat membantu untuk menetapkan bidang-bidang kegiatan proyek yang akan dilakukan dan nantinya merupakan kegiatan yang logis dan penting. Hal tersebut dapat dilihat dari efisiensi penggunaan tenaga, biaya dan waktu. Pada tahap ini kemudian dilakukan studi kelayakan dalam tingkat membantu untuk menentukan kebutuhan masyarakat dan pada saat yang tepat dapat dipergunakan untuk memulai program-program perbaikan. Layak atau tidaknya serta cara untuk menentukan prioritas proyek adalah didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. perbandingan penilaian teknis.
2. perbandingan tingkat kemanfaatan yang dihasilkan bagi kelompok sasaran strategis.
3. perbandingan tingkat kemampuan suatu proyek dalam melayani daerah strategis.
4. masuk tidaknya proyek dalam sektor strategis.
5. menjadi bagian atau tidaknya suatu proyek dari rangkaian terpadu.
6. tingkat urgensi proyek.
7. analisa tujuan (Zauhar, 1993: 6).

Kemudian hasil dari kelayakan tersebut harus memuat informasi analisis yang berkaitan dengan:

1. segi ekonomi dari seluruh proyek.
2. segi keuangan seluruh proyek terutama sumber pembiayaannya.

3. segi teknis seluruh proyek, khususnya dalam pelaksanaan dan pengoperasian proyek.
4. dampak politik seluruh proyek yang sering merupakan pertimbangan yang dominan dalam memproyeksikan seluruh kegiatan.
5. segi manajemen seluruh proyek dalam arti tersedianya tenaga pimpinan yang bertanggungjawab atas keseluruhan pengelolaan.
6. desain sementara seluruh proyek(Zauhar, 1993:5).

Pada desain proyek akan tergambar perincian yang lebih detail dan cermat yang meliputi daftar khusus catatan kegiatan, penjadwalan sumber daya, bidang kerja, usaha dan administrasi kepemimpinan atau koordinator.

b. implementasi proyek

Pada tahap ini diperlukan adanya kordinasi dan kerja sama antara instansi terkait dengan pelaku-pelaku proyek. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah sumber daya alam atau bahan perlengkapan, tata kerja sangat mementukan keberhasilan berjalannya suatu proyek.

c. monitoring dan evaluasi hasil proyek

hasil monitor dan evaluasi merupakan dasar untuk menilai keberhasilan program serta sebagai bahan untuk mengadakan perubahan atau perluasan rencana kerja bila diperlukan(Zauhar, 1993:10).

Adapun beberapa keuntungan proyek dalam pembangunan adalah:

1. proyek merupakan kegiatan yang teridentifikasi, terbatas dan terorganisir secara rapi.
2. proyek merupakan alat yang efektif di dalam menerjemahkan rencana dan kebijakan pembangunan ke dalam seperangkat kegiatan yang khas.
3. proyek merupakan wahana untuk memobilisasi dan mengalokasi sumber-sumber untuk kegiatan pembangunan.
4. proyek merupakan kegiatan temporer yang secara inkremental dapat mengarah kepada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas.
5. proyek dapat dipakai untuk mengerjakan kegiatan pembangunan yang unik, inovatif dan insidental atau tidak rutin.

6. proyek dapat digunakan untuk menyalurkan sumber daya pembangunan kepada kelompok tertentu di lokasi tertentu.
7. proyek dapat diformulasikan sebagai unit kegiatan yang dapat dikelola dan diarahkan dengan prosedur perencanaan dan administrasi.
8. proyek secara eksternal dapat diawasi dan dikontrol serta dapat dipakai untuk mempengaruhi kebijakan pembangunan (Zauhar, 1993:21).

Dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa proyek merupakan serangkaian kegiatan dengan cara kerja tertentu, kriteria keberhasilan, lokasi yang jelas, jumlah biaya yang pasti, sumber pembiayaan yang telah ditetapkan serta dikelola oleh kelompok khusus yang terorganisir untuk mencapai tujuan dengan waktu yang realtif lebih singkat.

D. Program Pengentasan Kemiskinan (PPK)

D.1. Latar belakang

Sejak pelita I, pemerintah menggulirkan berbagai program bantuan pembangunan. Dari berbagai program pembangunan tersebut, PPK merupakan suatu bentuk program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui inpres No. 5 th 1995 tentang peningkatan pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1993 – 1994. Program ini merupakan upaya lanjutan Inpres 5/93 tentang desa tertinggal (IDT). PPK ini dirancang secara khusus untuk meningkatkan keterpaduan pengembangan usaha produktif dan pembangunan secara prasarana pedesaan..

Program ini bersifat lintas sektoral dan saling mendukung dengan program lainnya, dimana dalam pelaksanaan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat serta memerlukan keserasian dan keterpaduan langkah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PPK adalah integrasi dan sinkronisasi dari program-program sebelumnya yakni antara kegiatan bantuan pembangunan prasarana/sarana dengan kegiatan pemberian bantuan modal usaha ekonomi yang produktif secara selaras dan berkesinambungan (saling mendukung dengan program-program lainnya) sehingga masyarakat semakin dapat diberdayakan dalam upaya meningkatkan taraf kehidupannya.

D.2. Prinsip-prinsip

Adapun prinsip-prinsip Program Pengembangan kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Desentralisasi

Dalam rangka mewujudkan desentralisasi PPK, maka pemerintah menyerahkan wewenang kepada masyarakat untuk :

- (a). Memanfaatkan dan mengelola dana PPK
- (b). Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh dana PPK
- (c). Mempertanggungjawabkan pengelolaan dan PPK.

2. Keterbukaan

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan PPK terbuka untuk umum. Keterbukaan tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam :

- (a). Mengambil keputusan yang berkaitan dengan PPK, misalnya menentukan jenis kegiatan dan pengelolaan dana PPK.
- (b). Memperoleh informasi secara lengkap dan terus menerus tentang segala sesuatu yang menyangkut PPK.
- (c). Menumbuhkembangkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (d). Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan PPK.
- (e). Meningkatkan saling percaya diantara pelaku PPK.

Beberapa cara untuk mendukung keterbukaan :

- (a). Membangun dan mengefektifkan jaringan informasi dengan tokoh masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, dan pemerintah.
- (b). Menyebarkan informasi tentang PPK kepada masyarakat melalui berbagai media informasi, baik lisan maupun tertulis, termasuk papan-papan informasi dan papan nama proyek.

3. Partisipasi

Pengertian partisipasi dalam PPK adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap kegiatan PPK, mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian / pemantauan serta pelestarian dan pengembangan kegiatan.

Salah satu wujud dari partisipasi adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dana PPK di Kecamatan melalui forum UDKP setelah sebelumnya dibahas dalam forum desa.

4. Kompetisi Sehat

- a. Usulan-usulan kegiatan masyarakat harus dikompetisikan secara sehat sesuai dengan kriteria kegiatan untuk mendapatkan dukungan dana PPK
- b. Setiap desa peserta berhak mengajukan usulan
- c. Setiap desa yang mengajukan usulan tidak otomatis mendapatkan dana.

5. Keberpihakan kepada orang miskin

PPK mengharuskan keterlibatan kelompok masyarakat miskin mulai dari pengambilan keputusan atau penentuan usulan kegiatan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil kegiatan, oleh karena itu masyarakat miskin harus terwakili dalam setiap proses pengambilan keputusan termasuk dalam perencanaan mulai pertemuan kelompok, dusun, desa.

D.3. Tujuan PPK

Adapun tujuan PPK yang dimaksud adalah memberdayakan masyarakat, memperkuat kelembagaan dan mempercepat penanggulangan kemiskinan secara rasional melalui pemberian bantuan berupa modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi pedesaan. Pada PPK II fokus lebih pada bangunan kelembagaan sebagai pondasi dan pengembangan program ini.

D.4. Sasaran Kelompok dan Lokasi

Sasaran utama penerima PPK adalah penduduk miskin, sedangkan sasaran lokasi dipilih berdasarkan kriteria :

- a. Jumlah desa tertinggal dalam kecamatan lebih besar.

- b. Prosentase jumlah penduduk miskin dalam kecamatan lebih besar.
- c. Masyarakat Lembaga Keamanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) telah terbentuk dan berjalan.
- d. Kecamatan-kecamatan yang mengalami krisis moneter yang menyebabkan pengangguran dan kecamatan-kecamatan yang mengalami kekeringan.

D.5. Kriteria Desa

Kriteria desa penerima bantuan PPK adalah desa-desa yang akan ditangani diserahkan penentuannya kepada kecamatan yang diseleksi melalui forum UDKP, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. cukup tingginya presentase penduduk miskin.
- b. Diutamakan desa yang lebih mudah dijangkau.
- c. Tidak sedang mendapat proyek P3DT atau proyek sejenis pada tahun yang sama.
- d. Maksimum sepuluh desa terpilih per kecamatan untuk dibantu pada setahun pertama.

D.6. Pendekatan Bantuan

Pendekatan yang digunakan dalam program bantuan ini adalah sebagai berikut :

- a. Partisipasi masyarakat untuk merencanakan dan melestarikan pembangunan.
- b. Pemberian kepercayaan masyarakat untuk memilih kegiatan yang diinginkan dan dibutuhkan.
- c. Pemihakan pada penduduk miskin.
- d. Pemberian akses informasi kepada setiap penduduk desa mengenai peluang, kebebasan memilih dan memutuskan.
- e. Mendorong suasana kompetisi sehat dalam pengajuan usulan kegiatan.
- f. Penerapan teknologi tepat guna dan padat karya.

D.7. Prinsip Pengelolaan

Pada dasarnya pengelolaan program ini harus memenuhi beberapa prinsip berikut ini :

- a. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola (*acceptable*).
- b. Dapat dikelola oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).
- c. Memberikan pendapat yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*).
- d. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat (*sustainable*).
- e. Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*).

D.8. Jenis Kegiatan

Secara garis besar ada dua jenis kegiatan utama, yaitu penyediaan modal usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang menunjang ekonomi pedesaan. Dan pada perkembangannya program ini menjadi terdiri dari :

- a. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik.
- b. Kegiatan perluasan kesempatan dan peluang usaha
 - Usaha Ekonomi Produktif
 - Simpan Pinjam Kelompok Perempuan
- c. Kegiatan peningkatan kualitas hidup dan kapabilitas masyarakat dalam bidang
 - pendidikan
 - kesehatan
 - Pelatihan manajerial

Pada dasarnya PPK terbuka untuk semua usulah kegiatan, terutama jenis kegiatan yang menguntungkan dan melibatkan banyak masyarakat miskin

serta memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan, kecuali jenis kegiatan yang dilarang. Kegiatan yang termasuk daftar larangan (*Negative List*) adalah:

- a. Pembangunan atau rehabilitasi bangunan kantor dan tempat ibadah.
- b. Pembiayaan gaji pegawai.
- c. Pembelian kapal ikan yang berbobot diatas 10 ton dan perlengkapannya.
- d. Pembelian *chainsaw*, senjata, bahan peledak, abes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan.
- e. Pembiayaan kegiatan politik praktis atau partai politik.
- f. Pembiayaan apa saja yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata.
- g. Pembelian pupuk kimiawi, obat pertanian kimiawi (insektisida, pestisida, herbisida dan sebagainya).

D.9. Pelaksana

Masyarakat adalah pelaku utama PPK mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten berfungsi sebagai fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip-prinsip, kebijakan dan mekanisme PPK dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Adapun pelaku PPK adalah sebagai berikut :

1. Pelaku di tingkat Pusat
 - Bappenas, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, Instansi terkait lainnya.
2. Pelaku PPK di tingkat Propinsi
 - Ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
3. Pelaku PPK di Kabupaten
 - Bupati : Tim Koordinasi PPK Kabupaten (TK PPK Kabupaten), Konsultan Manajemen Kabupaten (KM Kab).
4. Pelaku PPK di Kecamatan
 - Camat; Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK); Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK); Unit Pengelola

Kegiatan (UPK); Tim Verifikasi; Tim pengamat; Pendamping Lokal; Fasilitator Kecamatan.

5. Pelaku PPK di desa

- Kepala Desa; Tim Pengelola Kegiatan (TPK); Tim Penulis Usulan (TPU); Fasilitator Desa (FD)>

D.10. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Program ini ada 4 tahapan yaitu :

- a. Perencanaan Kegiatan
- b. Pelaksana Kegiatan
- c. Pengendalian Kegiatan
 - Pemantauan
 - Pelaporan
- d. Pelestarian kegiatan.

D.11. Pendanaan

Pendanaan PPK ada 3 sumber dana, dengan satu sumber dana utama, yaitu dana dari pusat (*full grant*) yang diperoleh dari IBRD / Bank Dunia. Sedangkan dua sumber lainnya adalah dana swadaya masyarakat dan dana dari APBD / Kabupaten (*matching grant*).

E. KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF

Yang dimaksud kegiatan usaha ekonomi produktif dalam PPK adalah berupa kegiatan perluasan kesempatan dan peluang usaha. Kegiatan usaha ekonomi produktif sendiri merupakan aktifitas masyarakat pedesaan di sektor rill, bisa berupa usaha yang memproduksi suatu bahan, bidang penjualan atau pemasaran ataupun yang berbentuk jasa, sebagaimana telah dijelaskan dalam buku panduan IV PPK(2002:26). Peruntukkan kegiatan UEP yang dapat diajukan melalui PPK adalah peningkatan atau pengembangan usaha yang menguntungkan dan sedang dijalankan dan atau membuka peluang usaha baru yang menguntungkan sesuai keterampilan yang dimiliki dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau membayar kembali.

Adapun parameter atau indikasi keberhasilan dari penyelenggaraan maupun pelestarian kegiatan tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa,
- b. peningkatan kemampuan lembaga dan aparat desa untuk mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat desa, dan
- c. penurunan jumlah penduduk miskin.

Peningkatan kemampuan lembaga dan aparat desa dalam mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat diharapkan akan mampu mendorong dua point lainnya. Sedangkan peningkatan kemampuan lembaga dan aparat desa untuk mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat desa dalam kegiatan usaha ekonomi produktif ini ditandai dengan hal-hal berikut:

- a. apakah kedua lembaga tersebut menumbuhkan motivasi masyarakat dalam kegiatan.
- b. apakah kedua lembaga tersebut mampu menggerakkan masyarakat dalam mengatur dan mengembangkan usahanya.
- c. Apakah kedua lembaga tersebut mampu mengkondisikan masyarakat agar mampu berinisiatif secara mandiri dalam mengambil keputusan pada saat menghadapi masalah baik pada tahap penyelenggaraan maupun pelestarian kegiatan, termasuk dalam hal pengembangan kreativitas yang ditandai dengan adanya inovasi.

Kemudian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa, diharapkan dapat meningkat melalui partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelestarian kegiatan usaha ekonomi produktif. Salah satunya karena hasil dari kegiatan usaha ekonomi produktif sebagian akan diberikan kepada desa untuk pembangunan ekonomi desa dengan jumlah sesuai kesepakatan masyarakat yang bersangkutan sebagaimana telah diatur dalam PTO PPK. Kemudian dengan pemebentukan kelompok kegiatan usaha ekonomi produktif diharapkan akan semakin memperluas usaha masyarakat dan juga dapat membuka lapangan kerja baru sehingga akan mampu mendongkrak perekonomian desa. Di sisi lain hal tersebut juga diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mampu untuk mengubah status masyarakat dari masyarakat pra sejahtera menjadi masyarakat sejahtera yang pada akhirnya mampu untuk

memberikan kontribusi terhadap penurunan jumlah atau angka kemiskinan di wilayah yang bersangkutan.

Sedangkan untuk sifat dana bantuan yang dialirkan melalui PPK, sesuai kebijakan yang diberlakukan, dana yang digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif adalah pinjaman yang harus dikembalikan dan kemudian digulirkan kembali (TK PPK, 2002). Untuk memperoleh dana bergulir dari kegiatan ekonomi PPK, baik kegiatan usaha ekonomi produktif maupun simpan pinjam bagi kelompok perempuan, harus melalui tahap kompetisi usaha. Tahap ini adalah tahap awal dimana seluruh kelompok yang ingin memanfaatkan dana PPK melalui kegiatan ekonomi harus mengikuti kompetisi dengan mengajukan rencana usaha berikut prospeknya (bagi kelompok yang hendak merintis usaha) atau gambaran perkembangan usaha berikut peluang usaha kedepan baik bagi kelompok yang telah menjalankan usaha maupun yang ingin mengembangkan pasar usahanya.

Setelah diperoleh kelompok yang terpilih yaitu kelompok pemenang kompetisi, maka UPK mencairkan dana dan menyerahkan kepada kelompok pengusul yang akan didanai bersama TPK desa-desa tersebut. Penyaluran kepada kelompok-kelompok pengusul dengan disertai penandatanganan Surat Pemberian Pinjaman (SP3) antara ketua UPK dan para anggota kelompok dengan diketahui oleh Kepala Desa. Proses penyaluran ini harus dilakukan secara terbuka kepada masyarakat. Proses penyaluran dana diberikan secara langsung kepada kelompok atau anggota kelompok yang sudah teregistrasi dalam pengajuan dan harus disertai dengan bukti kuitansi. Tim khusus yang menyaksikan proses penyaluran dana akan mencatat dan membuat berita acara sebagai laporan kepada masyarakat yang akan disampaikan dalam Musyawarah Desa Pertanggungjawaban.

Selanjutnya anggota kelompok atau kelompok akan memanfaatkan dana pinjamannya sesuai kegiatan yang telah diajukan. Pelaksanaan kegiatan UEP dan Simpan Pinjam perempuan mengacu pada ketentuan umum penggunaan dana pinjaman bergulir dan kesepakatan yang dibuat melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa.

Untuk pengembalian pinjamannya, para kelompok harus menyetor kepada UPK disertai jasa pinjaman dengan jangka waktu yang telah disepakati. Jika

terjadi peristiwa diluar kemampuan kelompok masyarakat yang menyebabkan terjadinya keadaan yang tidak memungkinkan pengembalian pinjaman atau pemenuhan kewajiban (*Force Majeure*) seperti : adanya kerusuhan, bencana alam, kebakaran, wabah, hama penyakit atau sejenisnya maka tindakan penyelesaiannya diputuskan melalui musyawarah di desa dan antar desa, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan atas kebenarannya.

Sedangkan untuk pembukuan dan rekening pengembalian pinjaman kegiatan ekonomi produktif dengan simpan pinjam bagi kelompok perempuan harus dipisahkan, untuk memudahkan pada waktu akan melakukan perguliran dana. Pada Prinsipnya perguliran dana dari kegiatan UEP dan simpan pinjam perempuan melalui tata cara atau mekanisme yang sama. Hanya bedanya adalah pada sasaran kelompok penerima perguliran. Dana pengembalian kegiatan simpan pinjam hanya digulirkan kepada kelompok simpan pinjam perempuan saja, sedangkan dana pengembalian kegiatan UEP dapat digunakan untuk kegiatan apa saja berdasarkan persetujuan Musyawarah Antar desa.

Untuk melakukan perguliran dana pengembalian pinjaman maka tata cara dan prosedurnya berdasarkan kepada keputusan masyarakat dalam Musyawarah Antar Desa (MAD). Sebelum dilakukan perguliran dana, FK memfasilitasi MAD untuk membuat kesepakatan tentang tata cara dan prosedur perguliran dana pengembalian pinjaman. Tata cara dan prosedur perguliran harus tetap mengacu kepada tujuan, prinsip dan kebijakan dalam PPK. Tata cara dan prosedur yang diputuskan MAD selanjutnya dijadikan dasar kebijakan oleh UPK untuk mengelola dana pinjaman bergulir. UPK harus menyusun teknis operasional pengelolaan kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh MAD, dan selanjutnya melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada MAD.

Hal-hal prinsip yang berlaku dalam melakukan perguliran adalah sebagai berikut :

1. Dana pengembalian dari kegiatan ekonomi produktif merupakan dana milik masyarakat yang harus dikelola secara mandiri oleh masyarakat yang dilakukan oleh UPK, dan dibantu pelaksanaannya oleh TPK. Pengelolaan pengembalian dana pinjaman bergulir oleh UPK didasarkan

atas kebijakan yang ditetapkan oleh MAD. Untuk itu sebelum dilakukan perguliran dana pertama kali, perlu diadakan pertemuan MAD yang akan membahas dan mmenyepakati, aturan pemanfaatan atau aturan-aturan kebijakan lainnya serta tata cara perguliran hasil pengembalian pinjaman dana bergulir sebagai pedoman pengelolaan oleh UPK. Sebelumnya UPK difasilitasi FK menyusun draft dan aturan perguliran berdasarkan potensi dan kondisi pelaksanaan kegiatan UEP oleh kelompok-kelompok penerima kredit sebagai bahan pembahasan dan penetapan aturan pergulirannya. Tata cara dari aturan perguliran yang ditetapkan oleh MAD tetap mengacu kepada prinsip-prinsip, prosedur dan tujuan PPK.

2. Tata cara dan aturan perguliran yang telah ditetapkan MAD disebarluaskan kepada masyarakat secara terbuka.
3. UPK menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan serta status perguliran kepada pertemuan MAD secara berkala (misalnya 3 bulan, 6 bulan, setahun atau beberapa bulan sekali tergantung kesepakatan oleh MAD sendiri). Selain itu juga harus melaporkan perkembangan kegiatan dan kondisi keuangan serta rencana perguliran secara tertulis rutin setiap bulan sekali kepada MAD dan desa-desa melalui kepala desa dan/atau ketua TPK, serta menempelkan pada papan-papan informasi yang telah disediakan.
4. Berdasarkan informasi tentang rencana perguliran yang telah disusun UPK, kelompok-kelompok masyarakat dapat mengajukan usulan kegiatan dengan mengikuti aturan dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh MAD.
5. Prioritas perguliran dana diberikan kepada desa yang mendapatkan dana untuk kegiatan UEP dengan memperhatikan tingkat kelancaran pengembaliannya. Jika kelompok peminjam disuatu desa tidak melunasi pinjamannya pada jangka waktu yang sudah ditentukan (sesuai perjanjiannya) maka desa tersebut tidak sepenuhnya mendapatkan dana perguliran senilai pinjaman yang telah diterima sebelumnya. Sebagai bentuk sanksi bagi desa yang menunggak pengembaliannya maka besar dana yang tidak akan digulirkan ke desa tersebut berdasarkan kesepakatan dalam MAD. Namun jika tingkat pengembaliannya cukup rendah dan

tidak menunjukkan adanya peningkatan pengembalian maka bagi desa tersebut tidak berhak untuk mendapatkan dana PPK tahap berikutnya.

6. Dana pengembalian pinjaman dari usaha ekonomi produktif tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan apapun (*open menu*) berdasarkan keputusan Musyawarah dan MAD.
7. Kegiatan-kegiatan yang pernah diajukan dalam MAD II, sepanjang memenuhi kelayakan dan masih relevan untuk dilaksanakan dapat didanai melalui pengembalian pinjaman asalkan disetujui oleh MAD.

Pelaksanaan kegiatan ini harus berpegang pada beberapa hal prinsip umum yaitu kemudahan, terlembagakan, keberdayaan, pengembangan dan akuntabilitas. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Kemudahan, artinya setiap pengelolaan dana pinjaman bergulir dilakukan secara sederhana dan bisa dimengerti oleh masyarakat luas. Selain itu perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat miskin yang akan mengembangkan peluang usaha untuk mengajukan dan memperoleh persetujuan pemanfaatan dana pinjaman bergulir.
- b. Terlembagakan, artinya tata cara dan prosedur dalam pengelolaan dana pinjaman bergulir diupayakan agar melembaga menjadi suatu sistem yang baku sebagai hasil kesepakatan masyarakat.
- c. Keberdayaan, artinya proses pengelolaan dana dan pengembalian keputusan mengenai pengelolaan dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan upaya menumbuhkan dan meningkatkan sumber daya dan kemampuan masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. Sedangkan pengembangan, artinya setiap keputusan pengelolaan dana modal usaha harus dapat mendorong tercapainya pengembangan modal usaha dan meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat.
- d. Akuntabilitas, artinya setiap pengelolaan dana dan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Adapun kelompok-kelompok yang diperkenankan mengikuti kegiatan ekonomi ini terbuka bagi siapa saja yang berminat mengikutinya, namun demikian lebih diutamakan untuk masyarakat miskin. Kemudian untuk membantu memudahkan pengelolaan dana pinjaman bergulir ada ketentuan dasar yang harus

dipatuhi. Pengajuan usulan kegiatan usaha ekonomi produktif dilakukan oleh kelompok-kelompok yang telah ada di masyarakat. Syarat minimal kelompok yang dapat mengajukan dana pinjaman bergulir yaitu:

- a. memiliki ikatan pemersatu yang jelas, saling mengenal diantara anggota-anggotanya.
- b. mempunyai aktifitas ekonomi atau sosial kemasyarakatan serta ada pertemuan rutin atau berkala diantara anggota-anggotanya.

Kemudian kelompok penerima pinjaman sehat tersebut harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

- a. memiliki pengurus yang dipilih oleh anggota,
- b. semua anggota kelompok memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan rumah tangganya,
- c. memiliki program kerja yang jelas,
- d. memiliki aturan yang disepakati oleh kelompok, dan memiliki administrasi organisasi dan keuangan yang tertib.

Sedangkan untuk kriteria anggota kelompok peminjam adalah:

- a. berkarakter baik
- b. mempunyai potensi usaha yang menguntungkan dan dapat dikembangkan,
- c. mempunyai sumber pendapatan keluarga dan membutuhkan pinjaman untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya,
- d. serta mampu mengembalikan pinjaman dan sanggup bertanggung renteng dengan anggota lainnya.

Untuk usaha yang diajukan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, yaitu:

- a. bisa dilakukan oleh kelompok yang mengusulkan di lokasi yang diusulkan,
- b. ada kemungkinan keuntungan usaha yang cukup sehingga kelompok pengusul masih mendapatkan keuntungan yang layak setelah dikurangi untuk pengembalian pinjaman ditambah jasa pinjaman sesuai kesepakatan bersama.
- c. Kemudian kegiatan yang diusulkan ramah lingkungan, biaya yang dibutuhkan sesuai kebutuhan usaha dan jika ada swadaya untuk

mendukung kegiatan yang disusulkan telah dipastikan nilai atau modal swadaya.

Kemudian dari sekian usaha yang ada akan dikompetisikan atau diperbandingkan baik peluang perkembangan usaha yang ada sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Tugas ini akan dilakukan oleh tim pemeriksa usulan kegiatan yang terdiri dari Fasilitator Kecamatan dibantu Pendamping Lokal. Setelah didapat usaha mana saja yang layak didanai maka tahap selanjutnya adalah pengajuan dana ke BRI oleh pengurus UPK satu hari sebelum pencairan. Setelah itu pengurus memberi informasi ke setiap calon peminjam untuk mengambil dan pinjaman. Pemanfaat pinjaman berkumpul di balai desa untuk mengambil dana pinjaman. TPK atau LPMD dengan didampingi pengurus UPK dan pengurus KSP desa mengambil uang tersebut di BRI yang juga disaksikan oleh FK, UPK dan Kepala Desa. Terakhir dana siap untuk digulirkan kepada kelompok pemanfaat.

Adapun keterlibatan berbagai pihak dalam pengambilan dana ini sesuai dengan asas transparansi atau keterbukaan dalam ketentuan PPK. Sedangkan dana yang digunakan oleh kelompok-kelompok tersebut adalah bersifat pinjaman dan agar pemanfaatan lebih optimal maka dalam kegiatan ekonomi PPK, baik untuk pengelolaan kegiatan usaha ekonomi produktif maupun simpan pinjam bagi kelompok perempuan diberlakukan pembayaran dana tambahan sesuai dengan kesepakatan. Dengan harapan pemanfaatan dana yang ada akan semakin meluas sehingga kesejahteraan masyarakat bisa segera meningkat.

Kemudian agar program ini tidak keluar dari rel yang telah ditentukan dan untuk melihat hasil dari program ini maka diperlukan evaluasi dalam setiap tahap penyelenggaraannya, baik di awal terlebih di akhir program untuk mengukur sejauh mana program ini memberikan kontribusi pada pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan yang bersangkutan pada khususnya, dan secara nasional pada umumnya.

F. EVALUASI

Sebelum mempelajari seluk beluk evaluasi lebih jauh, perlu kiranya diketahui tentang apa dan bagaimana monitoring itu. Karena dalam sebuah

program atau proyek pembangunan, pada umumnya evaluasi dikaitkan dengan monitoring. Keduanya mempunyai kesamaan dalam hal pengukuran atas keberhasilan sebuah program ataupun proyek pembangunan. Mengenai dari sisi atau aspek mana saja, keduanya mempunyai rel masing-masing yang tidak boleh dilanggar satu sama lain, disinilah letak perbedaan keduanya, yang akan dijelaskan secara lebih gamblang kemudian.

Monitoring, menurut Soesilo Zauhar dalam bukunya Administrasi Program dan Proyek Pembangunan(1993:11) adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan untuk mengikuti, mengamati dan melacak jalannya pelaksanaan program dan proyek pembnagunan dengan menggunakan sistem pelaporan dan tujuan langsung ke lokasi agar memperoleh data dan informasi yang jelas serta menghimpun masalah yang ada untuk segera dijadikan alternatif penyelesaian sebagai input penyempurnaan. Sedangkan tujuan dari monitoring sendiri adalah untuk mengetahui dari dekat pelaksanaan pembangunan dan mengidentifikasi tindakan korektif kemudian dimungkinkan untuk pengambilan penyesuaian serta mendukung usaha penyempurnaan.

Monitoring, berdasarkan lapangan atau aspek program amaupun proyek yang dikaji atau diteliti dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu monitoring umum dan monitorinf khusus. Monitoring umum adalah monitoring yang melihat semua kegiatan pembangunan sebagai oyeknya. Semua kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang berupa proyek-proyek dan program-program, maupun kegiatan pembangunan lainnya baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat di daerah, oleh pemerintah daerah sendiri, maupun oleh keduanya secara bersama-sama. Adapun fungsi dari monitoring umum adalah untuk mengamati dan mengawasi secara terus menerus bagaimana hasil guna dan daya guna keseluruhan kegiatan pembangunan tersebut yang secara fungsional dapat menunjang tercapainya tujuan pembangunan. Disamping itu monitoring umum juga berfungsi untuk mengamati apakah penggunaan sumber dana oleh seluruh kegiatan pembangunan tersebut telah sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Obyek monitoring umum adalah semua kegiatan pembangunan baik proyek pusat, proyek APBD Tingkat I, APBD Tingkat II, maupun proyek-proyek

Inpres. Sedangkan sumber-sumber informasi yang mendukung data monitoring umum, menurut Zauhar(1993:12) didapatkan antara lain melalui pihak-pihak sebagai berikut:

1. seluruh Pimpinan proyek sektoral maupun Pimpinan proyek Daerah Tingkat I dan Tingkat II serta Inpres.
2. Bank Rakyat Indonesia.
3. Aparat Pemerintah Daerah selaku pengendali umum.
4. lembaga-lembaga masyarakat atau non pemerintah atau LSM(Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terlibat dalam proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dimaksud.
5. Pihak masyarakat sebagai penerima manfaat proyek, sekaligus sebagai peserta di dalam pelaksanaan proyek-proyek maupun program-program tersebut.
6. Pihak-pihak lain yang dianggap penting dalam pengumpulan informasi.

Monitoring umum dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu umpan balik atau *feed back* (sistem pelaporan), peninjauan lapangan, mengikuti terus umpan balik dan peninjauan lapangan untuk mendapatkan peringatan awal dan evaluasi. Penjelasan dari masing-masing poin tersebut adalah sebagai berikut:

1. umpan balik atau *feed back* (sistem pelaporan).

Di dalam sistem pelaporan ini perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Siapa yang menjadi pemakai utama informasi tersebut.
- b. Siapa yang menjadi pemberi informasi.
- c. Bagaimana arus informasi yang efisien untuk menghindari suatu prosedur yang berbelit-belit.
- d. Waktu penyampaian laporan.
- e. Cakupan isi laporan harus meliputi:

1. pernyataan kebijaksanaan operasional dan langkah-langkah setiap sektor, sub sektor, sebagaimana telah tercantum di dalam Repelita. Pernyataan ini disertai dengan formulasi perkiraan sasaran fisik atau kuantitatif selama lima tahun Repelita. Perkiraan sasaran fisik ini kemudian diperinci menurut rencana pelaksanaan proyek pertahunnya. Dengan demikian terdapat gambaran hubungan antara rencana proyek tahunan selama lima tahun tersebut dengan sasaran yang hendak dicapai dalam kebijaksanaan

dan langkah-langkah sektor yang bersangkutan sudah dituangkan dalam Repelita. Pada gilirannya melihat pula rencana tahunan yang dimaksud dengan realisasi pelaksanaan proyek pada triwulan yang sedang berlangsung.

2. Jumlah proyek yang sedang dilaksanakan pada triwulan yang dimaksud oleh instansi dengan total jumlah biaya proyek-proyek tersebut sehingga dapat terlihat besarnya keseluruhan input yang dimaksud oleh sektor tersebut dalam mekanisme pembangunan.
3. Banyaknya proyek yang siap dan jumlah keseluruhan dari setiap instansi yang dimaksud disertai pula dengan penjelasan mengenai terjadinya proyek yang belum ataupun tidak selesai.
4. Hambatan-hambatan yang terjadi secara umum yang berpengaruh pada kelancaran tugas instansi tersebut dan yang berada di luar jangkauan kewenangan untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut.

2. peninjauan lapangan.

Peninjauan lapangan dilakukan berdasarkan pertimbangan dari pengendali.

Tujuan dilakukannya peninjauan lapangan adalah untuk:

- a. mengamati perkembangan kegiatan pembangunan secara keseluruhan yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak pelaksana teknis pembangunan untuk dikaji apakah sesuai dengan tujuan dan arah serta kebijaksanaan pembangunan yang telah digariskan dalam Repelita.
- b. untuk menguji kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelaksana teknis pembangunan dan atau oleh pimpinan proyek.

Kedua cara ini pada umumnya dipergunakan secara simultan atau secara bergiliran untuk memelihara obyektivitas pengendalian.

3. evaluasi.

Evaluasi yang dimaksud dalam monitoring umum ini adalah evaluasi dalam artian secara umum, yang hanya dilakukan berdasarkan waktu-waktu tertentu atau yang sudah ditentukan. Misalnya saja selama pelaksanaan program maupun proyek pembangunan yang dimaksud perlu dilakukan beberapa evaluasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan

masih relevan dengan tujuan dan saran-saran pembangunan yang telah ditetapkan.

Sedangkan yang dimaksud sebagai monitoring proyek adalah monitoring yang melihat kegiatan-kegiatan dalam suatu proyek sebagai obyek. Monitoring proyek mempunyai fungsi yaitu mengamati dan mengawasi secara terus-menerus bagaimana hasil guna dan daya guna kegiatan-kegiatan tersebut dalam hubungannya dengan penggunaan input proyek, untuk mencapai hasil proyek yang diharapkan. monitoring ini juga berfungsi untuk mengamati apakah pelaksanaan kegiatan proyek sudah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk memudahkan pengendalian maka kegiatan monitoring terhadap setiap proyek yang telah disetujui harus dilengkapi dengan suatu kerangka proyek yang menggambarkan:

a. hierarki harapan yang hendak dicapai dari suatu proyek yang terdiri dari:

1. Tujuan Program

Tujuan program ialah sasaran yang berada dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan dimana proyek memberikan sumbnagan bagi tercapainya sasaran.

2. Tujuan Fungsional Proyek

Tujuan fungsional atau maksud diselenggarakannya proyek adalah merupakan sasaran yang berada dalam tujuan program dimana keluaran-keluaran dalam proyek memberikan sumbangan bagi terciptanya sasaran tersebut. Tujuan fungsional proyek dinyatakan pula sebagai alasan utama diadakannya suatu proyek serta merupakan status akhir proyek. Pengisian tujuan fungsional dapat diisi bersama antara Bappekab dengan penanggungjawab program atau proyek.

3. Keluaran Proyek (*Out Put*)

Hasil akhir atau sasaran fisik proyek adalah hasil terperinci yang diharapkan dapat dihasilkan dari pengelolaan sumber proyek yang berarti adanya kegiatan-kegiatan dalam proyek, hasil akhir ini diisi oleh pimpinan proyek.

4. Masukan Proyek (*In Put*)

Masukan proyek adalah segala sumber baik sumber daya, manusia, mesin, dana dan metode yang khusus diadakan untuk dapat diolah dan diorganisir sehingga menimbulkan

- b. indikator-indikator yang diperlukan sebagai bukti pengukuran kemajuan tiap-tiap hierarki dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan pula unsur evaluasi yang penting dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.
- c. alat bukti indikator, yaitu teknik atau cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, pengolahan dan analisa data dalam rangka membuktikan kebenaran-kebenaran indikator yang telah dicapai. Data yang dikumpulkan dapat bersifat internal dan eksternal.
- d. faktor ketidakpastian adalah asumsi yang harus ditetapkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang berada di luar jangkauan manajemen proyek, yaitu faktor-faktor yang harus diidentifikasi sebelum proyek dilaksanakan. Faktor-faktor ini menunjang tercapainya sumber proyek, hasil akhir proyek, tujuan fungsional proyek dan tujuan program. Keberhasilan dari keseluruhan tujuan program tidak hanya ditentukan oleh eksistensi faktor-faktor internal proyek tetapi juga ditentukan pula oleh faktor-faktor eksternal yang berada di luar kontrol pengelola proyek. Melalui sistem perencanaan dan pengelolaan proyek terpadu maka faktor-faktor ketidakpastian tersebut dapat diusahakan dalam menunjang kesuksesan proyek.

Sama halnya dengan monitoring umum, monitoring proyek juga dapat pula dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. umpan balik(sistem pelaporan)

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sistem pelaporan ini adalah:

1. siapa yang menjadi pemakai utama informasi monitoring proyek tersebut.
2. siapa pula pemberi informasi utama. Secara berturut-turut dapat disebut secara berjenjang adalah: Pelaksana Teknis, Pimpinan Proyek, Kepala Dinas/Instansi, Departemen teknis sesuai bidang tugasnya.
3. waktu penyampaian laporan atau kegiatan monitoring.
4. isi pelaporan menyebutkan:
 - a. tujuan fungsional proyek, sasaran-sasarannya dan faktor ketidakpastian seperti tercantum dalam kerangka proyek.
 - b. hasil proyek(realisasi proyek).
 - c. total biaya proyek.
 - d. realisasi keuangan proyek.

- e. kegiatan-kegiatan kritis seperti tercantum dalam bagian penjadwalan proyek.
- f. kegiatan-kegiatan penting lainnya yang tidak tercantum dalam bagian penjadwalan proyek tetapi dianggap penting oleh pelaksana teknis di lapangan untuk dilaporkan sebagai data tambahan bagi kegiatan monitoring.
- g. hambatan-hambatan yang berada di luar kemampuan pelaksana teknis, juga disebutkan sebab-sebab terjadinya hambatan tersebut.

b. Peninjauan lapangan

Peninjauan lapangan bertujuan untuk:

1. mengamati perkembangan pelaksanaan proyek.
2. menguji kebenaran laporan yang telah disampaikan oleh pelaksana teknis.

c. Mengikuti terus hasil umpan balik dan peninjauan lapangan untuk mendapatkan peringatan awal (*Early Warning System*).

d. Evaluasi

Dilakukan tergantung kebutuhan apakah setiap 3 bulan, kuartal atau pada waktu-waktu tertentu yang sudah ditetapkan, guna mengkaji sejauhmana sasaran dan tujuan fungsional proyek tersebut telah tercapai.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa monitoring merupakan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan program dan proyek pembangunan melalui metode observasi dan sistem pelaporan guna menghasilkan input penyempurnaan. Berdasarkan lingkupnya monitoring digolongkan menjadi monitoring umum dan monitoring khusus. Adapun kesamaannya terletak pada cara yang digunakan dalam monitoring yaitu umpan balik, peninjauan lapangan, Early Warning System, dan evaluasi.

Dari uraian tersebut di atas, sempat disinggung mengenai evaluasi secara umum. Pada dasarnya evaluasi sendiri dimaknai sebagai suatu cara dengan metode tertentu yang digunakan untuk menentukan bahwa sebuah program dilaksanakan sesuai dengan tujuannya yang disertai dengan bukti- bukti obyektif, sistematis dan komprehensif, seperti yang dikemukakan oleh Jenkins(Solichin, 1997:23). Dari aspek tersebut evaluasi secara umum, memiliki kesamaan dengan pengertian monitoring.

Adapun fungsi evaluasi secara umum adalah :

1. Sebagai kemudi manajemen.

Hasil-hasil yang diperoleh dari evaluasi akan menjadi umpan balik atau feed back dan memungkinkan manajemen mengendalikan proyek tetap pada relnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu mengenai bagaimana sebaiknya program/proyek dioperasikan.

2. Evaluasi dapat mengemban fungsi kontrol dan inspeksi.

Dalam artian bahwa ia dapat digunakan untuk menginformasikan kepada pimpinan puncak/negara donor, apakah kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan dalam dokumen proyek telah dilaksanakan dengan semestinya dan menunjukkan hasil-hasil yang diharapkan.

3. Evaluasi dapat mengemban fungsi akuntabilitas.

Hal ini dikarenakan ia memberikan informasi dan atas dasar informasi tersebut pihak-pihak yang berkepentingan (DPR, penyandang dana, pembayar pajak) dapat menilai apakah dana yang disediakan telah digunakan dengan benar.

4. Evaluasi dapat memastikan kepenasehatan.

Dalam artian bahwa hasil-hasil evaluasi akan dapat digunakan untuk mendapatkan dana yang lebih banyak guna mendanai proyek tersebut maupun proyek-proyek di masa yang akan datang (Solichin, 1997:12).

Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai proyek secara keseluruhan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja berikut dampaknya. Kegiatan ini mencakup kegiatan memperbandingkan informasi yang ada di luar proyek, baik berdasarkan dimensi waktu, wilayah dan kelompok sasarannya, yaitu:

- a. Menguji rasionalitas proyek secara kritis
- b. Menentukan tingkat kecukupan proyek untuk mengatasi kendala, dan mempromosikan perubahan-perubahan yang dikehendaki.
- c. Membandingkan pencapaian nyata dengan sasaran dan identifikasi kekurangan atau kelebihan yang dicapai.
- d. Menguji efisiensi prosedur pelaksanaan dan kualitas kinerja manajemen.
- e. Menentukan efisiensi ekonomis program.
- f. Menentukan akibat dan dampak program.

g. Menyajikan pelajaran-pelajaran yang diperoleh dan mengusulkan saran tindaklanjutnya (Casey &Kumar, 1990)

Evaluasi, berdasarkan waktunya dapat dilakukan selama pelaksanaan proyek maupun selarna operasi proyek tersebut berjalan. Oleh karena itu ada tiga bentuk evaluasi ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya. Masing-masing adalah evaluasi *ex-ante* (evaluasi pra pelaksanaan), *on-going* evaluasi (evaluasi selama masa pelaksanaan) dan *ex-post* evaluasi (evaluasi setelah masa pelaksanaan). Evaluasi *ex-ante* dilakukan sebelum pekerjaan/program dimulai, dengan menyusun rencana kerja yang terdiri dari kebijaksanaan, prosedur dan peraturan, sebagai upaya preventif atau pencegahan kerugian yang mungkin terjadi. *On-going evaluation* atau sering juga disebut *current evaluation*, adalah suatu analisa mengenai input, output dan akibat selama pekerjaan sedang dalam pelaksanaan. Maksudnya adalah untuk menyediakan dasar yang kontinyu untuk menguji (asses) dan (bila perlu) menyesuaikan kebijaksanaan, tujuan dan pengaturan kelembagaan serta sumberdaya yang mempengaruhi proses pelaksanaan.

Sedangkan *ex-post* evaluasi adalah analisa setelah penyelesaian program, yaitu suatu proses penilaian mengenai akibat dan dampak proyek. Maksud evaluasi ini adalah untuk menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan pada masa berikutnya. Evaluasi pada tahap ini mempunyai ciri ternuan yang dikembangkan berdasarkan atas perbandingan kondisi (apa yang ada) dengan kriteria (apa yang seharusnya ada), serta penentuan sebab-sebab (kenapa terjadi penyimpangan), dan akibat penyimpangan (apa yang terjadi atau akan terjadi).

Dalam pandangan tersebut evaluasi dikaitkan dengan kerangka logis yaitu:

Tabel 1
 Kerangka Logis Evaluasi

Tujuan yang dapat diukur			
Input/ masukan	Output / keluaran	Effect / Akibat	Impact / Dampak
<ul style="list-style-type: none"> - Dana - Alat - Tenaga - Kegiatan - Waktu 	Hasil kegiatan dari penggunaan masukan	Akibat sebagai manfaat dari output	Dampak sosial – ekonomi pada masyarakat
Input Proyek		Hasil dari Output	

Sumber: Simatupang (1990)

Secara definitif, masukan/input adalah segala sumberdaya manusia, mesin, dana dan metoda yang khusus diadakan untuk dapat diolah dan diorganisir sehingga menimbulkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menciptakan hasil akhir proyek. Keluaran/output adalah hasil terperinci yang diharapkan dapat menghasilkan dari pengelolaan sumber proyek, berarti merupakan hasil dari kegiatan-kegiatan proyek. Akibat atau sering disebut juga sebagai tujuan fungsional, adalah sasaran yang berada pada tujuan program dimana keluaran-keluaran dari proyek memberikan sumbangan bagi tercapainya sasaran tersebut. Dan dampak atau tujuan akhir adalah sasaran yang berada dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dimana proyek memberikan sumbangan-sumbangan bagi tercapainya sasaran. Pada umumnya tujuan program ini menangani permasalahan umum dan luas di bidang-bidang ekonomi, sosial dan budaya (Simatupang, 1990).

Berarti secara garis besar, evaluasi dapat dilakukan pada proses (dititik beratkan pada konsistensi program) dan hasil program (untuk mengetahui apakah program telah memberikan dampak yang diinginkan). Implikasi dari evaluasi terhadap proses adalah konsistensi program terhadap dokumen-dokumen maupun prosedur program serta efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Sedangkan evaluasi hasil melihat sejauh mana kemampuan program dalam menjangkau kepentingan sasaran, komponen yang dominan dalam menghasilkan sesuatu dan dampak program itu sendiri atau dikenal dengan evaluasi dampak. Evaluasi

dampak disamping harus dilakukan dengan kerangka berfikir kausalitas yang kritis dan wawasan yang komprehensif juga harus dilakukan secara cermat. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk membantu kecermatan dalam evaluasi, dapat dipilahkan adanya 4 macam dimensi dampak yang penting untuk diperhatikan, yaitu:

a. Waktu

Suatu program dapat menimbulkan dampak segera maupun dampak jangka panjang. Studi evaluasi sebaiknya dilakukan tidak lama setelah program usai, karena ada kemungkinan dampak yang diharapkan muncul pada jangka panjang ternyata muncul segera setelah program berakhir. Hal ini tentunya berpengaruh pada pengambilan langkah berikutnya. Jika penulisan terlambat dilakukan maka evaluator akan kesulitan mencari data dan menelusik pengaruh program yang diamatinya.

b. Selisih antara dampak actual yang diharapkan

Evaluator tidak saja dianjurkan untuk melihat efektivitas program tetapi juga melihat berbagai dampak yang tidak diinginkan, dampak yang hanya sebagian saja yang diinginkan dan dampak yang sama sekali bertentangan dengan dampak yang diinginkan.

c. Tingkat agregasi dampak

Dampak juga bersifat agregatif, dalam arti dampak yang dirasakan secara individual mungkin akan merembes pada, perubahan masyarakat di suatu desa.

d. Jenis dampak

Dampak dapat menyentuh aspek ekonomi maupun politik dari suatu unit social. Suatu program tidak hanya mensejahterakan sekelompok masyarakat dan menyengsarakan kelompok minoritas, melainkan dapat berpengaruh terhadap system nilai masyarakat yang pada akhirnya, meskipun tidak secara radikal akan mengubah proses politik secara keseluruhan (Wibawa, 1994:38)

Sedangkan model evaluasi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu model *before and after* dan perbandingan. Maksudnya model *before and after* adalah evaluasi yang dilakukan dengan membandingkan dampak program sebelum (*before*) dan sesudah (*after*) program tersebut dilaksanakan sehingga akan memperoleh informasi apakah program tersebut memberikan manfaat setelah proyek itu

dilaksanakan. Kemudian yang ke dua adalah model *with and without*, yaitu model evaluasi yang membandingkan daerah yang dibangun dengan bantuan program dan daerah yang tidak mendapatkan bantuan program dalam waktu bersamaan.

Kemudian untuk ruang lingkup evaluasi dampak, meliputi dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung diteliti melalui beberapa langkah, yaitu:

1. menspesifikkan tujuan
2. menspesifikkan target group (siapa), berapa banyak, dan lokasinya/cakupan wilayahnya (dimana).
3. mendaftar dan meninjau kembali indikator potensial.
4. mengumpulkan dan menganalisis data.

Sedangkan untuk dampak tidak langsung, kategori yang umum dikenal yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan (Soekartawi, 1987).

Dengan membandingkan kedua uraian tersebut, yaitu mengenai monitoring dan evaluasi dapat diketahui ciri-ciri yang khas dari masing-masing pengawasan tersebut. Bila monitoring merupakan proses pengukuran yang berusaha menentukan apakah yang telah atau belum terjadi atau tercapai pada suatu tahap pelaksanaan proyek selama proyek sedang berjalan, maka evaluasi proyek merupakan proses pengukuran atau pengenalan yang berusaha untuk menentukan mengapa kejadian dalam pelaksanaan tingkat keluaran proyek belum atau telah tercapai. Tujuan pokok evaluasi adalah status akhir proyek yang akan menjadi landasan untuk meningkatkan atau mengadakan perbaikan kebijaksanaan tentang proyek maupun program pembangunan berikutnya.

Dengan demikian maka, monitoring dan evaluasi merupakan dua macam penilaian yang saling berkaitan dan mempunyai hubungan yang erat dalam pelaksanaan proyek maupun program pembangunan. Adapun perbedaannya secara mendasar dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2
Perbedaan Dasar Monitoring dan Evaluasi

No.	Aspek	Monitoring	Evaluasi
1	Waktu dan tahap pelaksanaan	Proyek sedang berjalan	Pada status akhir proyek
2	Tingkat hierarki harapan	Tingkat keluaran	Tingkat tujuan fungsional
3	Sifat informasi yang dibutuhkan	Selektif, tertentu yang menentukan penyimpangan yang kritis dari jadwal pelaksanaan	Menyeluruh dan bergantung pada kegiatan pengendalian
4	Sifat kebijaksanaan	Korektif, segera dilaporkan	Memandang ke depan pada proyek dan program lanjutan atau berikutnya untuk direncanakan
5	Metode analisis	Perbandingan antara pencapaian dan rencana	Perbandingan antara yang diharapkan dan dampak sepenuhnya; pola perubahan, yaitu antara sebelum adanya dan sesudah proyek
6	Orientasi kegiatan	Diarahkan kepada pengelola proyek (<i>project oriented</i>): untuk memperbaiki penyimpangan yang dihadapi selama pelaksanaan proyek supaya proyek itu bisa memberi keuntungan kepada kelompok sasarannya.	Diarahkan kepada kelompok sasaran (<i>target group oriented</i>): untuk menghitung keuntungan proyek yang diperoleh kelompok.

Sumber: Soesilo Zauhar(1993:17).

Dari tabel tersebut dapat terbaca dengan jelas bahwa antara monitoring dan evaluasi mempunyai perbedaan dalam 6 aspek yaitu waktu dan tahap

penyelenggaraan penilaian terhadap program maupun proyek, tingkat hierarki harapan yang diuji derajat kesesuaiannya antara apa yang telah tertulis di atas kertas dengan apa yang terjadi di lapangan, sifat informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penilaian, sifat kebijaksanaan yang diambil dari hasil penilaian pengawasan, metode yang digunakan dalam menyelenggarakan pengawasan dan arahan orientasi kegiatan. Tentu saja tujuan utama dari masing-masing pengawasan tersebut, baik monitoring maupun evaluasi yang terutama menghasilkan perbedaan aspek tersebut. Seluruh item-item aspek tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dimana tingkat harapan yang akan diuji derajat kesesuaiannya antara apa yang telah tertulis di atas kertas dengan apa yang terjadi di lapangan, menentukan waktu dilakukannya penilaian yang dimaksud. Karena tingkat hierarki yang dimaksud dalam masing-masing pengawasan menuntut perbedaan waktu pengujian, sebab masing-masing tingkat hierarki hanya dapat diukur pada waktu-waktu tertentu.

Kemudian sifat kebijaksanaan yang diambil dari hasil penilaian yang dijadikan input perbaikan program atau proyek menentukan sifat informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penilaian tersebut. Sedangkan orientasi kegiatan penilaian yang akan dilakukan berikut metode analisis yang digunakan sangat ditentukan oleh sistem penilaian atau pengukuran apa yang akan dipakai apakah monitoring ataukah evaluasi.

Dengan melihat perbedaan antara monitoring dan evaluasi tersebut maka penilaian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam evaluasi yang dilakukan pada status akhir kegiatan usaha ekonomi produktif di desa Mendalanwangi, kecamatan Wagir, kabupaten Malang, Phase II yang berakhir 2004, dan diteliti pada 2005. Dimana tingkat herarki harapan yang dimaksud adalah pada tujuan fungsional PPK pada umumnya, yaitu peningkatan partisipasi masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan melestarikan kegiatan usaha ekonomi produktif secara khusus, peningkatan lapangan kerja dan peningkatan kemampuan lembaga dan aparat di tingkat desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan cara yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian. Dengan metodologi penelitian, penelitian yang dilakukan dimaksudkan dapat berjalan sesuai dengan prosedur bagaimana penelitian itu dilaksanakan. Penelitian adalah kegiatan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan dan menginventarisir data. Metodologi penelitian menurut Nazir (1988 : 51) mempunyai fungsi untuk membantu penelitian.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis akan berusaha memberikan gambaran secara tepat dan jelas mengenai sifat/keadaan, situasi dan kondisi, gejala, dan perkembangannya serta hubungan antara objek penelitian dengan gejala masyarakat lainnya.

Sebagaimana yang diungkapkan Nazir (1988 : 63) tentang metodologi penelitian deskriptif, yaitu Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran/lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian deskriptif kualitatif ini sesuai untuk dipakai meneliti dampak PPK yang akan ditelusuri oleh penulis yaitu kesejahteraan. Karena dibutuhkan uraian naratif yang dapat menjawab permasalahan secara sistematis dan logis (Nasir:1999).

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif, penentuan batas berdasarkan fokus yang timbul dalam masalah penelitian sangatlah penting. Penentuan ini akan sangat membantu dalam proses pelaksanaan penelitian. Dengan penentuan fokus penelitian secara tepat sesuai dengan tujuan penelitian maka penelitian yang dilaksanakan akan bisa, lebih terarah sehingga memperoleh hasil penelitian seperti yang diharapkan.

Menurut Moleong (2000 : 237) penentuan fokus suatu penelitian mempunyai dua tujuan yaitu:

1. Membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat pelaksanaan menjadi lebih layak.
2. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-inklusi untuk menyaring info yang masuk.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil pelaksanaan kegiatan ekonomi PPK Phase II di desa Mendalanwangi, sebagai salah satu desa penerima bantuan PPK Phase II di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang yang berupa :
 - a. partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, dilihat dari kehadiran masyarakat dalam forum-forum musyawarah kegiatan usaha ekonomi produktif, keikutsertaan sebagai anggota dalam kegiatan usaha ekonomi produktif.
 - b. lapangan kerja baru, dilihat dari adanya lapangan kerja baru di masyarakat setelah dilakukannya kegiatan usaha ekonomi produktif.
 - c. pengembangan usaha masyarakat, dilihat dari ada atau tidaknya pengembangan usaha masyarakat baik secara individu maupun kelompok dari segi ragam atau jenis usaha dan terutama dari segi pengembangan pasar.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat penerima PPK Phase II di Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang pasca penyelenggaraan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif, berupa:
 - a. Ada atau tidaknya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
 - b. Ada atau tidaknya peningkatan kemampuan lembaga dan aparat Desa untuk mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat desa.
 - c. Ada atau tidaknya penurunan jumlah penduduk miskin desa Mendalanwangi.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Mendalanwangi, Kecamatan

Wagir, sebagai pelaksana Program Pengembangan Kecamatan Yang berhasil di Kabupaten Malang.

Sedangkan situs penelitian menunjuk pada letak/site dimana penulis menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti (Irwan Noor, 1997:14). Situs penelitian ini adalah

1. Kantor Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang..
2. BPS Kabupaten Malang.
3. Kantor PPK Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.
4. Kantor PLKB Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.
5. Kantor Desa Mendalanwangi.
6. Kantor KSP Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.
7. Masyarakat Desa Mendalanwangi Penerima bantuan kegiatan ekonomi PPK Phase II Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam proses pencarian data, perlu dibatasi dengan mempersempit permasalahan utama. Pembatasan ini dilakukan agar kita mendapatkan data yang relevan dari orang-orang yang menjadi objek penelitian. Penulis mengklasifikasikan data berdasar sumbernya sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu data-data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya berupa data-data dan tindakan orang yang diamati/diwawancarai, antara lain:

- a. PJOK PPK Phase II Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.
- b. Mantri statistik Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.
- c. Ketua UPK PPK Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.
- d. Pengurus PLKB Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang
- e. Kepala Desa Mendalanwangi.
- f. Ketua TPK PPK Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.
- g. Ketua KSP Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, beserta staff.

- h. Masyarakat Desa Mendalanwangi Penerima bantuan kegiatan ekonomni PPK Phase H kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

2. Data Sekunder

Merupakan data tertulis yang diperoleh dari dokumen/buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan terna penelitian dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan. dngan menggunakan beberapa metode yang penggunaannya akan disesuaikan dengan jenis dan sifat data yang diperoleh. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh benar-benar objektif dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara penelitian lapang menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara.

Wawancara adalah usaha untuk memperoleh data atau infoermasi secara langsung guna mendapatkan data yang berkaitan dengan subyek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Dalam wawancara ini menggunakan pokok-pokok pertanyaan sebagai acuan. Penggunaan panduan wawancara ini dimaksudkan agar permasalahan yang diteliti dapat tercakup seluruhnya dan peneliti tidak sampai terjebak pada permasalahan yang tidak perlu. Dalam penelitian ini pengumpulan data melalui teknik wawancara dilakukan oleh penulis dengan beberapa pihak sebagai berikut:

- a. PJOK PPK Phase II Kabupaten Malang, yaitu Bapak Hawi.
- b. Mantri statistik Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang yaitu Bapak Ardiono.
- c. Kepala Desa Mendalanwangi yaitu Bapak Subakir.
- d. Ketua KSP Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, yaitu Bapak Boimin beserta staff.
- e. Masyarakat Desa Mendalanwangi Penerima atau pemanfaat bantuan kegiatan ekonomni PPK Phase II kecamatan Wagir, Kabupaten Malang sejumlah 19 orang.

2. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen/arsip-arsip dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Menurut Guba Lincoln (Moleong 2000:161) dokumen berguna untuk keperluan penelitian karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan berguna pula sebagai bukti untuk suatu pengujian serta mempunyai sifat yang alamiah sesuai dengan konteks (lahir dan berada, dalam konteks).

3. *Observasi*

Adalah pengumpulan data di lapang dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Penggunaan teknik ini akan membantu saat peneliti merasa ragu-ragu dengan data yang diteliti. Peneliti dapat memperoleh satu kebenaran yang berasal dari pengamatan sendiri.

F. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dapat dilepaskan dari pengamatan langsung, karena peneliti ingin mengetahui secara langsung kebenaran data yang diperolehnya. Oleh karena itu, manusia dalam hal ini adalah penulis sendiri, merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif, sebab manusia dapat menyesuaikan diri dengan situasi dalam lokasi penelitian. Disamping itu, manusia juga sangat peka terhadap fenomena yang terjadi. Kedudukan manusia dapat sebagai perencana, pengumpul data sampai dalam proses menganalisis data. Berdasarkan teknik pengumpulan data tersebut, maka digunakan instrumen penelitian, antara lain:

1. Peneliti sendiri, berhubungan dengan indera penglihatan, pendengaran dan pemikiran objektif peneliti.
2. *Interview guide* yang digunakan sebagai pedoman dan pengarah dalam melakukan wawancara.
3. Alat tulis serta buku catatan/laporan sebagai sarana mencatat semua informasi yang diperoleh.
4. Dokumen pelaksanaan PPK.

G. Analisa Data

Setelah data diperoleh, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisa. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan fenomena di lapang serta mengungkap fakta-fakta yang ditemui peneliti pada saat di lapang secara sistematis dan akurat. Peneliti dalam menganalisa data berpedoman pada pandangan Miles dan Huberman (1992:16) bahwa analisa kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Bahwa analisis kualitatif dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama antara lain reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. *Reduksi data.*

Data yang diperoleh di lapang disusun rapi, terperinci dan sistematis. Setiap selesai mengumpulkan data, data tersebut perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan penelitian. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan. Misalnya wawancara digabungkan dengan hasil observasi.

2. *Penyajian data*

Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui cara ini diharapkan dapat diputuskan dengan tepat apa harus lebih jauh menganalisa ataukah mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data.

Beberapa data yang biasa disajikan dalam penelitian kualitatif berbentuk matriks dan grafik. Semuanya dirancang guna menggabungkan info yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dimengerti.

3. *Penarikan kesimpulan/verifikasi data*

Adalah upaya pencarian arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, akar sebab akibat dan proposisi dari data-data yang telah ditemui di lapang. Kesimpulan tersebut mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kurnpulan catatan di lapangan, pengkodeannya, penyimpanan dan

metode pencarian ulang yang digambarkan. Kecakapan peneliti dan tuntutan pemberi dana, tetapi seringkali menuntut kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya (sejak awal), sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya secara induktif (Miles & Huberman, 1992).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

A.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa Mendalanwangi yang bernaung di bawah Kecamatan Wagir. Wilayah kecamatan ini terletak di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur. Berjarak 12 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Malang dan 115 km dari pusat pemerintahan propinsi Jawa Timur. Sedangkan wilayah sekitarnya yang berbatasan dengan Kecamatan Wagir adalah sebagai berikut:

sebelah utara : Kecamatan Dau.

sebelah selatan : Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Ngajum.

sebelah timur : Kotamadya Malang,

sebelah barat : Kabupaten Blitar.

Selain ketiga desa tersebut, masih ada 9 desa lagi yang termasuk dalam wilayah kecamatan Wagir, yaitu Pandan landung, Jedong, Dalisodo, Sidorahayu, Parangargo, Sukodadi, Petungsewu dan Summersuko. Untuk bantuan dana PPK Kecamatan Mendalanwangi telah mendapat bantuan PPK selama 2 periode. Pada PPK Phase II ini, dari 12 desa, hanya 9 desa yang mendapat bantuan. satu diantaranya dicabut bantuannya karena pembayaran angsuran kelompok ke UPK tidak lancar. 3 desa lainnya tidak diikuti karena pada tahun yang sama ketiga desa tersebut telah mendapatkan program lain yaitu P2KP.

A.1.1 Kondisi Geografis

Batas wilayah desa Mendalanwangi adalah:

sebelah utara : desa Sitirejo, Kecamatan Wagir,

sebelah selatan : desa Wadung, Kecamatan Pakisaji,

sebelah barat : desa Summersuko, Kecamatan Wagir,

sebelah timur : desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji.

Untuk peta desa Mendalanwangi dapat disimak di lampiran 1.

Desa ini terletak di km 4 dari Kotamadya dengan waktu tempuh $\frac{1}{2}$ jam jika menggunakan jasa angkutan umum atau mikrolet. Selain angkutan tersebut, masih ada sarana transportasi lain yang biasa digunakan untuk keluar-masuk Kecamatan ini, yaitu ojek. Dilihat dari kondisi geografisnya, desa ini bukanlah desa terpencil, apalagi dengan tersedianya angkutan umum yang dapat menjangkau semua bagian desa ini dan dapat mengantar penduduk desa secara mudah, baik ke ibu kota Kecamatan maupun ibu kota Kabupaten semakin membuka peluang akses perkembangan kota ke desa.

A.1.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk desa Mendalanwangi, berdasarkan hasil data yang diolah dalam data "Kecamatan Wagir dalam Angka" pada tahun 2001 adalah sejumlah 7.095 jiwa atau 1.557 keluarga, dengan rata-rata banyaknya anggota dalam sebuah keluarga adalah 4 orang(lampiran 2). Dan pada tahun 2005 jumlah penduduk desa Mendalanwangi adalah 7.078 jiwa atau 1.580 keluarga, dengan rata-rata banyaknya anggota dalam sebuah keluarga adalah 4 orang(lampiran 3). Berarti ada penurunan jumlah penduduk pada tahun 2005 jika dibandingkan dengan tahun 2001 sebanyak 17 jiwa.

Adapun jumlah keluarga miskin atau keluarga pra sejahtera di desa tersebut pada tahun 2001 adalah 386 keluarga atau 1.544 jiwa dan pada tahun 2005 terdapat 190 keluarga pra sejahtera atau 760 jiwa (lampiran 4 dan 5). Sedangkan prosentase pengangguran di desa Mendalanwangi pada tahun 2001 adalah 598 jiwa atau 8,43% dari total jumlah penduduk dan pada tahun 2005 jumlah pengangguran tersebut menjadi 520 jiwa atau 7,35 % dari total jumlah penduduk sebagaimana yang dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Malang dalam Kecamatan Wagir Dalam Angka tahun 2001 dan 2005(lampiran 6 dan 7). Dari data jumlah keluarga pra sejahtera tersebut didapat penurunan jumlah penduduk pra sejahtera sejumlah 784 jiwa. Kemudian untuk data jumlah pengangguran juga didapat penurunan yaitu sebanyak 78 jiwa.

Sebelum adanya PPK pada umumnya mata pencaharian masyarakat Mendalanwangi adalah pada sektor agraris saja. Sedangkan beternak dan berniaga masih dikerjakan oleh sedikit orang. Hal ini dipengaruhi oleh letak

pasar yang cukup jauh serta minimnya modal untuk mengembangkan usaha. Namun pada perjalannya karena sektor besar yang dikerjakan masyarakat setempat (agraris) kurang menjanjikan karena kenaikan harga pupuk yang tidak kunjung imbang dengan harga gabah, maka banyak masyarakat yang berpindah ke sektor niaga sebagai wiraswasta. Selain itu sebagian besar masyarakat yang bekerja di sektor agraris adalah bukan pemilik lahan atau sawah tetapi pekerja atau buruh yang bekerja secara musiman, yang sebagian besar bekerja pada saat-saat tertentu yaitu musim tanam dan panen.

Saat ini banyak warga yang berpindah sektor pekerjaan baik secara total maupun menjadikannya sebagai pekerjaan ke dua. Pembangunan pasar serta pinjaman modal dari PPK membuka lahan usaha baru serta kemudahan dalam melakukan transaksi ekonomi. Banyak diantaranya yang kemudian menjadi pedagang di pasar baru mendalanwangi baik dalam skala kecil maupun besar. Hal ini tentunya berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat yang berefek pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat pada penurunan jumlah keluarga miskin di desa Mendalanwangi.

1.3 Kondisi Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan PPK, aparatur pemerintahan desa mempunyai peran yang cukup signifikan baik dalam sosialisasi maupun dalam menciptakan keterbukaan dan kelancaran serta keberhasilan PPK. Desa Mendalanwangi diperintah oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Kesejahteraan Rakyat, Kaur Keuangan, Kaur umum dan Kepala dusun/lingkungan. Dimana kedudukan dari perangkat desa tersebut dapat dilihat pada lampiran 2.

Selain struktur tersebut, di desa ini juga terdapat lembaga desa yang lain yaitu LPMD dan BPD. Untuk Phase II ini, baik LPMD atau yang sekarang dikenal dengan LPMD maupun BPD, tidak terlibat secara kelembagaan dalam kegiatan-kegiatan PPK. Jadi keterlibatannya merupakan keterlibatan personal, bukan atas nama lembaga. Struktur keduanya dapat dilihat pada lampiran 8.

A.2. Hasil Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif PPK Phase II

A.2.1. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan

Sejak awal yaitu Phase I, sesuai dengan PTO, penyelenggara PPK di desa Mendalanwangi telah melibatkan peran masyarakat, tidak terkecuali kegiatan ekonomi. Partisipasi masyarakat Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir dalam pelaksanaan kegiatan baik dari segi penyelenggaraan maupun pelestarian kegiatan usaha ekonomi produktif ini berasal dari seluruh kalangan, baik penduduk Desa Mendalanwangi terutama masyarakat para sejahtera, tokoh masyarakat, maupun dari lembaga desa. Adapun bentuk partisipasi masyarakat bisa kita lihat dari peran serta masyarakat dalam:

A.2.1.a Kehadiran masyarakat dalam forum-forum kegiatan usaha ekonomi produktif

Setelah dilaksanakan di tingkat kecamatan, sosialisasi PPK juga diadakan di tingkat desa termasuk di Desa Mendalanwangi. Selain dihadiri oleh camat, PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan), Muspika serta organisasi setempat, para perangkat desa dan ketua LPMD juga menghadiri forum UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan) yang difasilitasi oleh fasilitator kecamatan bersama kasi BPD serta konsultan manajemen kabupaten. Dalam forum tersebut dijelaskan mengenai PPK, baik pengertian, pelaksanaan, pendanaan, maupun pembiayaannya. Sedangkan pada Phase II, forum tersebut tidak lagi mensosialisasikan pengertian atau penjelasan dasar lainnya tentang PPK tetapi membahas program PPK selanjutnya. Pada phase II ini tidak seluruh desa yang mendapat bantuan. Mendalanwangi adalah salah satu diantara 9 desa di kecamatan Wagir yang berkesempatan menikmati lagi bantuan bergulir dari PPK. Sebagaimana pernyataan Pak Bentot, selaku ketua LPMD Desa Mendalanwangi, yaitu:

”sosialisasi PPK bermula di kabupaten, terus turun ke kecamatan-kecamatan. Setelah itu ada sosialisasi di kecamatan melalui forum UDKP. Pada UDKP Phase I di situ dijelaskan kalau seluruh desa di kecamatan Wagir mendapat dana bantuan PPK. Tetapi pada Phase II ini hanya 9 desa yang mendapat bantuan. Satu tidak dapat karena angsurannya bermasalah, tiga desa yang lain sudah dapat P2KP. Mendalanwangi termasuk yang dapat.”(wawancara, 16 Juni 2005).

Untuk bisa masuk dalam daftar desa penerima bantuan bergulir tersebut, selain harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam ketentuan PPK, sebuah desa tidak boleh mempunyai catatan buruk yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan PPK tahap selanjutnya. Demikian diungkapkan Kepala Desa Mendalanwangi:

”desa Mendalanwangi termasuk desa yang keluarga miskinnya cukup banyak dan tidak punya catatan buruk. Maksudnya, tidak punya masalah hutang ke pemerintah daerah dan tidak menunggak pajak.”(wawancara, 10 Juni 2005)

Setelah masuk dalam daftar tersebut, di desa tingkat desa diadakan Musbangdes I sebagai ajang sosialisasi PPK di tingkat desa. Ada 66 orang baik dari para wakil dusun atau kleompok, kepala desa, pengurus LPMD, organisasi lokal desa dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang berpartisipasi menghadiri musyawarah tersebut. Sebagaimana pernyataan Pak Bentot berikut ini,

”Musbangdes I adalah tahap awal musyawarah desa. Di desa Mendalanwangi, musbangdes I dilaksanakan di balai desa Mendalanwangi yang dihadiri oleh 66 orang dari perwakilan dusun atau kleompok, kepala desa, pengurus LPMD, organisasi lokal desa dan juga sesepuh masyarakat.”(wawancara, 16 Juni 2005)

Adapun hasilnya adalah penetapan Fasilitator Desa, yaitu Bapak Untung dan Ibu Sulika. Berikutnya FD (setelah dilatih oleh PJOK dan fasilitator kecamatan) telah mengadakan pertemuan di dusun-dusun atau kelompok dalam rangka penggalan gagasan kegiatan yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di dusun-dusun. Ketua LPMD mengatakan,

”Pasca Musbangdes I yang diadakan di balai desa Mendalanwangi, lalu dilanjutkan dengan mengadakan pertemuan di dusun-dusun untuk pengenalan usulan kegiatan.”(wawancara, 16 Juni 2005)

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua LPMD, Fasilitator Desa, Kepala Dusun atau Ketua RW dan masyarakat setempat. Adapun tema bahasan dalam musyawarah tersebut adalah pengarahan dan penjelasan tentang PPK berikut penggalan gagasan kegiatan kelompok serta diskusi mengenai urutan skala prioritas pendanaan kegiatan.

Prioritas kegiatan tersebut kemudian dibicarakan secara bersama-sama dalam forum Musbangdes II. Musbangdes ini dihadiri oleh perangkat desa,

anggota LPMD, BPD, RT, RW, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok, Fasilitator Desa, Fasilitator Kecamatan beserta PJOK. Kepala desa Mendalanwangi menyatakan,

”Musbangdes II dihadiri oleh 76 orang, antara lain itu ada perangkat desa, anggota LPMD, RT, RW, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok, Fasilitator Desa, Fasilitator Kecamatan dan PJOK.”(wawancara, 10 Juni 2005)

Hasil dari Musbangdes II yaitu prioritas yang telah disepakati dalam Musbangdes I diajukan ke kecamatan untuk mendapatkan dana bantuan PPK. Adapun prioritas, dibuat berdasar urutan jumlah skor masing-masing seperti pada tabel berikut:

Tabel 3

Daftar Prioritas Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Desa Mendalanwangi

Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Biaya	Jumlah skor	Urut
Kelompok Mlijo	Semua dukuh	Rp 1.050.000,-	9,06	I
Pedagang Pasar	Santren	Rp 9.700.000,-	8	IV
Kerajinan	Semua dukuh	Rp 22.350.000,-	8,9	II
Home Industri	Semua dukuh	Rp 3.300.000,-	6	VII
Jasa	Semua dukuh	Rp 2.950.000,-	5	VIII
Warung	Semua dukuh	Rp 7.100.000,-	8,8	III
Itik	Semua dukuh	Rp 12.000.000,-	7,31	V
Kios/toko	Semua dukuh	Rp 5.000.000,-	7	VI

Sumber: Laporan Hasil Musbangdes II Tahun 2005

Adapun maksud dari tabel di atas bahwa forum menginventaris jenis kegiatan yang diusulkan untuk daftar prioritas kegiatan usaha ekonomi produktif Desa Mendalanwangi, kemudian forum memberikan skor untuk setiap jenis kegiatan sesuai lokasi kegiatan dan prakiraan biayanya serta penjelasan-penjelasan yang diuraikan dalam diskusi forum mengenai alasan-alasan mengapa jenis kegiatan tersebut penting untuk diprioritaskan oleh masing-masing wakil dusun yang hadir dalam forum tersebut. Skor yang diberikan tersebut kemudian dijumlah hingga kemudian menghasilkan urutan prioritas kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di atas.

Selain itu dihasilkan juga tim penulis usulan yang bertugas menuangkan secara tertulis gagasan-gagasan kegiatan PPK baik kegiatan fisik yaitu pemnagunan sarana dan prasarana maupun kegiatan

usaha ekonomi produktif yang telah dibahas dalam Musbangdes II. Berdasarkan sumber laporan Musbangdes II desa Mendalanwangi, Tim penulis usulan tersebut adalah:

1. Bentot Winoto (Ketua 1 LPMD)
2. Untung (FD)
3. Sulika(FD)
4. Sujadi(Seksi Pembangunan)
5. H. Abdul Manaf (Seksi Kamtibmas).

Gagasan-gagasan tertulis tersebut disertai beberapa hal dikonfirmasi kepada kelompok masyarakat yang bersangkutan dan diajukan ke kecamatan untuk diverifikasi untuk selanjutnya dibahas atau dikompetisikan di UDKP II. Yang mewakili desa Mendalanwangi ke forum UDKP II adalah:

Tabel 4
Wakil Desa Ke UDKP II

Nama	Jabatan
3. Subakir	Kepala Desa
4. Bentot Winoto	Ketua LPMD
5. Choirul Zaman	Ketua Bidang Pembangunan BPD
6. Sudjadi	Sie Pembangunan LPMD
7. Murniati	Sie Pendidikan LPMD
8. Solikatin	Sie Agama LPMD

Sumber: Laporan Hasil Musbangdes II tahun 2005

Musbangdes II juga menghasilkan calon pengurus UPK dan pengamat forum UDKP II. Dari forum ini salah satunya menyetujui pendanaan untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif yaitu dana bantuan bergulir untuk KSP Sari Bumi yang merupakan bentukan dari hasil PPK phase I. Hasil tersebut kemudian dipampang di papan informasi PPK di kecamatan dan di wilayah desa juga di halaman kantor Desa Mendalanwangi, sebagai perwujudan azas transparansi.

Adapun alokasi dana yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan anggota serta biaya operasional pengembangan koperasi. Selanjutnya jumlahnya tidak selalu sama setiap bulan. Ibu Ani, Pengurus KSP Sari Bumi, menyatakan,

”jumlah uang bantuan dari PPK untuk KSP Sari Bumi tidak sama setiap bulannya. Tergantung perputaran angsuran pinjaman dari anggota dan biaya operasional koperasi ini. Seperti untuk bulan Mei 2005, alokasinya sejumlah Rp. 20.300.000,- bisa 100% lunas per tanggal 25. kalau seperti ini ya nanti bulan depannya bisa nambah lagi.”(wawancara, 10 Juni 2005)

Ibu Ani adalah pengurus KSP Sari Bumi desa Mendalanwangi yang menjabat sebagai sekretaris II, selengkapnya susunan pengurus KSP Sari Bumi sesuai laporan hasil Musbangdes II desa Mendalanwangi adalah sebagai berikut:

Ketua : P. Boimin
Sekretaris I : Samiadi
Sekretaris II : B. Ani
Bendahara : Usman Zakaria.

A.2.1.b keanggotaan masyarakat dalam kegiatan usaha ekonomi produktif

Sedangkan pemanfaat atau anggota dari KSP Sari Bumi adalah para pedagang pasar, pengrajin, pemilik industri tempe, kerupuk, dan tegel, peternak itik dan masyarakat kurang mampu lainnya seperti yang diungkapkan oleh Pak Usman, bendahara KSP Sari Bumi,

”anggota KSP Sari Bumi itu, 90 orang pedagang pasar dan lainnya, seperti pengrajin, pemilik industri tempe, kerupuk, dan tegel, peternak itik dan lain-lain. Sekarang seluruh anggota atau pemanfaat dana bergulir PPK melalui KSP Sari Bumi adalah 531 orang.”(wawancara, 10 Juni 2005)

Ibu Wati salah satu pemanfaat atau anggota KSP Sari Bumi, mengakui bahwa beliau tertarik menjadi anggota setelah mendapatkan penjelasan di dusunnya. Selain beliau banyak tetangganya yang juga ikut serta, seperti yang beliau ungkapkan berikut ini:

”*kulo remen wonten bantuan niki. Amergi kulo lagi mbetahne arto damel dagang kersani saget mbantu bapake lare-lare. Tanggi kulo ingkang celak wonten kaleh dosoan ingkang nderek niki.*(saya senang ada bantuan ini (PPK,pen.). Soalnya saya sedang butuh uang untuk usaha biar bisa bantu bapaknya anak-anak. Tetangga saya yang dekat ada 20-an orang yang ikut).”(wawancara, 13 Juni 2005)

Sesuai dengan yang dijelaskan Ibu Ani, sekretaris II KSP Sari Bumi, pemanfaat jasa KSP Sari Bumi juga berasal dari masyarakat non pra sejahtera

(70% dari total pemanfaat), dengan tetap mengutamakan pemanfaat pra sejahtera/miskin (wawancara, 10 Juni 2005). Sedangkan daftar pemanfaat pra sejahtera bisa dilihat pada lampiran 9. Keterlibatan mereka ini sedikit banyak memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pengembangan dana.

Dalam menjalankan kegiatannya KSP Sari Bumi telah membuat kesepakatan bersama dengan anggota-anggotanya mengenai ketentuan-ketentuan untuk menyimpan maupun meminjam yang diwujudkan dalam surat keputusan bersama seluruh pihak yang terlibat dalam operasional KSP Sari Bumi yaitu antara pengurus dengan para pemanfaatnya (lampiran 10). Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman setelah dilakukan transaksi dan merupakan *win-win solution* jika memang ada masalah di kemudian hari.

Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas usaha para pemanfaat dana bantuan usaha bergulir, maka sesuai PTO (Petunjuk Teknis Operasional) diadakan pertemuan maupun pelatihan peningkatan kualitas usaha ekonomi produktif yang dalam hal ini adalah anggota KSP Sari Bumi. Pada awalnya pelatihan bisa terlaksana dengan baik tetapi seiring dengan waktu intensitasnya mulai berkurang karena beberapa kendala. Seperti yang dikemukakan oleh Pak Untung:

”pertemuan yang seharusnya diadakan oleh FD ini punya kendala di SDM dan waktu. Terutama di waktu, soalnya walaupun kita paksa untuk mengadakan, ya... jatuhnya rugi juga. *Lha wong*, yang datang sedikit. Soalnya memang semua *kan* punya urusan sendiri-sendiri, usahanya tambah rame. Kalau *pake* sistem *getok tular*, pernah dicoba tapi tidak jalan. Cuma pernah dibahas sama beberapa orang wakil dusun, memang tidak mewakili, tapi kita sempat sepakat kalau pertemuan tidak usah terlalu sering, kalau ada masalah yang genting saja baru ada pertemuan. Nanti *lak* banyak yang datang.” (wawancara, 13 Juni 2005)

Di sisi lain pemanfaatan dana oleh pemanfaat dari KSP Sari Bumi masih terbatas pemanfaatan dana untuk usaha personal belum usaha kelompok. Belum ada partisipasi kolektif atau partisipasi bersaing, selain KSP. Hingga penelitian ini dilakukan belum ada pengembangan usaha lain, padahal dalam PTO disebutkan bahwa dana kegiatan Usaha Ekonomi Produktif bertujuan untuk mengembangkan aneka usaha yang ada di masyarakat, yang itu sifatnya kelompok. Dana bantuan untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif yang didapat dari PPK seluruhnya dikelola oleh satu kelompok usaha yaitu KSP

Sari Bumi. Dari sinilah kemudian masyarakat memperoleh dana bantuan tersebut dan digunakan untuk mengembangkan usaha pribadi masing-masing pemanfaat.

Sebenarnya masih banyak jenis usaha lain yang berpeluang untuk dikembangkan secara berkelompok. Salah satu faktor penyebab belum berkembangnya usaha yang lain adalah birokrasi pengajuan dana Usaha Ekonomis Produktif. Prosedur pengajuan dana Usaha Ekonomi Produktif dipandang cukup rumit oleh masyarakat ketika dibanding dengan cara memperoleh pinjaman melalui KSP. Untuk mendapatkan dana melalui jalur tersebut, harus dibentuk kelompok terlebih dahulu. Anggota kelompok adalah masyarakat dengan jenis usaha yang sama.

Kemudian kelompok tersebut mengadakan musyawarah untuk membuat proposal pengajuan dengan didampingi oleh TPK maupun FK. Proposal tersebut akan dikompetisikan dalam MAD (Musyawarah Antar Desa). Sebenarnya pencairan dana termasuk cepat, jika proposal disetujui maka kurang lebih seminggu sampai 10 hari kemudian dana bisa dicairkan dan diterima oleh masing-masing kelompok usaha. Seperti yang dikemukakan Bapak Usman (sekretaris KSP), berikut ini:

"kalau untuk pencairan dana, tidak lama kok. Satu minggu, paling lama sepuluh hari. Setelah pengajuan ke UPK, terus verifikasi bersama UPK juga, di ACC. Ya. seminggu atau sepuluh hari sudah langsung cair."(wawancara 14 Juni 2005)

Berbeda dengan penerimaan dana melalui KSP yang sangat mudah. Pada dasarnya memang dana bantuan kegiatan usaha ekonomi produktif diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dengan kriteria masyarakat pra sejahtera dan tidak sedang dalam penggunaan maupun pengangsuran bantuan pemerintah lain pada saat yang sama. Namun untuk memperluas pasar dan menambah modal maka KSP Sari Bumi juga terbuka bagi masyarakat non pra sejahtera. Kemudahan untuk menjadi anggota KSP Sari Bumi terlihat dalam prosedur pendaftaran anggota yaitu hanya dengan mendaftar pada koperasi yang ada dengan administrasi yang tidak menyulitkan yakni kejelasan identitas dan kesanggupan membayar angsuran pinjaman berikut jasa pinjaman, masyarakat sudah langsung bisa menggunakan dana pinjaman.

Panjangnya prosedur kegiatan usaha ekonomi produktif yang ada membuat masyarakat enggan untuk mendapatkan dana melalui kelompok Usaha Ekonomi Produktif. Sebagaimana yang dikemukakan Pak Bentoet, selaku ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Desa Mendalanwangi. Berikut petikan wawancara yang penulis lakukan di pasar Mendalanwangi:

"kalau untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif, sebenarnya di sini banyak masyarakat yang mempunyai jenis usaha yang sama, seperti betemak itik, kerajinan, dan lain-lain. Dan sebenarnya kalau mau sesuai betul dengan PTO (Petunjuk Teknis Operasional), ya harusnya mereka itu dikumpulkan untuk kemudian dibentuk kelompok untuk dikembangkan usahanya dengan dana PPK. Tapi mereka enggan, karena pengajuan dana melalui UEP itu kan harus pake' proposal dulu."(wawancara, 16 Juni 2005).

A.2.2 Lapangan kerja baru

Lapangan kerja baru yang terbentuk dari kegiatan usaha ekonomi produktif di Desa Mendalanwangi ini adalah merupakan hasil dari pinjaman dana bergulir baik bersifat individu maupun kelompok. Dari usaha baru yang berbentuk kelompok sebagai hasil bentukan dari dana bantuan kegiatan ekonomi PPK dalam kegiatan usaha ekonomi produktif mampu menyerap 7 orang tenaga kerja saja. 4 orang untuk pengurus KSP Sari Bumi di Desa Mendalanwangi, dan sisanya merupakan tenaga fungsional/bukan pengurus inti yang berasal dari daerah cabang. Seperti yang dikemukakan Bu Ani, sekkretaris II KSP Sari Bumi desa Mendalanwangi berikut ini:

"selain di Mendalanwangi sini, KSP Sari Bumi juga telah membuka cabang di daerah lain, yaitu di desa Singosari. Total pengurus ada 7 orang, 4 di Mendalanwangi, 3 di Singosari. Tugas 3 orang itu hanya melakukan penagihan kepada anggota atau pemanfaat".(wawancara, 10 Juni 2005)

Jumlah tersebut memang tidak terlalu signifikan jika dibanding dengan jumlah penduduk miskin Mendalanwangi secara keseluruhan sebagai sasaran utama kegiatan ini. Namun lapangan kerja baru juga bertambah seiring dengan bertambahnya pemanfaat (meskipun tidak 100% pemanfaat) yang secara cermat memanfaatkan pinjaman yang diperolehnya untuk membuka usaha maupun memperbesar usahanya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yahya, salah satu pemanfaat pinjaman di KSP Sari Bumi Mendalanwangi.

”setelah mendapat pinjaman dari KSP Sari Bumi, saya membuka usaha berdagang ikan di pasar Mendalanwangi. Sebelumnya saya hanya kerja buruh tani sama seperti bapak. Saya kerja setiap hari, tapi *pas* panen dan *tandur*(tanam, pen), saya *gantian* dengan anak saya yang lulus SMA untuk dagang di pasar.”(wawancara, 10 Juni 2005)

Pengurus koperasi juga menyebutkan hal yang sama dimana banyak pemanfaat yang menggunakan dana pinjaman untuk modal usaha baru. Ibu Ani yang menjabat sebagai sekretaris II mengatakan:

”banyak kok mbak yang menggunakan uang pinjaman untuk dagang. Karena pemanfaatnya rata-rata tetangga sendiri dan koperasi ini kan di belakang pasar, jadi kelihatan orang-orang itu. Ya... jadi banyak pedagang-pedanga baru di pasar ini, ya... mereka yang jadi anggota kita.”(wawancara 16 Juni 2005)

Sedangkan untuk prosentase pemanfaat yang menggunakan pinjamannya untuk membuka usaha baru sampai dengan dilakukannya penelitian ini, Pak Samiadi sebagai sekretaris I KSP Sari Bumi menyebutkan ada 90% dari 531 orang jumlah total pemanfaat pinjaman(wawancara 16 Juni 2005).

Peningkatan lapangan kerja baru ini memberikan efek yang signifikan jika dibanding sebelum adanya KSP Sari Bumi sebagai hasil dari kegiatan Usaha Ekonomi Produktif di desa Mendalanwangi. Sebagaimana dijelaskan Kepala Desa Mendalanwangi berikut:

”kalau dulu pasarnya tidak seramai sekarang, pedagangnya lebih banyak dan kebanyakan orang Mendalanwangi. Orang ternak juga jarang, sekarang cukup banyak yang ternak. Contohnya ternak itik dan itu banyak yang pinjam di KSP Sari Bumi itu.”(wawancara, 10 Juni 2005)

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan Bu Sulaiman, pedagang buah dan sayur di Pasar Mendalanwangi berikut:

”*kulo enggal ten mriki. Siyen kulo namung ibu rumah tangga. Siyen kulo bingung pados modal, ajrih mboten saget nyicil. Terus, wonten Sari Bumi, kulo mngampil ten mriku sekedi'-sekedi', terus kulo dagang ten mriki. Rencang kulo engkang sami enggal ten mriki kathah, kulo semerape ngampil ten mriku nggehan, ten Sari Bumi, sami kaleh kulo*”.(saya pedagang baru di pasar Mendalanwangi. Dulu saya hanya ibu rumah tangga. Dulu saya sempat bingung mau cari modal, takut tidak bisa membayar. Kemudian ada Sari Bumi, saya pinjam sedikit demi sedikit, lalu saya berdagang di sini. Teman-teman saya yang baru dagang di sini juga banyak, yang saya tahu pinjam di situ, di Sari Bumi juga, sama seperti saya.”(wawancara, 10 Juni 2005).

A.3. Pengembangan usaha masyarakat

Untuk pengembangan usaha masyarakat yang berbentuk kelompok usaha/KSP Sari Bumi, seperti yang sempat disinggung sebelumnya, telah dilakukan pengembangan ke luar desa. Kebijakan ini merupakan keputusan yang diambil oleh internal pengurus beserta anggota dan TPK desa, dengan pertimbangan akan kurang *marketable* jika dikembangkan di dalam desa saja. Dimana peluang untuk mendapatkan pemanfaat sangat kecil bahkan bisa jadi akan ada kompetisi antara pusat dan cabangnya, hingga kemungkinan akan mematikan usaha salah satu atau keduanya. Seperti yang dituturkan Pak Boimin, Ketua KSP Sari Bumi,

”karena aset kita sudah cukup untuk pengembangan, buka cabang maksudnya, dan sudah cukup stabil, maka kami putuskan bersama buka di luar desa Mendalanwangi. Soalnya kalau tetap di dalam desa, anggotanya yang paling mudah aksesnya kan tetap orang sini, bisa-bisa nanti mati salah satu. Jadi kami putuskan buka cabang di luar desa.”(wawancara, 10 Juni 2005)

Pengembangan keluar desa ini ternyata membuahkan hasil. Pada tahun 2004 kemarin KSP Sari Bumi sempat meraup keuntungan sebanyak Rp. 700.000.000. dengan jumlah pemanfaat hingga Juni 2005 adalah 531 orang gabungan dari dua wilayah operasional tersebut.

Disamping itu KSP Sari Bumi menyediakan layanan tabungan berjangka, dengan ketentuan bunga yang akan didapat: untuk deposito jangka waktu 1 tahun mendapat bunga 1,5 %; 6 bulan mendapat bunga 1,4 %; 3 bulan 1 % sama dengan tabungan biasa/non deposito atau 0 bulan, maksudnya sewaktu-waktu dapat diambil. Dari sini dana akan diputar dengan bunga 4%, lebih besar 2% dari yang diberlakukan dalam PTO. Langkah ini kemudian menghasilkan perputaran uang yang lebih cepat. Karena pada dasarnya dengan penetapan suku bunga yang lebih tinggi tersebut lebih mampu memotivasi masyarakat dalam kelancaran pengangsuran pinjaman bantuan usaha yang dimanfaatkan, dibanding dengan pinjaman yang pengembaliannya dengan sedikit atau tanpa bunga. Seperti yang diungkapkan Ibu Ani, sekretaris KSP Sari Bumi berikut ini,

”banyak para anggota yang mengatakan pada kita para pengurus, suku bunga yang ditetapkan di KSP Sari Bumi ini cukup tinggi, tapi mereka juga bilang karena suku bunga yang cukup tinggi itu mereka banyak yang *ndak* berani

lama-lama *nunggak*. Soalnya kan, *kalo* lama-lama *nunggak* utangnya malah jadi semakin banyak (wawancara 16 Juni 2005).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Dina, Ibu Wakijah, Ibu Lis, Ibu Tri dan Ibu Janah. Mereka adalah para pedagang pasar Mendalanwangi dan merupakan anggota atau pemanfaat dana bantuan kegiatan usaha ekonomi Produktif melalui KSP Sari Bumi, yang waktu itu penulis wawancarai di sela-sela waktu luang mereka pada saat menunggu pembeli datang. Pada awalnya, mereka merasa keberatan meskipun tetap juga memanfaatkan dana dari KSP tersebut, tetapi pada perjalanannya mereka mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jadwal pengangsuran. Ketepatan waktu ini mereka akui karena mereka takut jika pinjaman yang dimanfaatkan akan semakin menumpuk karena suku bunga yang cukup tinggi. Salah satu dari mereka, yaitu Ibu Wakijah menambahkan, jika pinjaman yang dimanfaatkan melalui KSP Sari Bumi adalah tanpa bunga, maka kemungkinan Ibu Wakijah akan menunggak angsurannya lebih lama, karena merasa tidak punya beban dengan tanpa diberlakukannya bunga pinjaman (wawancara 16 Juni 2005).

Sedangkan SHU yang diambil dari hasil pendapatan bunga KSP Sari Bumi, dialokasikan untuk wisata (bergilir) dan tunjangan hari raya (lampiran 11) yang pembagiannya kepada anggota ditentukan berdasar tingkat kelancaran pengangsuran. Meski bertentangan dengan PTO (dana hasil pengembangan dari dana pokok yang dipinjam dari Kecamatan harus dimanfaatkan secara keseluruhan untuk pinjaman kepada nasabah, tetapi pada kenyataannya hal ini merupakan strategi yang cukup ampuh untuk merangsang pemanfaat segera melunasi kewajibannya serta menarik calon pemanfaat untuk bergabung.

Sedangkan untuk pengembangan usaha yang bersifat individu/pemanfaat KSP berbentuk penambahan ragam barang dagangan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Juariyah berikut ini:

"artone kulo damel nambahi dagangan. Ne' siyen, kulo namung sadeyan ulam lele, sakniki kulo tambahi pindang kaleh ulam asin. (uangnya saya buat menambah barang dagangan. Kalau dulu, saya hanya menjual ikan lele, sekarang saya tambah pindang dan ikan asin). (wawancara, 16 Juni 2005)

Selain itu ada pula yang membeli bedak di pasar, karena sebelumnya hanya berjualan di rumah. Contohnya Bu Jito beliau menuturkan:

"siyen kulo sadean pracangan ten griyo, sing tumbas nggeh tanggi kanan-kiri. Sakniki kulo sampun angsal kriditan saking Sari Bumi, kulo tumbas bedak ten pasar mriki.(dulu saya jualan di rumah jualan pracangan, yang beli ya tetangga, kanan-kiri. Sekarang sudah dapat pinjaman dari Sari Bumi, saya beli bedak di pasar ini-Pasar Mendalanwangi, pen)".(wawancara, 16 Juni 2005)

Hal senada diungkapkan Ibu Mafruchah, salah seorang pedagang daging di pasar desa Mendalanwangi mengaku lebih leluasa dalam berdagang. Beliau mengaku lebih leluasa dalam membeli stok barang dagangannya(wawancara 16 Juni 2005).

Di sisi lain, tidak jarang pula para pemanfaat, yang sebagian besar adalah pedagang mengalami kerugian. Hal ini sangat berpengaruh pada kelancaran pembayaran angsuran. Untuk mengatasi hal tersebut, TPK beserta pelaksana/pelaku. PPK di Desa ini mengadakan pembinaan baik secara informal maupun formal. Secara informal, dilakukan melalui pendekatan personal kepada pemanfaat. Sedangkan secara formal, para pengurus KSP dengan didampingi TPK sebagai pengawas kegiatan ekonomi, mengadakan forum musyawarah untuk membicarakan masalah-masalah seputar perkembangan usaha pemanfaat melalui pertemuan triwulan dengan lokasi di rumah penduduk dekat pasar Mendalanwangi. Hal ini untuk memudahkan, karena lokasi kantor dan banyaknya pemanfaat yang berdagang di pasar tersebut. Namun sampai Juni 2005, TPK belum pernah mengadakan pelatihan teknis yang berhubungan langsung dengan usaha pemanfaat, sebagaimana yang tercantum di PTO seharusnya dilaksanakan untuk kepentingan pengembangan usaha masyarakat, karena terbentur masalah SDM baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini dikemukakan Bapak Bentoet, saat wawancara,

"ya..... Itu mbak, kita belum pernah mengadakan. pelatihan maupun pembinaan yang sifatnya teknis sesuai usaha masing-masing pemanfaat Kendalanya selain faktor kuantitas juga karena kualitas SDM yang bagus untuk itu belum memadai. Paling kalau misal ada yang rugi, ya kita ajak bicara secara informal, secara kekeluargaan. Kalau ada masalah ya kita bicarakan di forum triwulanan, atau kalau telat paling tidak ya, sekali dalam 6 bulan kita adakan pertemuan."(wawancara, 16 Juni 2005)

A.3. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pasca Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif

A.3.1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan ekonomi desa.

Dulu sebelum adanya bantuan PPK, ada beberapa program dari pemerintah yang dilaksanakan di desa Mendalanwangi. Contohnya program kemitraan, dalam program ini masyarakat tidak begitu antusias terhadap program tersebut. Menurut Kepala desa Mendalanwangi, masyarakat menjadi tidak begitu percaya dengan program tersebut, karena kurang adanya transparansi terutama dari laporan keuangannya. Sedangkan untuk PPK, lebih banyak masyarakat yang ikut serta dalam penyelenggaraan dan pelestarian program ini, karena disamping transparan, masyarakat dilibatkan secara penuh pada setiap tahapan program. Sehingga mereka berupaya bagaimana kelompok usaha yang ada tidak hanya bisa bertahan hidup tetapi juga bisa berkembang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau, berikut ini:

”dulu sebelum PPK, ada program kemitraan, tapi banyak masyarakat yang enggan berpartisipasi. Soalnya kurang transparan dalam pengelolaannya, terutama hal keuangan. Tapi kalau PPK ini, kita malah bisa ekspansi KSP sampai ke luar desa. Masyarakat desa Mendalanwangi lebih senang dengan cara pengelolaan PPK dari pada yang sebelumnya.”(wawancara, 10 Juni 2005)

Kepedulian masyarakat Mendalanwangi terhadap program ini juga bisa dilihat dari keseriusan pengurus PPK desa terutama dalam kegiatan usaha ekonomi produktif yang diindikasikan dengan kelancaran perputaran modal bantuan bahkan sampai pengembangan. Seperti yang dikemukakan Ibu Ani,

”alhamdulillah, sampai sekarang pengurus KSP Sari Bumi masih bisa mengatur keuangan dengan baik. Tidak ada penunggakan yang sampai mengganggu angsuran pengembalian modal hingga mengganggu perputaran modal. Kalau pun ada kita pecahkan dengan kekeluargaan dengan anggota yang menunggak. Dan kami sesama pengurus selalu tahu sama tahu, artinya kalau ada masalah apapun kita selalu bicarakan bersama. Jadi ya sama-sama sungguh-sungguh mengerjakan tugas sebagai pengurus KSP Sari Bumi ini.”(wawancara, 10 Juni 2005)

Azas kekeluargaan yang menopang pengembangan modal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Sainah anggota atau pemanfaat KSP Sari Bumi yang secara terbuka mengaku pernah menunggak angsurannya dan secara kebetulan

ditemui penulis di kantor KSP Sari Bumi dan sedang membayar angsurannya untuk 2 bulan tunggakan. Adapun petikan wawancaranya adalah sebagai berikut:

"kulo mboten saget mbayar kaleh sasi, mergi tasek gadah tanggungan sekolah 5 anak, SD kaleh SMP. Kulo, masi mboten nggaduh arto, tapi sekolah tetep nomer setunggal. Biasane kulo saget mbayari nggehan, tapi winginane dagangan kulo mantun rugi kathah. Kulo crios ten Pak Usman kaleh Pak Boimin sing ten griyo kulo, nagih. Tapi terose bade diomongne riyen, tapi terose kadose wonten keroinganan. Lajeng, pas Pak Boimin kaleh Pak Usman ten griyo maleh, kulo diparingi keringanan saget ngangsur kaleh sasi didobel dadhos sasi ngajenge. Kulo seneng, sakniki kulo sget mbayar.(saya tidak bisa membayar 2 bulan soalnya masih tanggungan uang sekolah 5 anak, SD sama SMP. Saya meskipun tidak punya uang, tetapi sekolah anak nomor satu. Biasanya saya bisa membayar, tetapi kemarin usaha saya rugi banyak. Saya cerita sama Pak Usman dan Pak Boimin yang ke rumah saya, nagih. Tetapi, katanya mau dibicarakan dulu, tetapi katanya mungkin ada keringanan. Lalu, waktu pak Boimin sama Pak Usman datang lagi, saya diberi keringanan bisa angsur 2 bulan didobel jadi bulan depan. Saya senang, dan sekarang saya bisa mbayar.(wawancara, 10 Juni 2005)

Strategi kekeluargaan dalam berhubungan dengan pemanfaat atau anggota serta memperhatikan pengembangan konsumen secara lebih luas tersebut menjadi kunci dalam pengembangan modal KSP Sari Bumi.

Pengembangan modal KSP ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa. Sebab hal tersebut tidak mungkin terwujud tanpa adanya kesinambungan partisipasi masyarakat dalam bentuk kerjasama yang baik antara pengurus KSP dengan anggota atau pemanfaat pinjaman dana bantuan bergulir usaha ekonomi produktif pada PPK phase II ini. Selain itu seperti yang telah dijelaskan dalam hasil pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif, KSP Sari Bumi juga meningkatkan pelayanan dengan pengadaan deposito berjangka dengan jangka waktu yang variatif serta suku bunga yang cukup, ternyata mampu menarik calon pemanfaat atau anggota hingga berjumlah 531 orang.

Animo masyarakat setempat dalam lebih memilih KSP di desanya sendiri dari pada di tempat lain selain karena tawaran yang menarik dalam pengadaan pelayanannya juga merupakan cerminan kepercayaan terhadap organisasi ekonomi desanya, yang tentu saja akan berdampak pada peningkatan pembangunan ekonomi di desanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam

buku panduan atau penjelasan PPK, dimana hasil kegiatan usaha ekonomi produktif dapat digunakan untuk kegiatan apa saja sesuai dengan persetujuan Musyawarah Antar Desa.(Tim PPK, 2002:33). Ibu Vina, anggota KSP Sari Bumi non pra sejahtera mengatakan:

”dulu saya hanya punya 1 tabungan saja, yaitu di salah satu bank swasta. Tetapi karena saya pernah ngobrol sama teman-teman pengurus PPK, saya jadi tertarik untuk menabung di KSP Mendalanwangi ini. Sekarang saya jadi punya dua tabungan. Alasannya, karena ternyata hasil yang diperoleh oleh KSP itu yang katanya termasuk usaha ekonomi desa, juga akan digunakan untuk memajukan desa. Ya untuk apa gitu, yang mendukung desa ini bisa lebih berkembang jadi lebih baik lagi.”(wawancara, 13 Juni 2005)

Keseriusan partisipasi masyarakat tersebut semakin terbukti dengan adanya strategi dalam KSP Sari Bumi untuk mengembangkan sayapnya dengan menambah wilayah operasional ke luar desa yaitu desa Singosari seperti telah disinggung sebelumnya. Hal ini merupakan sebuah lompatan berfikir yang cukup besar untuk komunitas pedesaan yang pada umumnya pola berfikirnya sangat sederhana. Keseriusan dan peningkatan kepedulian masyarakat untuk mengikuti kegiatan ekonomi di desa sendiri ini merupakan wujud atau indikasi yang nyata dari peningkatan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pembangunan ekonomi di desanya.

A.3.2 Meningkatnya kemampuan lembaga dan aparat di tingkat desa untuk mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat.

Pasca pelaksanaan kegiatan ekonomi PPK phase II ini ada peningkatan kemampuan koordinasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat pada aparatur lembaga dan pemerintahan desa. Pada program pemerintahan yang sebelumnya, model yang banyak dipakai adalah program dimana masyarakat hanya menjadi objek sasaran program, bukan subjek atau pelaku program sehingga peran aktif masyarakat sebelum kegiatan ini kurang mendapat kesempatan untuk berkembang. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala desa Mendalanwangi berikut ini:

”kalau sebelum PPK, yang bergerak aktif mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, ya... aparat desa. Walaupun ada masyarakat yang ikut, itu *cuma* sebagian kecil dan biasanya orangnya ya itu itu saja. Kalau PPK, *kan ndak*, semua bisa ikut, termasuk yang kurang mampu.”(wawancara, 10 juni 2005).

Dari sini kemampuan lembaga dan aparat desa diuji. Sosialisasi yang dilakukan harus benar-benar dipahami oleh masyarakat yang kurang berpendidikan sekalipun.

Adapun indikasi keberhasilan rangkaian perencanaan hingga pelestarian bisa dilihat pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam PPK, terutama untuk kegiatan usaha ekonomi produktif, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada hasil pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi produktif butir peningkatan partisipasi masyarakat. Sedangkan prinsip transparansi PPK membantu atau mendukung perangkat desa untuk mampu memfokuskan sasaran modal bantuan yang digulirkan yang terlihat pada peningkatan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dan menggunakan pinjaman di kelompok usaha yang ada di desa Mendalanwangi dan berefek pada peningkatan pemanfaat atau anggota KSP seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adalah merupakan wujud dari peningkatan kemampuan lembaga dan perangkat desa dalam pengkoordinasian masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Pak Kusaimi, salah satu pemanfaat KSP Sari Bumi berikut ini:

”saya percaya *kok mbak* dananya *ndak* diselewengkan, soalnya saya dan anggota lain tahu untuk apa uang yang masuk itu, ya lewat laporan. Kalau ada pertemuan, *kan* itu dibahas. *Ndak* seperti dulu *kok* PPK ini, lebih terang dananya. Dan bisa dilihat hasilnya, KSP punya cabang dan hasilnya bisa untuk kegiatan desa yang lain, itu juga ada laporannya.”(wawancara, 13 Juni 2005)

Peningkatan kemampuan tersebut juga bisa dilihat dari kelancaran pencairan dana dari kecamatan ke desa Mendalanwangi. Karena kelancaran tersebut harus didukung oleh tepat atau tidaknya laporan yang dibuat berdasarkan pemantauan terhadap kegiatan PPK dalam hal ini adalah perguliran dana modal usaha. Pembicaraan mengenai hal ini dilakukan pada Musyawarah Antar Desa, dimana para perangkat desa dalam perannya sebagai pelaku PPK mengadakan tanya jawab mengenai perkembangan kegiatan, terutama mengajak masyarakatnya untuk lebih tepat waktu dalam pembayaran angsuran(hasil rapat MAD desa Mendalanwangi, bulan mei 2005)

Adapun pemberdayaan yang dilakukan aparat desa ialah melalui MAD. Perangkat desa mengarahkan agar masyarakatnya yang mempunyai usaha

rintisan, yaitu usaha kecil yang masih kurang pengembangannya terutama dari segi pasar, untuk memanfaatkan dana pinjaman. Sebagaimana yang dituturkan oleh kepala desa Mendalanwangi, yaitu:

”sebelum ada rapat MAD, kita perangkat desa dan LPMD ketemu secara informal membicarakan arahan musyawarah. Supaya nanti bisa efektif, dan tidak terlalu berbelit-belit serta rinci dan sederhana. Jadi ada semacam target yang jugadiskusikan dengan pengurus KSP.”(wawancara, 10 Juni 2005)

Profesionalisme lembaga dan aparat desa juga mengalami peningkatan dalam hal keterbukaan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan PPK, khususnya kegiatan usaha ekonomi produktif. Sebelum ada PPK, di desa Mendalanwangi pemberitahuan tentang perkembangan sebuah program terbatas hanya pada forum-forum musyawarah desa saja. Sedangkan untuk PPK ini, perangkat desa dalam perannya sebagai pelaku PPK memfasilitasi pengurus kelompok usaha ekonomi untuk mencantumkan laporannya di papan kantor desa. Bahasa yang digunakan mudah dimengerti oleh masyarakat luas, seperti yang diungkapkan oleh Bu Sunarti, pemanfaat KSP Sari Bumi yang mengaku lulusan SD, berikut ini petikan wawancaranya,

” saya sejak dulu *tahunya* ada koperasi kredit, ada pinjaman untuk usaha itu ya...dari papan bale desa. Terus saya *tanya- tanya* sama Pak Boimin, terus saya pinjam *sampe* ' sekarang.”(wawancara, 13 Juni 2005)

Hal ini berarti bahasa yang digunakan dalam informasi yang disajikan bisa diakses oleh masyarakat Mendalanwangi dengan baik. Dengan demikian berarti merupakan peningkatan profesionalisme aparatur desa dan lembaga desa dalam mengorganisir masyarakatnya untuk aktif terutama dalam pembangunan desa.

A.3.3 Penurunan jumlah penduduk miskin.

Pelaksanaan PPK telah menciptakan peluang alternatif untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sesuai dengan data yang telah dijelaskan pada hasil kegiatan, butir partisipasi masyarakat, dari dana pinjaman PPK melalui KSP Sari Bumi, 30% diantaranya dimanfaatkan oleh masyarakat pra sejahtera. Berarti ada sekitar 130 masyarakat pra sejahtera

yang mendapatkan modal usaha baik untuk merintis maupun mengembangkan usaha.

Di lapangan pengelolaan dana bantuan tersebut diperoleh peningkatan pendapatan termasuk pada pemanfaat pra sejahtera. Seperti yang dituturkan ibu Juariyah, pemanfaat pinjaman KSP Sari Bumi di pasar Mendalanwangi, berikut ini:

"nek siyen kulo mben dintene nggih angsal untung antawis sedoso ewu. Terus mantun angsal ampilan niki, untunge dados gangsal welasan. Nggeh cekap damel mbendintene.(kalau dulu, setiap harinya saya mendapat keuntungan kira-kira Rp 10.000. Setelah mendapat pinjaman, untungnya jadi Rp. 15.000-an, ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.)"(Wawancara, 16 Juni 2005)

Hal senada juga disampaikan ibu Rupiah, Ibu Jumiati, Ibu Ngastini dan Ibu Wigati dalam wawancara di tempat dan waktu yang sama. Mereka mengaku mendapat keuntungan lebih besar dari sebelum mendapat bantuan, karena keleluasaan dalam menggunakan modal untuk membeli barang dagangan.

Dalam rekapitulasi data penduduk miskin yang sempat disinggung sebelumnya pada poin kondisi demografis desa Mendalanwangi, dimana pada tahun 2001, jumlah keluarga pra sejahtera di desa Mendalanwangi adalah 386 keluarga atau 1.544 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada pada saat tahun 2001 tersebut yaitu 7.095 jiwa berarti prosentase rasionya ada sekitar 2,18%. Kemudian pada tahun 2005 ketika jumlah penduduk desa tersebut adalah 7.078 jiwa atau 1580 keluarga, jumlah masyarakat pra sejahtera turun menjadi 190 keluarga atau 760 jiwa, berarti prosentase rasionya adalah 0,12%. Dengan demikian ada penurunan jumlah masyarakat pra sejahtera di desa Mendalanwangi sebanyak 2,06%.

Penurunan jumlah masyarakat pra sejahtera tersebut juga merupakan kontribusi dari hasil kegiatan Usaha Ekonomi Produktif PPK Phase II sebagai hasil dari pengelolaan dana bantuan yang diperoleh yang kemudian meningkatkan pendapatan yang diperoleh. Hal tersebut ditegaskan oleh Camat Wagir, berikut ini:

"dari penurunan jumlah penduduk miskin di desa Mendalanwangi, PPK mempunyai andil yang cukup nyata. Karena setelah ada PPK, baik phase I maupun phase II, di Mendalanwangi terdapat kenaikan jumlah usaha baru. Dan setelah di kroscek, ternyata 90% diantaranya adalah pemanfaat modal

bantuan usaha ekonomi produktif, yaitu anggota KSP Sari Bumi.”(wawancara, 13 Juni 2005)

Kepala desa Mendalanwangi dalam wawancara di pasar Kantor Desa Mendalanwangi, 10 Juni 2005, juga menjelaskan mengenai kontribusi usaha ekonomi produktif yaitu KSP Sari Bumi pada angka kemiskinan di desanya, bahwa banyak masyarakatnya yang pra sejahtera yang membuka usaha baru dengan memanfaatkan dana pinjaman bergulir dari kegiatan usaha ekonomi produktif.

Peningkatan pendapatan tersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kemudian berimplikasi pada peningkatan status masyarakat dari pra sejahtera menjadi sejahtera yang pada akhirnya menurunkan jumlah penduduk miskin Mendalanwangi.

B. Analisa dan Interpretasi Data

B.1. Hasil Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif

B.1.1 Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pelestarian kegiatan

Sebagaimana prinsip PPK yaitu sangat mengedepankan atau memprioritaskan peran masyarakat baik sebagai pelaku, objek, dan penikmat program, atau yang dikenal sebagai DOUM (Dari, Oleh, dan Untuk Masyarakat), hasil pelaksanaan dan pelestarian kegiatan ekonomi di desa Mendalanwangi menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapannya. Dari data yang penulis peroleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian, partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang ada sangat menjiwai program ini dengan merancang kegiatan secara bersama, mengelola kegiatan secara bersama dan menikmati serta menjaga hasil secara bersama-sama pula.

Hal ini bisa kita lihat dari partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk menghadiri forum-forum musyawarah PPK. Pada forum Musbangdes I, ada 66 orang yang hadir, sedangkan pada Musbangdes II, ada 77 orang. Peran serta masyarakat tersebut berasal dari seluruh komponen masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, perangkat desa, LPMD, masyarakat pra sejahtera

bahkan dari organisasi lain yang ada di desa Mendalanwangi. Konsistensi keterlibatan masyarakat tersebut terus terjaga hingga pelestarian kegiatan, dengan mengadakan pengembangan usaha kelompok yaitu KSP Sari Bumi yang kemudian membuka cabang di Singosari. Pelibatan masyarakat dari sejak sosialisasi hingga pelestarian tersebut merupakan wujud dari sistem PPK yang mengacu pada konsep pemberdayaan masyarakat (*public empowerment*).

Data menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat juga diwujudkan dalam kepeduliannya memanfaatkan sarana informasi PPK di kantor desa Mendalanwangi. Beberapa pemanfaat KSP Sari Bumi memperoleh informasi mengenai kelompok usaha tersebut dan tertarik menjadi anggotanya dari papan informasi PPK di kantor desa. Hal ini menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap PPK cukup tinggi. Karena pada umumnya pengguna papan informasi terbatas pada mereka yang sering bertandang ke kantor desa saja yang biasanya sedang kebetulan membutuhkan layanan perangkat kantor desa.

Selain itu wujud partisipasi masyarakat pada kegiatan usaha ekonomi adalah berupa kelancaran angsuran pinjaman dana bergulir. Hal ini menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap perkembangan usaha kelompok di desanya, disamping bahwa dana pinjaman yang didapat telah menjadi sumber kebutuhan untuk mengembangkan usahanya, yang berarti pula transaksi pinjaman yang dilakukan hingga penelitian ini dilakukan karena rasa percaya kepada pengurusnya. Disamping karena pemberlakuan dan penerapan prinsip keterbukaan atau transparansi dari ketentuan PPK.

Kemudian wujud dari partisipasi masyarakat terhadap kegiatan usaha ekonomi produktif di desa Mendalanwangi yang paling nyata adalah dari jumlah anggota atau pemanfaat KSP Sari Bumi. Anggota KSP Sari Bumi yang berjumlah 531, menggambarkan adanya kepercayaan yang cukup tinggi terhadap keberadaan serta pengelolaan KSP Sari Bumi desa Mendalanwangi.

Program berkelanjutan (*sustainable program*) sebagai model atau pola program yang dianut oleh PPK, termasuk usaha ekonomi produktif sebagai salah satu kegiatan di dalamnya tidak hanya menekankan pada ada atau tidaknya, besar atau tidaknya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan

kegiatan PPK. Akan tetapi PPK juga memberikan perhatian yang besar terhadap pelestarian kegiatan, yang berarti pula diperlukan penjagaan atas kelangsungan kegiatan serta penjagaan hasil usaha atau kegiatan untuk bisa menjadi kegiatan yang berkesinambungan.

Keberhasilan Mendalanwangi sebagai pelaksana PPK yang memperoleh award karena kesuksesannya dalam menyelenggarakan dan melestarikan kegiatan-kegiatan PPK, terutama kegiatan usaha ekonomi produktif. Kesesuaian penyelenggaraan PPK di desa Mendalanwangi adalah salah satu faktor yang mengundang penghargaan tersebut. Kesesuaian hasil pelaksanaan ketentuan PPK dalam kegiatan Usaha Ekonomi Produktif sebagai wujud partisipasi masyarakat, antara lain bisa kita lihat sejak dari pembentukan kelompok usaha yang diawali dengan sosialisasi pada forum UDKP. Dari forum tersebut kemudian dilanjutkan Musbangdes I dan setelah mengadakan pertemuan penggalan gagasan di dusun-dusun diadakan Musbangdes II. Kemudian ditindaklanjuti dengan forum UDKP II yang menghasilkan kesepakatan untuk mendanai pembentukan KSP Sari Bumi Desa Mendalanwangi.

Faktor lainnya adalah kesuksesan masyarakat desa Mendalanwangi dalam melestarikan kegiatan PPK, terutama kegiatan usaha ekonomi produktif yang dalam hal ini adalah KSP Sari Bumi. Kesenambungan sebagai komponen utama pelestarian kegiatan ini dipengaruhi oleh inovasi-inovasi yang telah dilakukan. Selain menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan PPK, masyarakat desa Mendalanwangi juga melakukan beberapa inovasi yang terbukti mendukung kesinambungan kegiatan usaha kelompok usaha ekonomi produktif.

Kadangkala manusia memang perlu keluar dari lingkaran yang membatasinya walau tetap dalam koridor kemanusiaannya untuk memperbaiki kualitas hidup dan kehidupannya. Begitu pula dengan masyarakat Mendalanwangi yang tiada henti melakukan inovasi-inovasi dalam rangka menjaga kesinambungan usaha ekonomi produktif yang telah dikelolanya sejak PPK Phase I.

Inovasi yang dilakukan kadang-kadang memang agak keluar dari garis ketentuan yang telah disepakati, akan tetapi jika hal tersebut menghasilkan perkembangan yang menggembirakan justru akan lebih baik jika dijadikan masukan bagi desa maupun kecamatan pelaksana PPK lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk perbaikan baik penyelenggaraan maupun pelestarian kegiatan PPK, terutama kegiatan usaha ekonomi produktif.

Adapun inovasi yang dilakukan oleh masyarakat Mendalanwangi adalah berkenaan dengan keragaman produk usaha, upaya memperlancar perputaran modal, tambahan layanan bagi pemanfaat serta pengembangan pasar. Keragaman produk usaha KSP Sari Bumi yang dimaksud adalah adanya layanan tabungan berjangka, disamping layanan pinjaman usaha bergulir. Layanan tabungan berjangka tersebut disediakan dengan suku bunga yang cukup sesuai dengan jangka waktu pengambilan atau penarikan tabungan. Dari data hasil kegiatan, ternyata variasi atau ragam produk ini memberi kontribusi terhadap kenaikan jumlah anggota atau pemanfaat.

Kemudian dari ragam ini modal dapat diputar dengan bunga 4%, lebih besar 2% dari yang ditentukan dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional). Akan tetapi ketidaksesuaian ini justru mempercepat perputaran modal usaha, karena dengan menaikkan suku bunga pinjaman tersebut, para pemanfaat atau anggota KSP Sari Bumi justru lebih termotivasi untuk melakukan pengangsuran pinjaman secara tepat waktu. Selain melalui cara tersebut, pengurus juga melakukan pendekatan personal kepada pemanfaat yang angsuran pinjamannya bermasalah. Pendekatan yang dilakukan oleh pengurus adalah secara kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan prinsip PPK yaitu keterbukaan, dimana dalam pendekatan tersebut ada keterbukaan anggota atau pemanfaat tentang masalah yang dihadapi sehingga ketika pemecahan sudah disepakati tidak ada yang merasa dirugikan. Pendekatan ini juga baik untuk memupuk rasa kepercayaan antara kedua belah pihak. Selain itu dengan keterbukaan tersebut akan memupuk rasa memiliki (*sense of belonging*) yang akan menghasilkan kepedulian terhadap perkembangan usaha KSP Sari Bumi. Hubungan komensalisme ini tentunya baik untuk kelancaran perputaran modal, karena dengan adanya kesepakatan bersama dalam pemecahan masalah

tersebut mencegah adanya masalah yang berlarut-larut yang menghambat perputaran modal.

Selain itu KSP Sari Bumi juga memberikan layanan tambahan bagi para pemanfaat atau anggotanya. Tambahan tersebut dalam bentuk wisata maupun tunjangan hari raya yang dilakukan secara bergantian sesuai dengan kesepakatan forum bersama dengan anggota. Adapun dananya diambilkan dari SHU yang diambil dari hasil pendapatan bunga. Pada dasarnya hal ini juga bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam PTO. Namun data lapangan menyebutkan hal ini justru menjadi daya tarik bagi calon pemanfaat sehingga membuahkan peningkatan jumlah pemanfaat KSP Sari Bumi hingga Juni 2005 menjadi 531 pemanfaat.

Hasil inovasi yang telah disebutkan tadi memberikan pengaruh pada pertambahan modal usaha bergulir. Dari sini pengurus kemudian mengembangkan usaha KSP Sari Bumi ke luar desa Mendalanwangi yaitu desa Singosari, agar pemanfaat modal usaha bergulir semakin meluas.

Adapun pengambilan keputusan atas dilakukannya inovasi-inovasi tersebut adalah merupakan keputusan bersama dalam musyawarah tingkat desa yang kemudian disetujui dalam forum musyawarah para pelaku-pelaku PPK di tingkat kecamatan dan di tingkat desa beserta masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa Mendalanwangi dalam kegiatan usaha ekonomi produktif ini sangat sesuai dengan pola pembangunan Indonesia melalui desentralisasi atau yang lebih kita kenal dengan otonomi daerah. Masyarakat tidak lagi didikte dengan sistem *top down*. Melainkan telah ada proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Sehingga masyarakat telah mampu memutuskan secara representatif dalam mennetukan arah pembangunan desanya(*bottom up*). Pengkondisian tersebut telah sesuai dengan jalur yang harus dipenuhi atau dilewati dalam memberdayakan masyarakat. Dimana dalam proses pemberdayaan masyarakat, harus diciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk lebih berkembang.

Beberapa inovasi di atas, baik keragaman produk usaha, upaya memperlancar perputaran modal, tambahan layanan bagi pemanfaat maupun pengembangan pasar, sesuai dengan hasil dari inovasi yang dilakukan oleh masyarakat desa mendalanwangi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Inovasi-inovasi tersebut tergolong cukup cemerlang. Karena pertama, mampu menyelesaikan persoalan yang ada, dan kedua, keluar dari batas ketentuan PPK. Pola pikir masyarakat pedesaan yang cenderung konvensional, kurang terbuka terhadap perubahan dan cenderung selalu berada pada garis sistem atau bahkan tidak mau dan tidak berani keluar dari sistem seakan tidak memberi ruang untuk melahirkan inovasi-inovasi yang cukup brilian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas manusianya (*human growth*).

Oleh karena itu jika penyelenggaraan dan pelestarian kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat desa Mendalanwangi dilihat secara umum telah mengandung unsur-unsur sebagai berikut: pemberdayaan masyarakat (*public empowerment*), pengambilan keputusan oleh masyarakat secara representatif (*bottom up*) dan peningkatan kualitas manusia atau masyarakat (*human growth*). Unsur-unsur tersebut mengindikasikan perwujudan dari paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*). Akan tetapi penyelenggaraan dan pelestarian kegiatan usaha ekonomi produktif yang ada di desa Mendalanwangi belum bisa mewakili paradigma tersebut, karena belum ada indikator adanya pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*well being*) secara keseluruhan.

Belum terpenuhinya poin kesejahteraan masyarakat tersebut karena masyarakat pra sejahtera yang sedianya menjadi kelompok sasaran utama dalam kegiatan ini, hanya sedikit saja dari mereka yang turut serta berpartisipasi terutama dalam pelestarian program. Dari data yang telah disajikan, jumlah masyarakat pra sejahtera ada 170 orang yang berpartisipasi atau memanfaatkan dana bantuan bergulir dalam kegiatan usaha ekonomi produktif sebagai anggota. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin desa Mendalanwangi secara keseluruhan pada tahun 2005 yaitu sejumlah 760 jiwa, berarti ada sekitar 22% masyarakat pra sejahtera yang memberikan

partisipasinya dalam kegiatan ini. Angka tersebut tentunya masih belum bisa mewakili masyarakat pra sejahtera secara keseluruhan.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat desa Mendalanwangi dalam kegiatan usaha ekonomi produktif belum dapat dikatakan sebagai program atau proyek yang mampu mencerminkan paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia sebagai acuan pembangunan negara Indonesia. Sesuai dengan belum terpenuhinya indikator paradigma tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian di atas.

B.1.2 lapangan Kerja Baru

Pengelolaan modal ekonomi yang digulirkan menciptakan berbagai peluang usaha dan kerja di masyarakat. Peluang tersebut merupakan hasil pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi produktif yang bisa diakses masyarakat berdasarkan kemampuan dan kepercayaan serta kerjasama pihak masyarakat yang dalam hal ini adalah pemanfaat atau anggota itu sendiri maupun pengurus KSP. Variasi atau keragaman produk yang ditawarkan KSP Sari Bumi maupun kemudahan-kemudahan lainnya mampu menjadi magnet bagi para calon pemanfat hingga menghasilkan kenaikan jumlah pemanfaat menjadi 531 orang.

Jumlah pemanfaat tersebut jika dibandingkan dengan jumlah penduduk desa Mendalanwangi pada tahun 2005 yaitu sejumlah 7.078 jiwa berarti ada 0,01% penduduk yang menggunakan jasa kelompok kegiatan usaha ekonomi produktif yaitu KSP Sari Bumi. Sedangkan angka pengangguran di desa Mendalanwangi pada tahun 2001 adalah 598 jiwa atau 8,43% dari total jumlah penduduk, dan pada tahun 2005 jumlah pengangguran menjadi 520 jiwa atau 7,35% dari total jumlah penduduk. Berarti ada selisih 1,07% atau ada penurunan angka pengangguran di desa Mendalanwangi sebesar 1,07%. Dari penurunan angka pengangguran tersebut 0,01% diantaranya adalah kontribusi dari hasil kegiatan usaha ekonomi produktif. Angka 0,01% tersebut juga berarti bahwa lapangan kerja baru yang mampu diciptakan oleh kegiatan usaha ekonomi produktif di desa Mendalanwangi belum sebanding dengan kebutuhan desa akan lapangan kerja baru.

Meskipun demikian, sesedikit apapun penambahan atau kenaikan jumlah lapangan kerja berarti sedikit memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Melalui modal bantuan yang digulirkan, alternatif pekerjaan yang ditimbulkan membuat masyarakat tidak lagi harus terpaku pada pekerjaan lamanya yang seakan tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkembang, seperti yang telah dicantumkan dalam data hasil kegiatan usaha ekonomi produktif pada butir yang sama. Banyak pemanfaat yang menggunakan dana bantuan bergulir yang diperolehnya untuk membuka usaha baru. antara lain adalah melalui usaha kerajinan, membuka warung atau kios, *home industri* maupun beternak itik. Ada pula buruh tani yang menjalani usaha baru sebagai pedagang bahkan. Lapangan kerja baru tersebut lebih menjanjikan jika dibandingkan dengan masa kerja buruh tani yang bersifat musiman.

Pendapatan yang diterima buruh dengan strategi tertentu bisa menjalani profesi lamanya sebagai buruh tani sekaligus menjalani profesi barunya sebagai pedagang. Dua profesi yang dijalani sekaligus ini mendatangkan hasil pendapatan yang jauh lebih banyak dibanding dengan hanya menjadi buruh tani. Karena pendapatan yang diterima oleh buruh tani sangat dipengaruhi oleh jam kerja yang mampu dilakukannya yang juga dipengaruhi oleh luas lahan. Dan itu artinya semakin tua umur pekerja berarti semakin tidak produktif semakin minim pendapatan. Tetapi dengan memanfaatkan modal pinjaman memberikan kesempatan bagi mereka yang masih ingin produktif dalam memberikan kontribusinya pada pendapatan keluarga.

Begitu pula dengan pemilik tanah atau sawah, dengan membuka usaha baru melalui modal bantuan bergulir, masyarakat tidak lagi terbentur pada masalah standar sektor pertanian yaitu keterbatasan faktor produksi, seperti lahan, modal dan tenaga. Bahkan melalui jenis usaha non tenaga kerja akan memberikan penghasilan yang relatif tinggi per jam kerja/harinya.

Terciptanya peluang usaha maupun peluang kerja yang ada juga merupakan kontribusi dari jenis usaha *home industry*. Dengan modal bantuan bergulir yang diterima digunakan untuk mengembangkan usaha *home*

industry. Selain pengangguran, usaha tersebut dapat menyerap tenaga kerja tidak produktif yang ada di desa setempat.

Disamping pengembangan usaha yang bersifat pribadi tersebut, pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa Mendalanwangi adalah melalui pengembangan usaha kelompok usaha ekonomi produktif itu sendiri. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa pengembangan usaha yang dimaksud adalah perluasan akses pemanfaat atau pengembangan pengelolaan modal bergulir KSP Sari Bumi ke Singosari.

Dengan demikian di atas dapat diketahui bahwa di satu sisi kegiatan usaha ekonomi produktif yang telah diselenggarakan di desa Mendalanwangi memang telah mampu menciptakan lapangan usaha atau kerja baru yang menyerap tenaga kerja tidak produktif. Akan tetapi di sisi lain, penambahan lapangan kerja tersebut masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran yang ada di desa tersebut. Kontribusi yang diberikan tidak begitu signifikan terhadap penurunan jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja tidak produktif yang ada, bahkan hampir tidak terlihat (0,01%). Kenyataan ini dipengaruhi oleh belum adanya pengembangan kelompok kegiatan usaha ekonomi produktif yang lain (selain KSP Sari Bumi). Sebab semakin banyak jumlah kelompok kegiatan usaha ekonomi produktif yang dikembangkan diharapkan akan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi lebih banyak tenaga kerja tidak produktif, sebagaimana yang tertera dalam PTO pada hal pencapaian keberhasilan kegiatan usaha ekonomi produktif.

Kenyataan tersebut membuktikan bahwa perlu dilakukan pencermatan secara mendasar dalam ketentuan PPK untuk kebijakan kegiatan usaha ekonomi produktif. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan upaya menurunkan jumlah penduduk miskin melalui penciptaan lapangan kerja baru, belum ada penekanan pada penyerapan tenaga kerja dalam jumlah banyak atau yang kita kenal dengan padat karya. Karena seperti yang disinggung oleh Bank Dunia dalam pendahuluan tulisan ini, bahwa strategi pengentasan kemiskinan untuk saat ini akan lebih efektif dan efisien jika diselenggarakan dengan menggunakan metode tersebut. Melalui sistem pembukaan lapangan kerja baru yang bersifat padat karya, diharapkan akan

mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah angkatan kerja atau tenaga kerja tidak produktif sehingga secara bertahap dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dan pada akhirnya mampu berimplikasi pada penurunan jumlah penduduk miskin dengan lebih cepat, efektif dan efisien.

Oleh karena itu ada atau tidaknya penekanan terhadap sifat padat karya pada usaha kelompok ekonomi produktif yang akan dikembangkan termasuk di desa Mendalanwangi, sangat berpengaruh terhadap seberapa besar kegiatan ini dalam memberikan kontribusi terhadap jumlah peningkatan pendapatan masyarakat sehingga menjadi masyarakat sejahtera. Meskipun dalam penyelenggaraan dan pelestarian kegiatan usaha ekonomi produktif di desa Mendalanwangi telah memenuhi aspek-aspek seperti kesempatan (*opportunity*), pemberdayaan (*empowrment*), sebagai aspek yang harus mendampingi sistem padat karya dalam strategi yang secara matematis lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dari tingkat kompleksitas penyelesaian masalah pengentasan kemiskinan.

Jadi dapat digaris bawahi bahwa lapangan kerja baru yang dihasilkan dalam penyelenggaraan maupun pelestarian kegiatan usaha ekonomi produktif belum secara signifikan terhadap penurunan jumlah pengangguran di desa Mendalanwangi.

B.1.3 Pengembangan Usaha Masyarakat

Sebagian besar pemanfaat KSP Sari Bumi menggunakan dana bantuan yang diperolehnya untuk mengembangkan usahanya, baik untuk berdagang dalam bentuk warung dan kios atau toko. Penggunaan modal yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dari hasil pemantauan pengurus KSP, seluruh dana pinjaman dari dana bantuan kegiatan usaha ekonomi produktif dimanfaatkan oleh anggota untuk membuka maupun mengembangkan usaha yang telah ada dan berpotensi untuk berkembang terutama dari segi pemasarannya.

Kemudahan pelayanan KSP Sari Bumi yang disajikan kepada pemanfaatnya, adalah sebuah dukungan bagi pengembangan usaha

masyarakat. Hanya dengan memenuhi persyaratan administrasi berupa bukti kejelasan identitas dan jaminan kemampuan pengembalian pinjaman berikut tambahan jasanya, masyarakat Mendalanwangi sudah bisa menggunakan dana bantuan bergulir dari KSP Sari Bumi. Hal ini berarti peluang bagi masyarakat desa Mendalanwangi secara luas, untuk merintis usaha baru maupun mengembangkan usaha yang telah digeluti semakin terbuka lebar.

Dengan modal bantuan bergulir masyarakat lebih leluasa dalam mengembangkan usahanya. Tidak hanya menambah ragam maupun kualitas usahanya, masyarakat juga bisa mengembangkan pasarnya, dengan memperhatikan kemudahan mengakses pembeli, sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa pemanfaat yang diwawancarai oleh penulis. Hal ini dibuktikan oleh beberapa pemanfaat yang memperbanyak barang dagangannya kemudian membeli bedak di pasar Mendalanwangi yang tempatnya lebih strategis untuk memperbanyak konsumen.

Kelancaran perguliran modal yang ada juga didukung oleh pendekatan kekeluargaan dalam penyelesaian persoalannya. Karena pada perjalanannya, kadang-kadang pemanfaat mengalami kerugian yang berpengaruh pada kelancaran angsuran. Adapun solusi yang diambil oleh kedua belah pihak, yaitu melalui pemecahan secara kekeluargaan dengan membicarakan solusi yang tidak memberatkan anggota atau pemanfaat namun juga tidak merugikan pengurus anggota, hal ini tidak sampai menjadi masalah yang berlarut-larut hingga menghambat kelancaran perputaran modal. Pendekatan kekeluargaan ini memberikan efek yang positif terhadap kesinambungan usaha ke depan karena hal tersebut semakin mempererat kepercayaan satu sama lain yang kemudian menghasilkan kelancaran pengembalian pinjaman sehingga usaha kelompok yaitu KSP bisa bertahan bahkan berkembang bahkan membuka cabangnya di Singosari.

Cara yang digunakan dalam pendekatan kekeluargaan ini sesuai dengan prinsip PPK dalam hal keberpihakan pada masyarakat miskin. Karena disamping prinsip tersebut untuk mengkondisikan agar kegiatan-kegiatan dalam PPK termasuk kegiatan usaha ekonomi produktif melibatkan masyarakat miskin dalam setiap tahapannya, prinsip tersebut dimaksudkan

pula agar keberadaan kegiatan usaha ekonomi produktif tersebut tidak kemudian malah menjerat masyarakat pra sejahtera pada kesulitan yang justru berkepanjangan.

Di sisi lain belum adanya pengembangan usaha kelompok selain KSP Sari Bumi karena keengganan masyarakat berkenaan dengan panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan dana bantuan bergulir. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur yang diberlakukan oleh PPK dalam melahirkan kelompok usaha yang unggul melalui tahap kompetensi yang memakan waktu cukup lama, masih terlalu rumit bagi masyarakat desa setempat. Namun belajar dari pengalaman dari hasil program-program sebelumnya yang serupa, pemberlakuan kompetensi usaha kelompok ekonomi produktif dalam penggunaan dana bantuan yang ada memang sudah seharusnya dilakukan agar tepat sasaran. Dengan demikian masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan meniadakan tahap kompetensi, akan tetapi diperlukan perhatian yang lebih besar kepada titik tekan permasalahan yang sebenarnya ada pada waktu. Oleh karena itu diperlukan prosedur yang lebih ringkas dengan memangkas forum musyawarah yang ada agar bahasannya lebih padat sehingga waktu yang diperlukan lebih singkat paling tidak selisih waktunya tidak terlalu lama jika dibanding dengan waktu untuk memperoleh pinjaman dari KSP Sari Bumi.

Kemudian jika dipandang dari segi efek hasil yang muncul setelah terbentuk dan berkembangnya KSP Sari Bumi sebagai satu-satunya kelompok usaha ekonomi produktif, permasalahan mengenai ragam usaha yang belum muncul dalam bentuk kelompok usaha ekonomi produktif, tidak menjadi faktor penghambat bagi perkembangan dari usaha masyarakat secara umum. Karena banyak usaha masyarakat pada skala pribadi yang berkembang dengan cukup baik dari bantuan kegiatan usaha ekonomi produktif melalui KSP Sari Bumi. Namun jika dikembalikan lagi pada peruntukan kegiatan usaha ekonomi produktif, yaitu bahwa kegiatan usaha ekonomi produktif ditujukan bagi peningkatan atau pengembangan usaha yang menguntungkan dan sedang dijalankan serta membuka peluang usaha baru yang menguntungkan sesuai keterampilan atau keahlian yang dimiliki dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau membayar kembali,

utamanya dalam skala kelompok bagi masyarakat yang mempunyai jenis usaha yang sama sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PTO PPK. Maka penyelenggaraan kegiatan usaha ekonomi di desa Mendalanwangi masih belum memenuhi kriteria atau parameter keberhasilan kegiatan tersebut.

B.2. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pasca Kegiatan Usaha Ekonomi

Produktif

B.2.1 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa

Partisipasi mutlak diperlukan dalam pembangunan ekonomi desa. Efektivitas sebuah rancangan pembangunan, kelanggengan pemeliharaan hasil pembangunan banyak ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri. Hal tersebut juga menjadi acuan konsep yang tertuang dalam ketentuan PPK, dimana PPK termasuk kegiatan usaha ekonomi produktif sebagai kegiatan DOUM, dari, oleh dan untuk masyarakat.

Jika dilihat dari jalur yang harus dilampaui dalam memberdayakan masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat utamanya dalam hal pembangunan ekonomi desa. Maka kegiatan usaha ekonomi produktif di desa Mendalanwangi telah diselenggarakan dan dilestarikan melalui tiga jalur, yaitu:

1. menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.

Peningkatan partisipasi masyarakat desa Mendalanwangi dalam pembangunan desanya didukung oleh kemudahan untuk memperoleh serta mengakses informasi. Karena peningkatan partisipasi dari masyarakat tidak lepas dari seberapa jauh mereka mengetahui apakah partisipasinya akan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudahan tersebut diwujudkan dengan memperbanyak pintu-pintu peluang untuk mengakses informasi. Secara umum hal ini difasilitasi dalam PPK, dengan menerapkan sistem transparansi atau keterbukaan dalam setiap kegiatannya. Secara nyata di desa Mendalanwangi memberitahukan perkembangan kegiatan kelompok usaha ekonomi produktifnya secara

tertulis melalui papan informasi di kantor desa, sehingga lebih mudah bagi siapa saja untuk mengaksesnya.

Kemudahan tersebut membantu masyarakat untuk mengetahui perkembangan kegiatan ekonomi di desanya untuk kemudian berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi desanya. Karena selain pada forum-forum sosialisasi PPK, dari papan informasi tersebut juga didapatkan informasi bahwa pemanfaatan dari hasil usaha ekonomi produktif adalah untuk kegiatan pembangunan ekonomi desa sesuai dengan kesepakatan bersama masyarakat desa Mendalanwangi. Pemanfaatan media informasi tersebut terlihat dari pemanfaat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan usaha ekonomi produktif desa Mendalanwangi yaitu pemanfaat, baik sebagai kreditur maupun untuk memanfaatkan jasa tabungan. Serta mengikuti forum-forum musyawarah kelompok usaha ekonomi produktif tersebut untuk mengetahui perkembangan usaha dan menyelesaikan permasalahan yang muncul secara bersama-sama. Contohnya membahas masalah pemanfaatan SHU, memutuskan memilih opsi wisata atau tunjangan hari raya sebagai bentuk pembagiannya sebagai salah satu agenda tetap pada saat tutup buku.

2. penguatan potensi masyarakat.

Hal tersebut dapat dilihat pada pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan maupun pelestarian kegiatan usaha ekonomi produktif sejak awal. Dimana dari anggota masyarakat yang terpilih sebagai pengurus kemudian diberikan pengarahan oleh pelaku-pelaku PPK di atasnya dalam melakukan tugas dan kewenangannya sebagai pelaku-pelaku PPK dalam kegiatan usaha ekonomi produktif di tingkat desa. Termasuk juga pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka membina kelompok usaha skala pribadi yang tergabung sebagai pemanfaat atau anggota KSP Sari Bumi. Hal ini dimaksudkan agar usaha sebagai potensi masyarakat yang ada semakin berkembang baik dari segi kualitas produk maupun perluasan pasarnya.

Penguatan potensi masyarakat dalam kegiatan usaha ekonomi produktif yang mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan

tersebut di desa Mendalanwangi juga dapat kita lihat dari kemunculan serta diberlakukannya inovasi-inovasi baru yang mendukung keberlanjutan kegiatan usaha ekonomi produktif itu sendiri. Karena hal ini berarti pelaku-pelaku PPK, khususnya dalam hal kegiatan usaha ekonomi produktif mendukung adanya penguatan potensi masyarakat dalam hal berkreasi pada penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi selama perjalanan penyelenggaraan dan pelestarian kegiatan tersebut.

3. adanya perlindungan dalam pemberdayaan.

Keberpihakan penyelenggaraan dan pelestarian kegiatan pada masyarakat pra sejahtera diantaranya dengan digunakannya pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah angsuran bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam melakukan angsuran pinjaman menunjukkan bahwa dalam kegiatan usaha ekonomi produktif yang diselenggarakan di desa Mendalanwangi memberikan perlindungan dalam partisipasi masyarakat tersebut.

Adanya ketiga aspek tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat baik dalam penyelenggaraan maupun pelestarian kegiatan usaha ekonomi produktif di desa Mendalanwangi, dilakukan dengan menggunakan pendekatan pembangunan. Dimana pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Selain itu dari partisipasi masyarakat yang ada dalam penyelenggaraan maupun pelestarian kegiatan usaha ekonomi produktif di desa Mendalanwangi telah mencerminkan fase partisipatoris. Dimana pada fase ini, partisipasi yang diberikan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah dalam kegiatan tersebut sudah dilibatkan secara aktif untuk menuju kemandirian. Karena kegiatan tersebut diadakan oleh pemerintah yang diawali dengan tahap sosialisasi program, sedangkan penyelenggaraan berikut pelestariannya dilakukan oleh masyarakat dengan didampingi oleh pemerintah. Dimana fungsi pemerintah di desa Mendalanwangi, seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa tidak ada penerapan sistem *top down* dalam pengambilan keputusan. Artinya peran pemerintah hanya sebagai fasilitator bukan

pengambil keputusan dalam tahap operasional baik dalam penyelenggaraan maupun pelestarian kegiatan, melainkan benar-benar berfungsi sebagai pendamping atau pengarah saja.

Sedangkan untuk tingkatan dalam partisipasi masyarakat desa Mendalanwangi dalam kegiatan usaha ekonomi produktif baik dari segi penyelenggaraan maupun pelestariannya adalah termasuk dalam tingkat sugesti. Dimana dalam sebuah kelompok yang dalam hal ini adalah kelompok besar masyarakat dalam kegiatan usaha ekonomi produktif secara keseluruhan, dapat saling membantu untuk mengambil keputusan dan memberikan saran-saran yang bersifat kreatif, namun belum dapat menentukan keputusan secara sendiri. Hal ini bisa kita lihat dari inovasi-inovasi yang ada dalam percepatan perputaran modal dan upaya kelompok usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan jumlah pemanfaat atau anggotanya. Inovasi-inovasi yang cemerlang tersebut mencerminkan adanya kreativitas yang meningkat. Dan meskipun pelaku-pelaku PPK utamanya dalam kegiatan usaha ekonomi produktif, hanya berperan sebagai pendamping, akan tetapi masyarakat belum berada pada tahap sebagai pengambil keputusan secara tunggal atau belum pada tahap atau tingkat otoritas. Masih ada pendampingan dari pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Kategori tersebut di atas diambil dari partisipasi masyarakat desa Mendalanwangi pada pembangunan ekonomi desa melalui kegiatan usaha ekonomi produktif secara umum. Dalam cakupan partisipasi tersebut, jumlah partisipasi masyarakat dari kalangan masyarakat pra sejahtera masih cukup sedikit. Hal ini terlihat dari prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha ekonomi produktif sebanyak 22%. Akan tetapi jika dilihat dari segi ada atau tidaknya peningkatan dibanding jumlah masyarakat yang berpartisipasi pada tahun 2001, dimana pemanfaat dana bantuan bergulir kegiatan ini sama dengan daftar penerima program Raskin, maka partisipasi masyarakat tersebut pada tahun 2005 mengalami peningkatan.

B.2.2 Meningkatnya kemampuan lembaga dan aparat tingkat desa untuk mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat

Prinsip dan ketentuan PPK yang ada memang dirancang untuk tidak hanya memberdayakan masyarakatnya tetapi juga untuk meningkatkan kualitas lembaga dan aparat desa. Hal ini cukup beralasan karena, nantinya yang lebih banyak berperan dalam memfasilitasi masyarakat adalah kedua belah pihak tersebut. Oleh karenanya pelaku-pelaku PPK di wilayah yang lebih luas dibatasi perannya, hanya sebagai fasilitator dan bukanlah diktator. Dalam artian, keputusan-keputusan mengenai kegiatan tersebut diserahkan pada masyarakat dengan difasilitasi oleh dua pihak tersebut. Kalaupun ada masalah di tingkat desa, maka pengambil kebijakan adalah kedua pihak, dan bukan tugas fasilitator kabupaten untuk menentukan jawaban permasalahan yang muncul akan tetapi hanya untuk memfasilitasi saja.

Adapun peningkatan kemampuan lembaga dan aparat tingkat desa dalam mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat bisa kita lihat melalui beberapa indikasi yang sesuai dengan yang tercantum dalam pengukuran keberhasilan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam peningkatan kemampuan lembaga tersebut. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Baik lembaga desa maupun aparat desa Mendalanwangi telah mampu menumbuhkan motivasi masyarakat dalam kegiatan usaha ekonomi produktif baik dari segi penyelenggaraan maupun dari segi pelestariannya. Hal ini bisa kita lihat dalam jumlah partisipasi masyarakat pada kehadiran masyarakat dalam forum-forum musyawarah kegiatan usaha ekonomi produktif. Ada sekitar 66 orang yang hadir pada Musbangdes I dan meningkat menjadi 77 orang dalam Musbangdes II. Serta peningkatan pemanfaat atau anggota KSP Sari Bumi menjadi 531 orang. Peningkatan tersebut mencerminkan keberhasilan perangkat dan lembaga desa dalam memberdayakan masyarakatnya. Karena setelah Musbangdes I diadakan pertemuan di dusun-dusun, di sini terlihat animo masyarakat yang menyambut baik penyelenggaraan program ini. Animo tersebut merupakan perkembangan yang menggembirakan mengingat masyarakat desa Mendalanwangi pernah dikecewakan oleh ketiadaan transparansi

penggunaan dana program bantuan serupa, yaitu program kemitraan. Animo dalam pertemuan tersebut terwujud dalam bentuk berbagai ragam usulan kegiatan, diantaranya KSP Sari Bumi sebagai bentuk dari kelompok usaha ekonomi produktif yang pada akhirnya disetujui pada forum UDKP II. Upaya membangkitkan animo masyarakat tersebut merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi aparatur desa dan lembaga desa untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada program serupa. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan aparatur desa dan lembaga desa yang mengalami peningkatan profesionalitas dalam memberikan penjelasan mengenai seluk-beluk kegiatan PPK sehingga masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan ini.

- b. Baik lembaga desa maupun aparat desa Mendalanwangi telah mampu menggerakkan masyarakat dalam mengatur dan mengembangkan usahanya.

Hal tersebut diindikasikan dengan masih terjaganya keberlanjutan hasil kegiatan usaha ekonomi produktif oleh masyarakat desa Mendalanwangi. Serta dibuktikan dengan adanya peningkatan anggota atau pemanfaat kelompok usaha yang ada bahkan dilakukan pengembangan pasar usaha ke luar desa, yaitu dibentuknya Koperasi serupa di daerah Singosari. Beberapa hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan yang signifikan dalam hal kemampuan lembaga dan aparat desa untuk menggerakkan masyarakat dalam mengatur dan mengembangkan usahanya. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kedua lembaga tersebut dalam peranannya sebagai pelaku-pelaku PPK utamanya dalam kegiatan usaha ekonomi produktif, belum mampu mengkondisikan masyarakat agar membentuk kelompok usaha ekonomi produktif dengan lebih beragam.

- c. Baik lembaga desa maupun aparat desa Mendalanwangi telah mampu mengkondisikan masyarakat agar mampu berinisiatif secara mandiri dalam mengambil keputusan pada saat menghadapi masalah baik pada tahap

penyelenggaraan maupun pelestarian kegiatan, termasuk dalam hal pengembangan kreativitas yang ditandai dengan adanya inovasi.

Pengondisian masyarakat tersebut dapat kita lihat dari kemandirian masyarakat desa Mendalanwangi dalam menjawab permasalahan yang ada. Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh masyarakat desa Mendalanwangi salah satunya berupa penentuan suku bunga jumlahnya 2% lebih besar daripada ketentuan yang tercantum dalam PTO, merupakan hasil pemikiran yang mencerminkan tidak adanya dikte yang dilakukan oleh aparat desa maupun lembaga sebagaimana budaya yang dilakukan pada zaman pemerintahan orde lama yang cenderung hierarkis. Perubahan peran dan fungsi kedua lembaga desa ini menunjukkan bahwa ada transformasi peran yang positif dari peran sebagai "diktator" sebagai wujud dari pendekatan *top down* menjadi peran sebagai fasilitator sebagai wujud dari pendekatan *bottom up* yang berarti pula adanya peningkatan peran kemampuan lembaga dan aparat tingkat desa untuk mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat.

Peningkatan kemampuan lembaga maupun aparat desa tersebut didasarkan pada partisipasi masyarakat secara umum. Akan tetapi jika dilihat dari partisipasi kelompok sasaran kegiatan maka, aparat pemerintah desa maupun lembaga desa belum dapat dikatakan berhasil dalam mengorganisasikan dan memberdayakan masyarakat pra sejahtera utamanya dalam kegiatan usaha ekonomi produktif. Karena 170 atau sekitar 22% dari total jumlah masyarakat pra sejahtera desa Mendalanwangi, yang mewakili partisipasi masyarakat prasejahtera dalam kegiatan tersebut belum representatif terhadap jumlah masyarakat miskin secara keseluruhan.

Kemudian jika dilihat dari strategi dalam peningkatan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, maka strategi yang digunakan dalam mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam kegiatan usaha ekonomi produktif di desa Mendalanwangi adalah melalui kebijakan dan perencanaan. Dimana pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan diterima dalam pengembangan akses yang lebih merata terhadap sumber daya atau pelayanan.

B.2.3 Penurunan Jumlah Penduduk miskin

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa, kegiatan usaha ekonomi produktif ditujukan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi produktif di desa Mendalanwangi yang telah memenuhi prinsip PPK, yaitu kemudahan, terlembagakan, pemberdayaan dan akuntabilitas menghasilkan dampak yang positif, salah satunya penurunan jumlah penduduk miskin.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut mendukung pemanfaatan dana secara efektif sehingga tepat sasaran. Prinsip-prinsip tersebut dapat kita lihat pada hasil kegiatan usaha ekonomi produktif yaitu pada pelayanan atau produk simpan pinjam yang ditawarkan oleh KSP Sari Bumi. Mulai dari kemudahan akses informasi, kemudahan dalam pendaftarannya maupun cara memperoleh dana bantuan bergulir. Yaitu seperti disinggung sebelumnya hanya dengan melengkapi syarat administratif dan jaminan pengembalian masyarakat sudah langsung bisa menikmati dana bantuan bergulir. Kemudian transparansi yang telah dilaksanakan melalui kemudahan akses informasi dengan memperbanyak media akses informasi secara sederhana membuahkan kepercayaan masyarakat yang tercermin dalam peningkatan jumlah pemanfaat. Hal tersebut juga merupakan wujud dari akuntabilitas yang baik dari kegiatan ini.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut baik dalam penyelenggaraan maupun pelestarian kegiatan usaha ekonomi produktif juga meningkatkan partisipasi aktif masyarakat desa Mendalanwangi dengan menjadi anggota atau pemanfaat KSP Sari Bumi hingga menjadi 531 orang pemanfaat. Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang tidak sedikit jika dikembalikan pada pengalaman pahit masyarakat desa setempat. Mengingat masyarakat desa Mendalanwangi pernah mengalami kekecewaan pada program bantuan pemerintah yaitu program kemitraanseperti yang telah dijelaskan oleh perangkat desa Mendalanwangi.

Kekecewaan karena tidak diterapkannya prinsip transparansi ini tentunya tidak begitu saja menghilang seiring berjalannya waktu. Akan tetapi penerapan ketentuan-ketentuan PPK serta penerapan prinsip-prinsip yang ada

di dalamnya telah mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat pada program bantuan bergulir dari pemerintah.

Pengembangan usaha dari hasil dana pinjaman bergulir tersebut membuka peluang kerja yang baru, sebagaimana yang telah dijelaskan pada butir sebelumnya. Peningkatan peluang kerja tersebut berbentuk sektor informal yang efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dibanding pendapatan masyarakat sebelum menerima dana bantuan untuk usaha kelompok ekonomi produktif. Pendapatan para buruh tani, sebagai pekerjaan sebagian besar masyarakat desa Mendalanwangi mengalami perbaikan setelah memanfaatkan dana bantuan bergulir tersebut untuk membuka usaha baru. Karena, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa para buruh tani tidak lagi bergantung pada kemampuannya menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu juga tidak lagi bergantung pada seberapa luas lahan yang mampu ia kerjakan yang tentunya sangat berhubungan dengan tingkat produktivitas buruh itu sendiri. Kenaikan pendapatan ini merupakan kemudian meingkatkan kesejahteraan masyarakat yang berimplikasi pada penurunan jumlah penduduk miskin di desa Mendalanwangi.

Adapun jumlah penurunan penduduk miskin atau pra sejahtera belum terlalu signifikan jika dibanding dengan jumlah penduduk desa Mendalanwangi. Dari data yang telah dikemukakan pada penjelasan terdahulu yaitu pada poin kondisi demografis masyarakat desa, jumlah penduduk desa Mendalanwangi, berdasarkan hasil data yang diolah dalam data "Kecamatan Wagir dalam Angka" pada tahun 2001 adalah sejumlah 7.095 jiwa atau 1.557 keluarga. Dan pada tahun 2005 jumlah penduduk desa Mendalanwangi adalah 7.078 jiwa atau 1.580 keluarga. Berarti ada penurunan jumlah penduduk pada tahun 2005 jika dibandingkan dengan tahun 2001 sebanyak 17 jiwa. Sedangkan jumlah keluarga miskin atau keluarga pra sejahtera di desa tersebut pada tahun 2001 adalah 386 keluarga atau 1.544 jiwa dan pada tahun 2005 terdapat 190 keluarga pra sejahtera atau 760 jiwa. Dari data jumlah keluarga pra sejahtera tersebut didapat penurunan jumlah penduduk pra sejahtera sejumlah 784 jiwa.

Berarti jika dihitung rasio jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk yang ada pada tahun 2001 adalah prosentase rasionya ada sekitar 2,18%. Kemudian pada tahun 2005 maka prosentase rasionya adalah 0,12%. Dengan demikian ada penurunan jumlah masyarakat pra sejahtera di desa Mendalanwangi sebanyak 2,06%. Jika dilihat dari kontribusi kegiatan usaha ekonomi produktif maka dari jumlah masyarakat pra sejahtera yang hanya ada 170 orang yang berpartisipasi atau memanfaatkan dana bantuan bergulir dalam kegiatan usaha ekonomi produktif sebagai anggota. Didapatkan prosentase rasio terhadap jumlah penduduk desa Mendalanwangi pada tahun 2005 sekitar 22%. Angka tersebut tentunya masih belum bisa membuat hasil kegiatan usaha ekonomi produktif

Hal ini sangat dipengaruhi oleh kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan utamanya oleh aparat dan lembaga desa kepada masyarakat pra sejahtera sebagai kelompok sasaran utama dari program ini. Disamping belum terbentuknya kelompok usaha ekonomi produktif yang lebih beragam serta tidak adanya penekanan sifat padat karya pada usaha yang dikembangkan.

Karena beberapa hal tersebut sangat berkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja atau angkatan kerja tidak produktif yang pada akhirnya diharapkan akan mampu untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan jumlah masyarakat miskin atau masyarakat pra sejahtera.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. hasil penyelenggaraan kegiatan usaha ekonomi produktif di desa Mendalanwangi, menunjukkan:
 - a. partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut belum mencerminkan paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia, karena belum memenuhi kriteria peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
 - b. lapangan kerja baru yang diciptakan oleh kegiatan tersebut belum mampu menampung jumlah pengangguran yang ada.
 - c. pengembangan usaha masyarakat dari hasil kegiatan tersebut belum menghasilkan kelompok usaha yang lebih beragam.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat desa Mendalanwangi, pasca kegiatan usaha ekonomi produktif, menunjukkan bahwa:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa masih terbatas pada masyarakat non pra sejahtera saja dan belum banyak melibatkan masyarakat pra sejahtera.
 - b. kemampuan lembaga dan aparat desa dalam memberdayakan dan mengkoordinasikan masyarakat belum memenuhi kriteria keberhasilan, meskipun ada beberapa peningkatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil dari penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka demi kepentingan perbaikan pelestarian dan penyelenggaraan program di masa yang akan datang, penulis menyarankan untuk:

1. diberlakukannya penetapan suku bunga yang cukup sebagaimana yang diberlakukan pada KSP Sari Bumi, guna meningkatkan motivasi masyarakat

pengguna jasa bantuan bergulir pada wilayah pelaksanaan PPK yang lain, Sebagai bahan masukan bagi perbaikan PTO ke depan untuk penyelenggaraan PPK yang lebih baik.

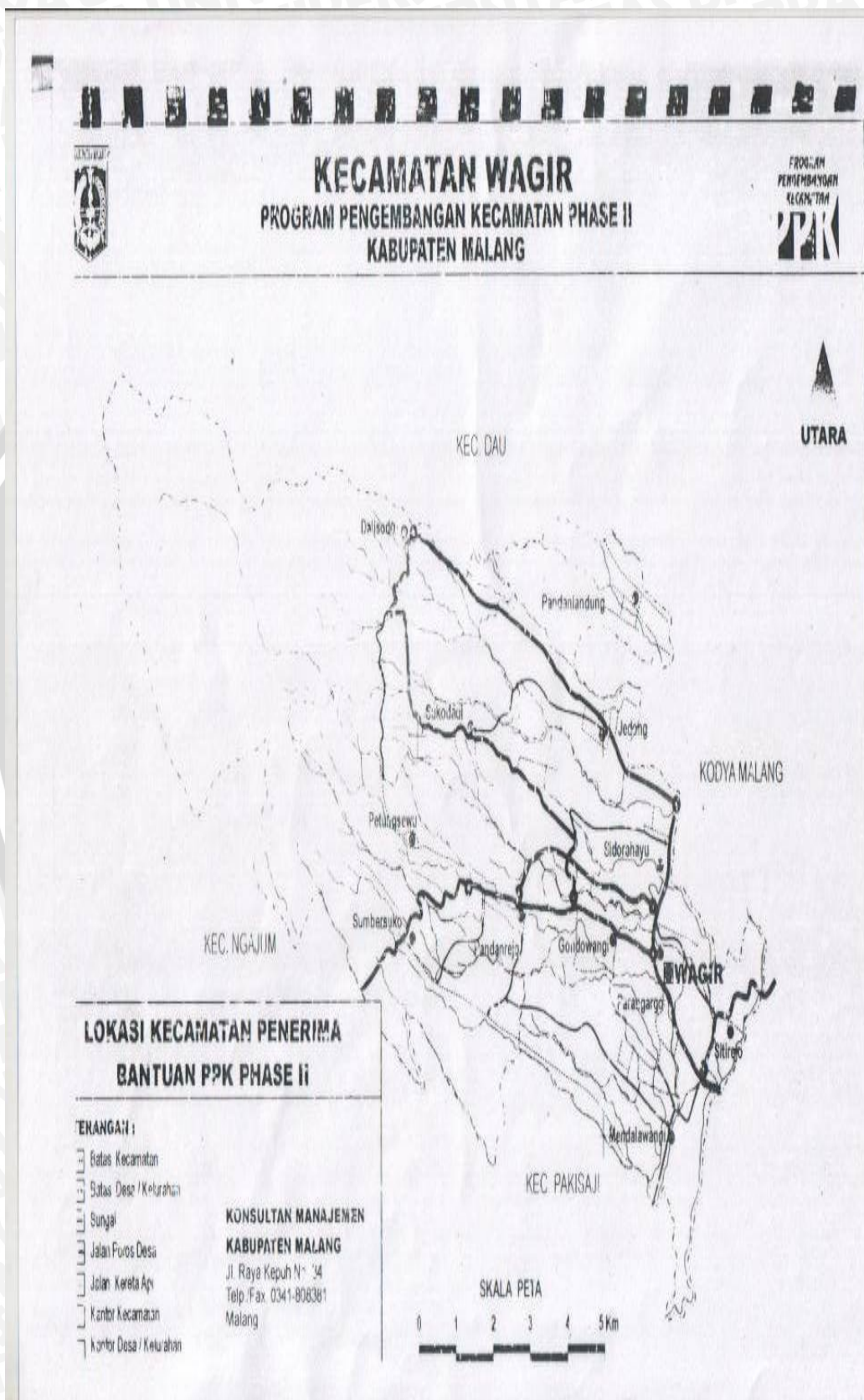
2. Jumlah pemanfaat pra sejahtera/miskin yang masih terlalu kecil dibanding jumlah pemanfaat sejahtera yang ada hendaknya dijadikan prioritas perhatian. Melihat efektivitas dari KSP Sari Bumi dalam menciptakan lapangan kerja baru, hendaknya masyarakat pra sejahtera lain diberikan penyuluhan dengan pendekatan yang sesuai secara lebih intensif. Karena jumlah 30% tersebut masih belum representatif jika dibanding total penduduk miskin yang ada di Desa Mendalanwangi.
3. Perlu segera dirumuskan strategi yang mampu mendorong masyarakat desa agar mereka termotivasi untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif yang lain agar jumlah lapangan kerja yang diserap melalui kegiatan ini bisa bertambah.



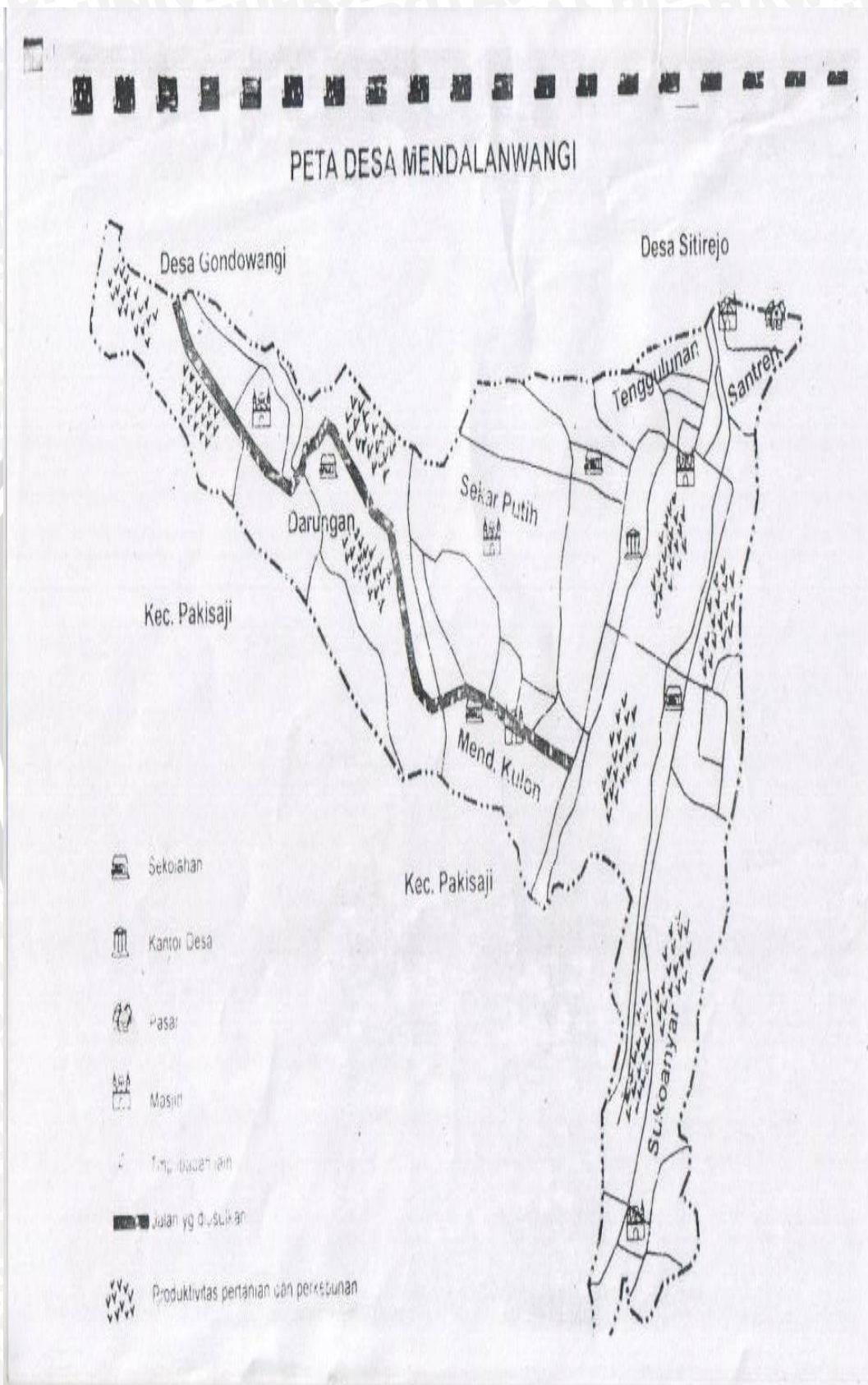
DAFTAR PUSTAKA

- Zauhar, Soesilo, Prof, 1993. Administrasi Program dan Proyek Pembangunan. Malang: IKIP Malang.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, Prof, 1985. Perencanaan Pembangunan. Jakarta : PT Gunung Agung.
- Soekartawi, 1996. Pembangunan Pertanian untuk Mengentaskan Kemiskinan. Jakarta: UI Press.
- Siagian, Drs, 1983. Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung: Alumni.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996. Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan). Jakarta: CIDES.
- Saefudin, asep, dkk, 2003. Menuju Masyarakat Mandiri (Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial). Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Prijono, Sonny dan A.M.W Pranarka, 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: CSIS.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tim PPK Pusat, 2000. Petunjuk Teknis Operasional PPK. Jakarta.
- Simatupang, T.A.M, 1990. Pelaksanaan dan Manajemen Proyek. Jakarta: LP UKI.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996. Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
-, 2002. Draft Kebijakan Teknis PPK TA 2002. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996. KBBI, Edisi Ke Dua, Cetakan ke Tujuh. Jakarta: Balai Pustaka.
- Maskur, H. Sumitro, 1993. Pembangunan Masyarakat Desa, Azas, Kebijakan dan Manajemen. Yogyakarta: MW. Mandala.
- Miles, Mathew B. Dan Huberman, A, 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J, 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Heru, 2001. Negara, Pasar dan Keadilan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lampiran 1
Peta Kecamatan Wagir



Peta Desa Mendalanwangi



Lampiran 2

Jumlah Penduduk dan Jumlah Keluarga Kecamatan Wagir tahun 2001

Nama Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Registrasi Penduduk (Teratur/Tidak Teratur)	Jumlah Penduduk	Jumlah Keluarga (KK)	Rata-rata Banyaknya Anggota Keluarga
1. Sumpersuko	Teratur	6.178	1.444	5
2. Mendalanwangi	Teratur	7.078	1.580	4
3. Sitirejo	Teratur	7.371	1.583	5
4. Parangargo	Teratur	4.478	1.003	5
5. Gondowangi	Teratur	6.399	1.599	4
6. Pandanrejo	Teratur	4.267	964	4
7. Petungsewu	Teratur	3.688	871	4
8. Sukodadi	Teratur	4.179	1.036	4
9. Sidorahayu	Teratur	7.696	1.782	4
10. Jedong	Teratur	6.649	1.404	5
11. Dalisodo	Teratur	7.065	1.502	5
12. Pandanlandung	Teratur	6.972	1.593	4
Jumlah		72.830	16.361	4,5

Sumber: Kecamatan Wagir Dalam Angka Tahun 2001



Lampiran 3

Jumlah Penduduk dan Jumlah Keluarga Kecamatan Wagir tahun 2005

Nama Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Registrasi Penduduk (Teratur/Tidak Teratur)	Jumlah Penduduk	Jumlah Keluarga (KK)	Rata-rata Banyaknya Anggota Keluarga
1. Sumbersuko	Teratur	6.287	1.413	4
2. Mendalanwangi	Teratur	7.095	1.557	4
3. Sitirejo	Teratur	7.309	1.567	4
4. Parangargo	Teratur	4.830	998	4
5. Gondowangi	Teratur	6.363	1.588	4
6. Pandanrejo	Teratur	4.251	958	4
7. Petungsewu	Teratur	3.672	878	4
8. Sukodadi	Teratur	4.154	1.027	4
9. Sidorahayu	Teratur	7.629	1.763	4
10. Jedong	Teratur	6.603	1.394	4
11. Dalisodo	Teratur	6.000	1.485	4
12. Pandanlandung	Teratur	6.935	1.581	4
Jumlah		71.668	16.209	4

Sumber: Kecamatan Wagir Dalam Angka Tahun 2005



Lampiran 4

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Desa Kecamatan Wagir tahun 2001

Nama Desa/Keluarahan	Kepadatan Penduduk	Kepadatan Keluarga Per Km ²	Keluarga Pra Sejahtera
1. Summersuko	425	91	686
2. Mendalanwangi	1.974	440	386
3. Sitirejo	2.863	615	314
4. Parangargo	2.046	432	253
5. Gondowangi	1.530	382	302
6. Pandanrejo	1.161	262	381
7. Petungsewu	537	126	450
8. Sukodadi	562	139	306
9. Sidorahayu	1.816	420	607
10. Jedong	1.863	393	334
11. Dalisodo	391	83	726
12. Pandanlandung	1.724	393	264
Jumlah	954	214	5.009

Sumber: Kecamatan Wagir Dalam Angka Tahun 2001



Lampiran 5

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Desa Kecamatan Wagir tahun 2005

Nama Desa/Kelurahan	Kepadatan Penduduk	Kepadatan Keluarga Per Km ²	Keluarga Pra Sejahtera
1. Sumpoko	432	89	674
2. Mendalanwangi	1.979	434	190
3. Sitirejo	2.839	608	316
4. Parangargo	2.081	430	229
5. Gondowangi	1.522	379	243
6. Pandanrejo	1.157	260	373
7. Petungsewu	535	127	423
8. Sukodadi	559	138	295
9. Sidorahayu	1.800	416	484
10. Jedong	1.850	390	387
11. Dalisodo	332	82	713
12. Pandanlandung	1.712	390	250
Jumlah	939	212	4.557

Sumber: Kecamatan Wagir Dalam Angka Tahun 2005



Lampiran 6

Banyaknya Penduduk Kecamatan Wagir yang Menganggur tahun 2001

Nama Desa/Kelurahan	Banyaknya Penduduk Yang Menganggur	Jumlah Penduduk (%)	Jumlah Keluarga (%)
1. Sumbersuko	530	7,09	32,96
2. Mendalanwangi	598	8,43	45,2
3. Sitirejo	430	5,05	23,50
4. Parangargo	400	6,99	33,10
5. Gondowangi	435	6,20	24,83
6. Pandanrejo	350	5,58	24,69
7. Petungsewu	333	7,89	33,41
8. Sukodadi	443	8,21	33,11
9. Sidorahayu	523	5,76	24,86
10. Jedong	447	5,25	24,86
11. Dalisodo	511	5,25	24,70
12. Pandanlandung	444	5,67	24,80
Jumlah	6.342	6,22	27,67

Sumber : Kecamatan Wagir Dalam Angka tahun 2001



Lampiran 7

Banyaknya Penduduk Desa Mendalanwangi yang Mengganggu tahun 2005

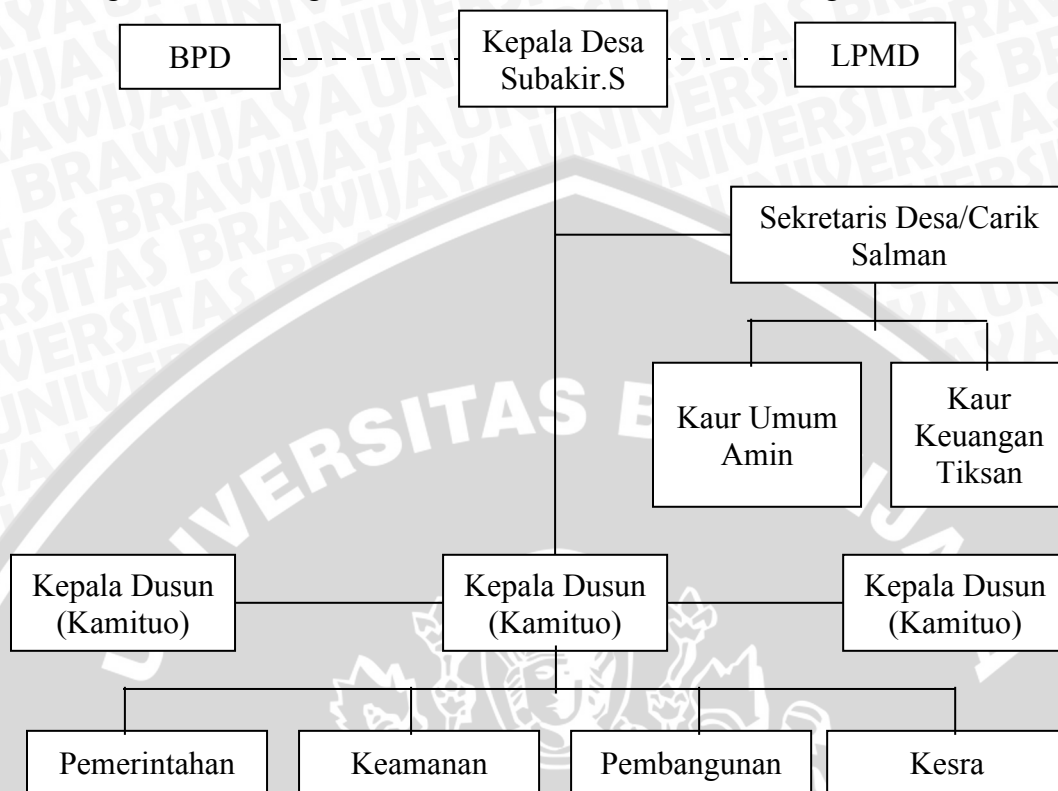
Nama Desa/Kelurahan	Banyaknya Penduduk Yang Mengganggu	Jumlah Penduduk (%)	Jumlah Keluarga (%)
1. Sumbersuko	476	7,09	32,96
2. Mendalanwangi	520	7,35	32,91
3. Sitirejo	372	5,05	23,50
4. Parangargo	332	6,99	33,10
5. Gondowangi	397	6,20	24,83
6. Pandanrejo	238	5,58	24,69
7. Petungsewu	291	7,89	33,41
8. Sukodadi	343	8,21	33,11
9. Sidorahayu	443	5,76	24,86
10. Jedong	349	5,25	24,86
11. Dalisodo	371	5,25	24,70
12. Pandanlandung	395	5,67	24,80
Jumlah	4.527	6,22	27,67

Sumber : Kecamatan Wagir Dalam Angka 2005



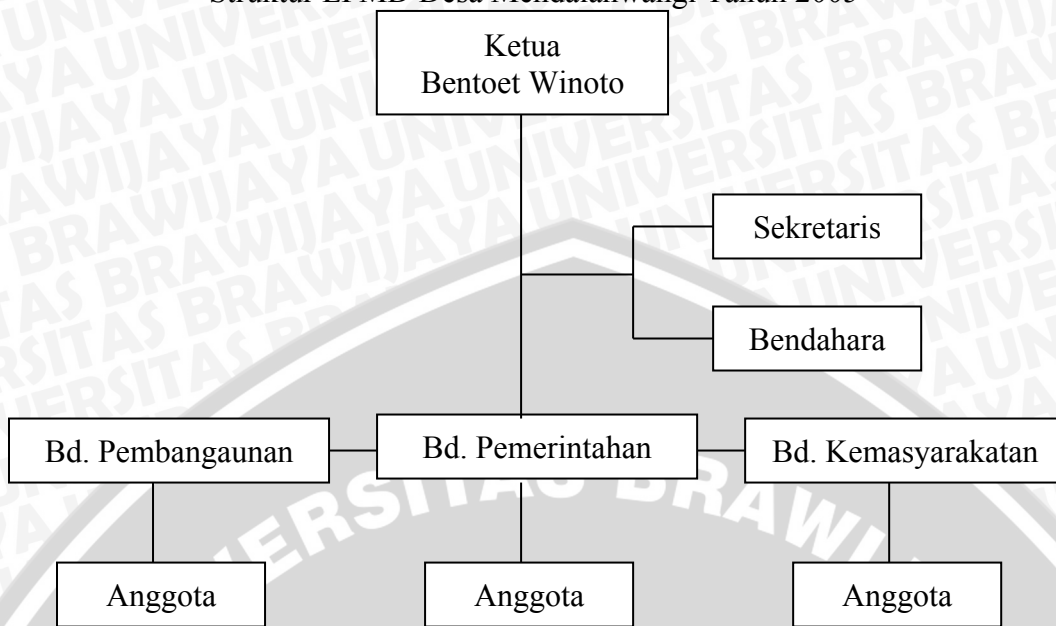
Lampiran 8

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Mendalanwangi tahun 2005



Sumber: Kantor Desa Mendalanwangi, 2005

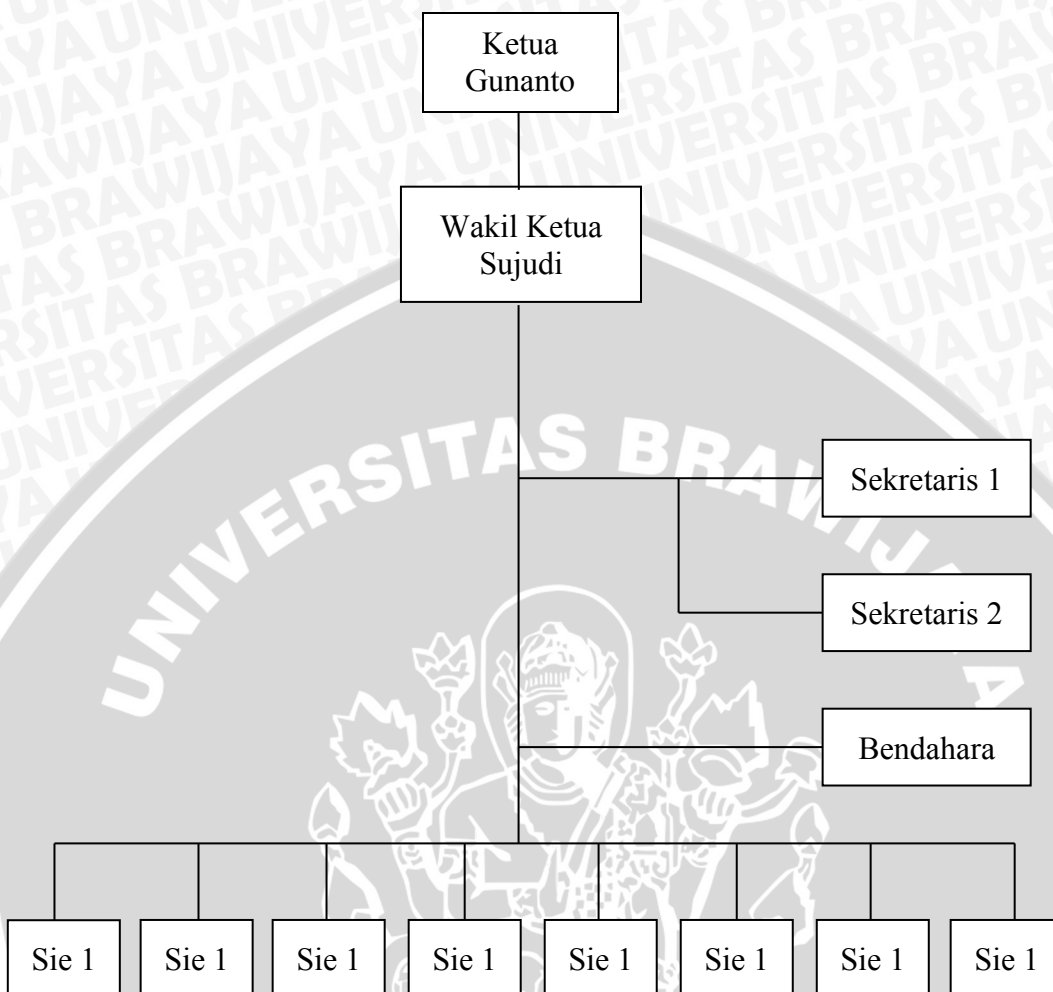
Struktur LPMD Desa Mendalanwangi Tahun 2005



Sumber: Kantor Desa Mendalanwangi, 2005



Struktur BPD Desa Mendalanwangi tahun 2005



Sumber: Kantor Desa Mendalanwangi, 2005

Lampiran 9
Surat Keputusan Bersama KSP Sari Bumi



Lampiran 11

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
 NASABAH KELOMPOK SIMPAN PINJAM SARI BUMI
 UNIT PEDAGANG PASAR

Pada hari Rabu tanggal. 5 April 2000 diadakan musyawarah anggota kelompok Simpan Pinjam Unit Pedagang Pasar Mendalanwangi Kec.wagir g dihadiri 59 orang pedagang Pasar dengan memperoleh persetujuan erti dibawah ini :

Tiap-tiap nasabah diharuskan menabung 10 % dari jumlah pinjaman, dan memperoleh Jasa 2 % tiap bulan serta tabungan dapat diambil setelah hutang dilunasi.

Kelompok Simpan Pinjam wajib menerima Simpanan sukarela dari para nasabahnya atau dari luar nasabahnya apabila sangat diperlukan untuk menambah permodalan K S P.

Nasabah diwajibkan membayar uang Administrasi yang besarnya sesuai dengan besarnya pinjaman sebagai Standar bila Pinjam Rp. 50.000,- administrasinya sebesar Rp. 1000,-

Nasabah bila akan meminjam Uang KSP diharuskan dua hari sebelum nya sudah harus menyampaikan/memberitahukan kepada Pengurus KSP.

Tabungan wajib atau tabungan sukarela dapat diambil sewaktu waktu yang jumlahnya kurang dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan yang jumlahnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keatas harus memberitahukan lebih dahulu 2 (dua) hari sebelum mengambil.

Semua Nasabah dapat melunasi pinjamannya dalam waktu sebelum jatuh temponya, dengan dhitung bunganya bulan pelunasan contoh :

- a. Pelunasan dhitung 1 bulan bunganya dhitung 5,6 %.
- b. Pelunasan dhitung 2 bulan, bunganya dhitung 11,2 %.
- c. Pelunasan dhitung 3 bulan (jatun tempo) bunganya dhitung 16,8 %.
- d. Pelunasan lebih dari Jatun tempo dikenakan biaya administrasi dan diperhitungkan tambahan bunga pinjaman.

Tiap-tiap tahun Kelompok Simpan Pinjam harus dapat memberikan hadiah hari Raya kepada semua Nasabahnya sesuai jumlah pinjamannya ya disesuaikan dengan keadaan K.S.P. serta diatur oleh Pengurus.

Seluruh Nasabah dapat mengangsur setiap hari dengan jumlahnya melibihi angsuran, yang selebihnya dimasukan ke tabungan sukarela, yang pengambilannya dapat diambil sewaktu waktu.

Keputusan bersama ini dapat dirubah menurut keadaan dan persetujuan anggota Kelompok Simpan Pinjam Unit Pedagang Pasar.

Demikian hasil kesepakatan bersama anggota K S P semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk kepada kita seluruhnya Amin.

Mendalanwangi, 5 April 2000

KELOMPOK SIMPAN PINJAM UNIT PEDAGANG PASAR

Ketua

Sekretaris

[Handwritten Signature]
 BOIMIN



[Handwritten Signature]
 SAMIADI



Lampiran 9
Alokasi SHU KSP Sari Bumi Mei 2005

WAGIR
18-10-2005

NO	URAIAN		JML
1	Pembelian gula 0,75 ton	3.000.000	3.000.000
2	Syrup	2.065.000	5.065.000
3	Plastik dan Kresek	75.000	5.140.000
4	Untuk RW	200.000	5.340.000
5	Kebersihan	150.000	5.490.000
6	Pembagian SHU (4%)	3.886.020	9.376.020
7	Untuk soto	5.220.000	14.596.020
8	THR	3.600.000	17.596.020

SINGOSARI

NO	URAIAN		JML
1	Pembelian gula 0,25 ton	1.000.000	1000.000
2	Syrup	875.000	1.875.000
3	Pembagian SHU	2.057.468	3.932.460
4	Renovasi	750.000	4.682.468
5	THR	1.500.000	6.182.468
6	Biaya Bunga	595.400	6.771.868

CURRICULUM VITAE



Zuli Astutik, SAp. Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi dengan NIM. 0003010121-31. dilahirkan di Probolinggo pada tanggal 9 Juli 1982. Pendidikan SDnya ditempuh di SDN Kraksaan Wetan II, tamat tahun 1994, dan dilanjutkan ke SMPN I Kraksaan dan selesai tahun 1997.

Kemudian dilanjutkan ke SMA II Pare di Kediri, tamat tahun 2000 lalu menempuh S1 Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang dan pada akhirnya selesai pada tahun terakhir yaitu tahun 2007.

Penulis melanjutkan studi kehidupannya pada fakultas kehidupan dengan mengabdikan sebagai istri dari Bapak Bandi Hisbullah Huda dan Ibu dari Ahmad Al Hakim Rosyidil Azam dan si dd, berjuang meraih gelar istri sholehah.

